

**HUBUNGAN ANTARA MODAL SOSIAL HIMPUNAN PETANI  
PEMAKAI AIR (HIPPA) DALAM GABUNGAN HIMPUNAN PETANI  
PEMAKAI AIR (GHIPPA) DENGAN TINGKAT PARTISIPASI PETANI  
DALAM PENGELOLAAN AIR IRIGASI  
(Kasus pada Gabungan HIPPA “Tirto Aji” di Daerah Irigasi  
Ngudikan Kiri Kabupaten Nganjuk)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**DONNY FAJAR PRATAMA**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS PERTANIAN**

**JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN**

**PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN**

**MALANG**

**2009**

**HUBUNGAN ANTARA MODAL SOSIAL HIMPUNAN PETANI  
PEMAKAI AIR (HIPPA) DALAM GABUNGAN HIMPUNAN PETANI  
PEMAKAI AIR (GHIPPA) DENGAN TINGKAT PARTISIPASI PETANI  
DALAM PENGELOLAAN AIR IRIGASI  
(Kasus pada Gabungan HIPPA “Tirto Aji” di Daerah Irigasi  
Ngudikan Kiri Kabupaten Nganjuk)**

Oleh :

**DONNY FAJAR PRATAMA**

**0410453002-45**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu gelar untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Pertanian Strata Satu (S-1)**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS PERTANIAN**

**JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN**

**PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN**

**MALANG**

**2009**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Judul** : HUBUNGAN ANTARA MODAL SOSIAL HIPPA DALAM  
GHIPPA DENGAN TINGKAT PARTISIPASI PETANI  
DALAM PENGELOLAAN AIR IRIGASI

(Kasus pada Gabungan HIPPA “Tirto Aji” di Daerah Irigasi  
Ngudikan Kiri Kabupaten Nganjuk)

**Nama** : DONNY FAJAR PRATAMA

**Nim** : 0410453002-45

**Jurusan** : Sosial Ekonomi Pertanian

**Program Studi** : Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian

**Menyetujui,**

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

**Dr. Ir. Kliwon Hidayat, MS**  
NIP. 130 873 498

**Reza Safitri, S.Sos, MSi**  
NIP. 132 233 143

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan**

**Dr. Ir. Djoko Koestiono, MS**  
NIP. 130 936 227

**Tanggal Persetujuan** : .....

Mengesahkan,

**MAJELIS PENGUJI**

**Dosen Penguji I,**

**Dosen Penguji II,**

**Ir. Hamid Hidayat, MS**  
**NIP. 130 704 146**

**Dr. Ir. Kliwon Hidayat, MS**  
**NIP. 130 873 498**

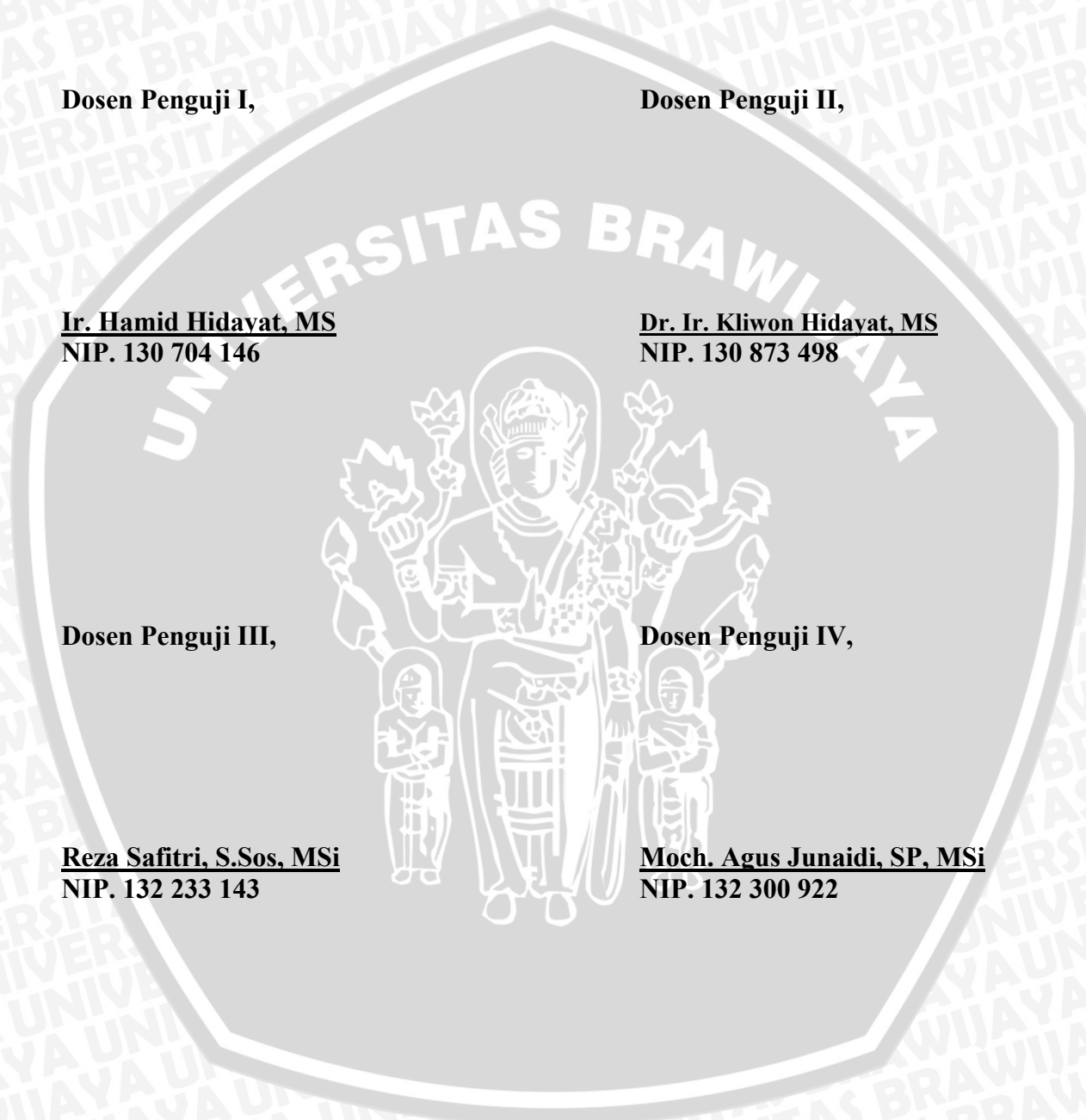
**Dosen Penguji III,**

**Dosen Penguji IV,**

**Reza Safitri, S.Sos, MSi**  
**NIP. 132 233 143**

**Moch. Agus Junaidi, SP, MSi**  
**NIP. 132 300 922**

**Tanggal Lulus : .....**



*Jangan Lihat Ke Belakang Dengan Penyesalan  
Jangan Lihat Ke Depan Dengan Ketakutan  
Lihatlah Sekeliling Dengan Penuh Kesabaran*

*"Seperti Gede Ne Sengso Ke Yen Jinom Po Among Dadi Gode"*

*Karya ini ku persembahkan untuk  
Ayah dan Ibu tercinta  
Istriku Dian Pramita Sari, Amd. Kep  
Buah Hatiku Nadia Amiranaha Fadhesla  
Semua pihak yang telah menjadi motivatorku*



## RINGKASAN

**Donny Fajar Pratama (0410453002-45). Hubungan Antara Modal Sosial Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Dalam Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) Dengan Tingkat Partisipasi Petani Dalam Pengelolaan Air Irigasi (Kasus pada Gabungan HIPPA “Tirto Aji” di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri, Kabupaten Nganjuk). Dibawah Bimbingan Dr. Ir. Kliwon Hidayat, MS dan Reza Safitri, S.Sos. MSi.**

---

Sebagaimana diketahui bahwa air merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan baik bagi manusia, hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu sudah selayaknya bila air dihargai sebagai potensi ekonomi dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam arti harus dipergunakan secara efektif dan efisien.

Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) adalah gabungan dari beberapa Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang mempunyai tujuan mendayakan potensi mengelola jaringan irigasi agar dalam pelayanannya kepada anggota (petani) secara tepat guna dan berhasil guna. Masing-masing HIPPA bertanggung jawab atas masing-masing daerah pelayanannya, pengurus HIPPA lebih dilibatkan dalam pelayanan kepada petani anggota HIPPA dan nantinya dapat mengembangkan modal sosial yang ada didalamnya. Modal sosial HIPPA dapat terwujud dengan baik apabila didalamnya terdapat hubungan yang baik antara ketua, pengurus dan petani. Hubungan yang baik tersebut dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, nilai-nilai bersama dan saling pengertian.

Upaya untuk mendorong peran serta petani diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk bisa ikut menjaga dan memelihara jaringan irigasi yang sudah ada. Selain itu partisipasi petani akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh pelayanan yang baik dari HIPPA dalam menjalankan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui kondisi modal sosial dalam Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). 2) Mendeskripsikan tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi. 3) Menganalisis hubungan antara modal sosial Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dengan tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi. Kegunaan dari penelitian ini adalah : 1) Sebagai bahan masukan, pertimbangan dan informasi bagi pemerintah dan pemerintah daerah. 2) Menjadi bahan masukan bagi Gabungan HIPPA ”TIRTO AJI” dan petani agar lebih berpartisipasi aktif dalam pengelolaan air irigasi. 3) Sebagai sumbangan pemikiran dalam kajian ilmu sosial mengenai modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat pada fakultas Pertanian khususnya Sosial Ekonomi Pertanian. 4) Memperluas wawasan penulis tentang ilmu pengetahuan khususnya di bidang Irigasi.

Metode yang digunakan adalah metode survei. Jenis penelitian adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*). Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) pada Gabungan HIPPA “Tirto Aji” di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri Kabupaten Nganjuk. Metode penentuan petani

sampel dilakukan secara *Multistage Random Sampling*, sehingga diperoleh sampel sebanyak 41 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan : wawancara dengan kuisisioner, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan bantuan skoring untuk menjawab tujuan pertama dan kedua. Sedangkan untuk menjawab tujuan ketiga menggunakan analisis korelasi *Rank Spearman*.

Dari hasil penelitian diperoleh : 1) Kondisi Modal Sosial Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) "Tirto Aji" di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri Kabupaten Nganjuk tergolong tinggi dengan skor 66 atau 95,65% dari skor maksimal. Modal Sosial meliputi kepercayaan, ketaatan terhadap norma sosial dan jaringan kerjasama dengan skor masing-masing 20,23 atau 96,33% dari skor maksimal, 22,58 atau 94,07% dari skor maksimal dan 23,19 atau 96,62% dari skor maksimal. 2) Partisipasi Petani dalam pengelolaan air irigasi pada Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) "Tirto Aji" di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri Kabupaten Nganjuk tergolong tinggi dengan skor 60,02 atau 95,28% dari skor maksimal. Partisipasi petani meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi dengan skor masing-masing 19,71 atau 93,86% dari skor maksimal, 19,93 atau 94,90% dari skor maksimal, dan skor 20,39 atau 97,09% dari skor maksimal. 3) Hubungan Modal Sosial HIPPA dengan partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi secara keseluruhan tidak terdapat hubungan nyata antara modal sosial dengan partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kesadaran yang tinggi dan kemauan yang kuat yang dimiliki petani untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan air irigasi mereka mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap monitoring dan evaluasi. Selain itu petani juga sangat membutuhkan air irigasi untuk kebutuhan sawahnya karena biaya yang dikeluarkan relatif murah bila dibandingkan menggunakan pompa air.

Saran yang bisa disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 1) Modal Sosial dalam Gabungan HIPPA "Tirto Aji" yang tinggi harus tetap dipertahankan dengan cara Gabungan HIPPA "Tirto Aji" terus menerus memberikan pelayanan air irigasi yang baik kepada petani. 2) Partisipasi petani yang tinggi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan air irigasi harus tetap dipertahankan, dalam hal ini yaitu selalu melibatkan seluruh petani anggota Gabungan HIPPA "Tirto Aji" untuk tetap berpartisipasi secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai tahap monitoring dan evaluasi. 3) Diperlukan penelitian lebih lanjut yang berkenaan dengan partisipasi petani pemakai air dengan modal sosial yang berbeda, sehingga dapat dirumuskannya kinerja Gabungan HIPPA agar dapat lebih baik lagi dalam pengelolaan air irigasi.

## SUMMARY

**Donny Fajar Pratama (0410453002-45). The Relationship Between Social Capital of Water User Association (HIPPA) in the Water User Federation (GHIPPA) With Farmer Participation Level in the Irrigation Water Management (Case at Gabungan HIPPA “Tirto Aji” in the Ngudikan Kiri Irrigation Area, Nganjuk Regency). Supervisor: Dr. Ir Kliwon Hidayat, MS and Reza Safitri, S.Sos, MSi.**

---

People recognize water as a very important source to human, animal and plant. One, therefore, finds water appreciated as having economic potential and likely to be used in appropriate manner, or in term of effectiveness and efficiency.

Water User Federation (GHIPPA) represents a group made of Water User Association (HIPPA) aiming at empowering the irrigation network to serve the members (farmer). Each HIPPA has a responsibility to each serve area. The steering committee in HIPPA actively involves within the service delivery to the member, leading to the creation of capital social. The capital social of HIPPA can only formed in the favorable relationship between the leader, the committee and farmer. This favorable relationship seems affected by trust factor, collective value, and shared understanding.

Building up farmer participation needs public awareness to keep the existing irrigation network operated. Farmer participation may only be properly developed if supported by HIPPA in its operation and maintenance of irrigation network.

Research objective seems: (1) to understand the social capital condition in the Water User Association (HIPPA), (2) to describe farmer participation rate in the irrigation water management, and (3) to analyze the relationship between the social capital of Water User Association (HIPPA) and farmer participation rate in the irrigation water management. The benefits of research include: (1) being as input, consideration and information to the government and local government, (2) being as guidance for Water User Federation “Tirto Aji” and farmer to have active participation in the irrigation water management, (3) being as contribution to social review on public social capital by Faculty of Agriculture, or by student of Agriculture Socioeconomic, and (4) the enhanced the author’s insight about the knowledge, especially on irrigation.

Method of research relates to a survey. Research type may be classified into explanatory research. The location has been determined purposively to Water User Federation “Tirto Aji” at Ngudikan Kiri Irrigation Area, Nganjuk Regency. Multistage Random Sampling comes into consideration resulting in 41 samples. Data collection techniques involve interview with questionnaire, observation and documentation. Data analysis technique considers descriptive qualitative analysis with the scoring system to achieve the first and the second objective. The third objective can be reached by Spearman rank correlation analysis.



Results of research indicate: (1) the condition of social capital of Water User Association (HIPPA) in the Water User Federation (GHIPPA) “Tirto Aji” at Ngudikan Kiri Irrigation Area, Nganjuk Regency, seems highly classified with score 66 or 95.65% of maximum score. The social capital concerns with trust, the obedience to social norm and the cooperation network, with each score in sequence attained to 20.23 or 96.33% of maximum score, 22.58 or 94.07 % of maximum score, and 23.19 or 96.62% of maximum score; (2) farmer participation in the irrigation water management held by Water User Federation (GHIPPA) “Tirto Aji” at Ngudikan Kiri Irrigation Area, Nganjuk Regency, also subsumes into higher category with score 60.02 or 95.28 % of maximum score. Farmer participation covers planning, implementation, and monitoring and evaluation, with each score in sequence reached to 19.71 or 93.86 % of maximum score, 19.93 or 94.90 % of maximum score, and 20.39 or 97.09 % of maximum score; (3) the relationship between the social capital of HIPPA and farmer participation throughout irrigation water management fails to produce obvious relationship between social capital and farmer participation in the irrigation water management. This becomes evident due to higher awareness and strong willingness by farmer to have active participation in the irrigation water management starting from farmer planning, implementation stages through out monitoring and evaluation stages. In addition, farmer also needs irrigation water to the cultivated field because of relatively cheaper price in supply rather than water pump.

Research may suggest that: (1) the high social capital of Water User Federation “Tirto Aji” should be kept from reducing such that Water User Federation “Tirto Aji” can continually serve irrigation water favorably to farmer; (2) the high farmer participation in every activity related to irrigation water management must be empowered by involving whole member farmers of Water User Federation “Tirto Aji” to have active participation from planning, implementation throughout monitoring and evaluation stages; and (3) further research should be exist to examine the participation of water user farmers with different social capital such that the performance of Water User Federation may be formulated better in the irrigation water management.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul “Hubungan Antara Modal Sosial Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Dalam Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) Terhadap Tingkat Partisipasi Petani Dalam Pengelolaan Air Irigasi”, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Kliwon Hidayat, MS selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi.
2. Ibu Reza Safitri, S.Sos. MSi selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi.
3. Bapak Lasidi selaku ketua Gabungan HIPPA ”Tirto Aji” yang telah membantu dilapang dan memberikan pengarahan serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
4. Ayah, Ibu, Istri serta Buah Hatiku yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, Juli 2009

Penulis

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Nganjuk pada tanggal 23 April 1986, putra dari Bapak Sutopo dan Ibu Partimah, anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis memulai pendidikan di TK Pertiwi Nganjuk dan lulus pada tahun 1992, kemudian melanjutkan ke pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Pacekulon Nganjuk dan lulus pada tahun 1998, kemudian melanjutkan di SLTPN 3 Kediri tamat pada tahun 2001, kemudian melanjutkan di SMUN 2 Nganjuk dan lulus pada tahun 2004. Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian pada tahun 2004 melalui jalur Seleksi Program Minat dan Kemampuan (SPMK).



## DAFTAR ISI

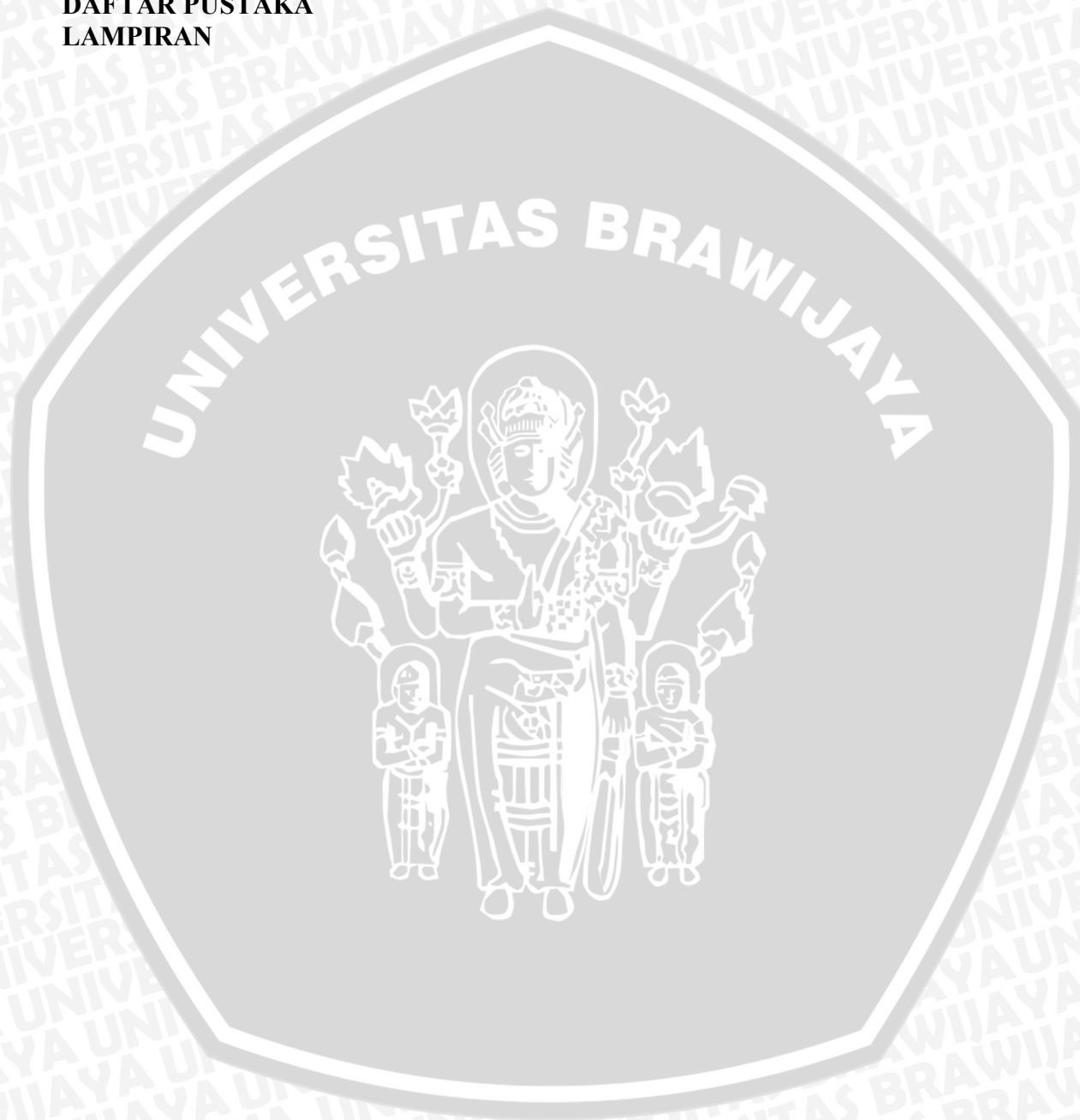
Halaman

<b>RINGKASAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan .....	7
1.4 Kegunaan .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Modal Sosial .....	9
2.1.1 Pengertian Modal Sosial .....	9
2.1.2 Unsur Pokok Modal Sosial .....	11
2.1.3 Tipe Modal Sosial .....	24
2.1.4 Parameter Modal Sosial .....	28
2.2 Tinjauan Partisipasi .....	31
2.2.1 Pengertian Partisipasi .....	31
2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi .....	33
2.2.3 Sifat dan Ciri Partisipasi .....	34
2.2.4 Syarat Pelaksanaan Partisipasi .....	35
2.2.5 Bentuk Partisipasi .....	35
2.2.6 Syarat Terbentuknya Partisipasi .....	37
2.2.7 Manfaat Partisipasi .....	38
2.2.8 Kendala Partisipasi .....	39
2.3 Telaah Penelitian Terdahulu .....	40
2.4 Tinjauan Tentang GHIPPA .....	46
2.4.1 Konsep GHIPPA .....	46
2.4.2 Pembentukan GHIPPA .....	48
2.4.3 Bidang Organisasi .....	50
2.4.4 Bidang Keuangan .....	51
2.4.5 Teknik Keirigasian .....	52
2.4.6 Bidang Koordinasi .....	53
2.4.7 Tugas Pengurus GHIPPA .....	54
2.4.8 Sanksi Terhadap Pelanggaran .....	56

<b>III. KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>57</b>
3.1 Kerangka Pemikiran .....	57
3.2 Hipotesis .....	63
3.3 Batasan Masalah .....	63
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	63
3.4.1 Definisi Operasional .....	63
3.4.2 Pengukuran Variabel .....	65
<b>IV. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>72</b>
4.1 Jenis Penelitian .....	72
4.2 Penentuan Lokasi Penelitian .....	72
4.3 Teknik Sampling .....	73
4.4 Teknik Pengumpulan Data .....	76
4.5 Teknik Analisis Data .....	77
<b>V. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN .....</b>	<b>82</b>
5.1 Keadaan Wilayah .....	82
5.2 Keadaan Penduduk .....	82
5.2.1 Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	82
5.2.2 Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur .....	83
5.2.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	84
5.2.4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian .....	85
5.3 Keadaan Pertanian .....	86
5.3.1 Luas Lahan .....	86
5.3.2 Luas Tanam dan Produksinya .....	87
5.3.3 Pola Tanam .....	88
5.3.4 Debit Air .....	89
5.3.5 Curah Hujan .....	90
5.3.6 Kondisi Jaringan Irigasi .....	91
<b>VI. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>93</b>
6.1 Deskripsi Modal Sosial HIPPA .....	93
6.1.1 Kepercayaan .....	93
6.1.2 Norma Sosial .....	95
6.1.3 Jaringan Kerjasama .....	98
6.2 Deskripsi Partisipasi Petani .....	102
6.2.1 Tahap Perencanaan .....	103
6.2.2 Tahap Pelaksanaan .....	106
6.2.3 Tahap Monitoring dan Evaluasi .....	109
6.3 Hubungan Antara Modal Sosial dengan Partisipasi .....	113
6.3.1 Hubungan Antara Kepercayaan Dengan Partisipasi .....	114
6.3.2 Hubungan Antara Norma Sosial Dengan Partisipasi .....	115
6.3.3 Hubungan Antara Jaringan Kerjasama Dengan Partisipasi .....	116
6.3.4 Hubungan Antara Modal Sosial Dengan Partisipasi .....	117

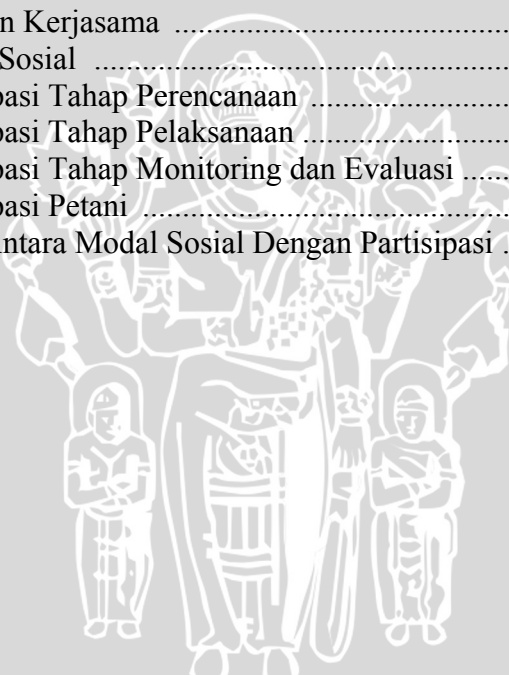
<b>VII. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>119</b>
7.1 Kesimpulan .....	119
7.2 Saran .....	121

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



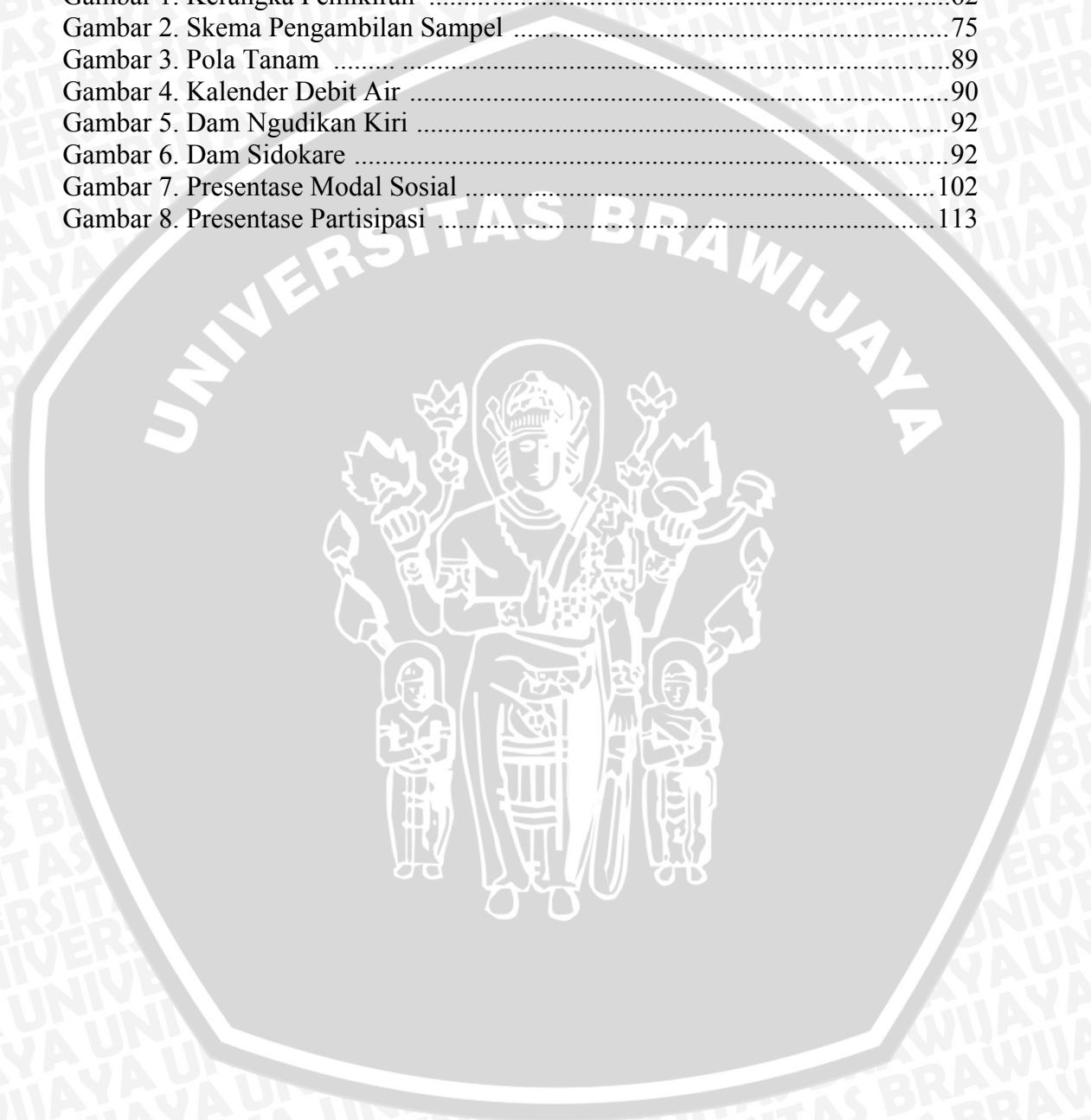
## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pengukuran Modal Sosial .....	65
Tabel 2. Pengukuran Partisipasi .....	68
Tabel 3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	82
Tabel 4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur .....	83
Tabel 5. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	84
Tabel 6. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	85
Tabel 7. Luas Lahan .....	86
Tabel 8. Luas Tanam dan Produksinya .....	88
Tabel 9. Data Curah Hujan .....	91
Tabel 10. Skor Kepercayaan .....	94
Tabel 11. Skor Norma Sosial .....	97
Tabel 12. Skor Jaringan Kerjasama .....	99
Tabel 13. Skor Modal Sosial .....	100
Tabel 14. Skor Partisipasi Tahap Perencanaan .....	105
Tabel 15. Skor Partisipasi Tahap Pelaksanaan .....	107
Tabel 16. Skor Partisipasi Tahap Monitoring dan Evaluasi .....	110
Tabel 17. Skor Partisipasi Petani .....	112
Tabel 18. Hubungan Antara Modal Sosial Dengan Partisipasi .....	114



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran .....	62
Gambar 2. Skema Pengambilan Sampel .....	75
Gambar 3. Pola Tanam .....	89
Gambar 4. Kalender Debit Air .....	90
Gambar 5. Dam Ngudikan Kiri .....	92
Gambar 6. Dam Sidokare .....	92
Gambar 7. Presentase Modal Sosial .....	102
Gambar 8. Presentase Partisipasi .....	113





## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Data Luas Lahan Dan Jumlah Anggota GHIPPA .....	126
Lampiran 2. Tabel Penentuan Jumlah Sampel .....	127
Lampiran 3. Daftar Responden .....	128
Lampiran 4. Perhitungan Kriteria Modal Sosial .....	129
Lampiran 5. Perhitungan Kriteria Partisipasi .....	131
Lampiran 6. Total Skor Modal Sosial Dan Partisipasi .....	133
Lampiran 7. Skor Modal Sosial .....	134
Lampiran 8. Skor Kepercayaan .....	135
Lampiran 9. Skor Norma Sosial .....	136
Lampiran 10. Skor Jaringan Kerjasama .....	137
Lampiran 11. Skor Partisipasi .....	138
Lampiran 12. Skor Tahap Perencanaan .....	139
Lampiran 13. Skor Tahap Pelaksanaan .....	140
Lampiran 14. Skor Tahap Monitoring Dan Evaluasi .....	141
Lampiran 15. Hubungan Kepercayaan Dengan Partisipasi .....	142
Lampiran 16. Hubungan Norma Sosial Dengan Partisipasi .....	144
Lampiran 17. Hubungan Jaringan Kerjasama Dengan Partisipasi.....	146
Lampiran 18. Hubungan Modal Sosial Dengan Partisipasi.....	148
Lampiran 19. Kuisisioner .....	150
Lampiran 20. Peta Gabungan HIPPA “Tirto Aji” .....	158
Lampiran 21. Dokumentasi .....	159



## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa air merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan baik bagi manusia, hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu sudah selayaknya bila air dihargai sebagai potensi ekonomi dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam arti harus dipergunakan secara efektif dan efisien.

Irigasi merupakan salah satu sub sektor dari sektor pertanian yang sejak Pelita I secara intensif dikembangkan seiring dengan program pemerintah untuk mencapai swasembada pangan terutama beras. Dengan mengacu pada arah pembangunan pertanian dalam PJP II, maka pembangunan irigasi harus diselaraskan dengan pembangunan agrobisnis dan agroindustri. Pemerintah memegang peranan yang sangat besar dalam pembangunan jaringan irigasi baik skala besar, sedang maupun kecil. Sampai akhir Pelita IV investasi itu sudah mencapai kurang lebih 12 milyar dollar. Investasi yang besar ini berhasil memperluas sawah yang beririgasi, sampai pada tahun ketiga Pelita IV terdapat 4656 juta hektar sawah yang beririgasi. Pemerintah juga telah merehabilitasi irigasi seluas 1876 juta hektar, membangun irigasi baru seluas 1092 juta hektar dan mengembangkan jaringan tersier seluas 1688 juta hektar, sehingga tahun 1984 Indonesia telah mencapai swasembada beras (Ambler, 1992).

Operasi jaringan irigasi merupakan pengaturan tentang pendayagunaan air melalui pengambilan dari sumbernya, distribusi atau pembagian air serta

pembuangan kelebihan air. Operasi jaringan irigasi meliputi: pengusulan rencana tata tanam petani, pemantauan dan pelaksanaan pengaturan air irigasi (buka-tutup pintu air) serta pengawasan kepatuhan dalam rencana tata tanam dan pembagian air. Faktor-faktor yang mempengaruhi rencana tata tanam yaitu disebabkan oleh ketersediaan air dan kebutuhan air yang berbeda pada setiap tanaman.

Pemeliharaan jaringan irigasi merupakan usaha yang terus menerus untuk menjamin kelestarian jaringan, baik fungsi maupun fisik jaringan, sehingga operasi atas jaringan irigasi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan efisien. Pemeliharaan jaringan irigasi dikelompokkan menjadi 2, yaitu pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. Pemeliharaan rutin adalah pemeliharaan yang perlu dilakukan terus menerus sepanjang selama suatu sistem jaringan irigasi tersebut beroperasi. Pemeliharaan rutin meliputi pemeliharaan tanggul saluran, pembuangan lumpur dan tetumbuhan yang mengganggu serta perbaikan bangunan. Sedangkan pemeliharaan berkala yaitu pemeliharaan yang dapat dilaksanakan atau harus dilaksanakan secara berkala. Pemeliharaan berkala meliputi pekerjaan pemeliharaan bangunan tanggul dan dam (pintu dan balok sekat).

Secara etimologis *Social Capital* mempunyai pengertian modal yang dimiliki oleh masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. Modal ini merupakan perpaduan antara sesuatu yang bersifat material dan non material. Material mempunyai makna tentang kepemilikan berkaitan dengan aset-aset finansial yang dimiliki, sedangkan non material, modal berwujud adanya *mutual trust* (kepercayaan) dan *gathering system* (sistem kebersamaan) dalam suatu

masyarakat . Bank Dunia mendefinisikan Modal Sosial sebagai sesuatu yang merujuk ke dimensi institusional, hubungan- hubungan yang tercipta, dan norma norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat.

Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) adalah gabungan dari beberapa Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang mempunyai tujuan mendayakan potensi mengelola jaringan irigasi agar dalam pelayanannya kepada anggota (petani) secara tepat guna dan berhasil guna. Masing-masing HIPPA bertanggung jawab atas masing-masing daerah pelayanannya, pengurus HIPPA lebih dilibatkan dalam pelayanan kepada petani anggota HIPPA dan nantinya dapat mengembangkan modal sosial yang ada didalamnya. Modal sosial HIPPA dapat terwujud dengan baik apabila didalamnya terdapat hubungan yang baik antara ketua, pengurus dan petani. Hubungan yang baik tersebut dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, norma sosial dan jaringan kerjasama.

Modal sosial HIPPA dalam pengelolaan irigasi yang baik diyakini dapat meningkatkan partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hasbullah (2006) yang menyebutkan bahwa rasa saling mempercayai yang merupakan unsur modal sosial akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai ragam bentuk dan dimensi terutama dalam membangun kemajuan bersama. Suwandi (2005) juga menyatakan bahwa modal sosial yang didasarkan pada tingkat kepercayaan dan hubungan secara emosional pada sebuah group dan organisasi-organisasi dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dan tingkat kesejahteraan pada group dan organisasi itu. Dengan

adanya modal sosial tersebut, gerak masyarakat petani dalam mengemukakan pendapat dan ide-idenya guna merancang kehidupannya sebagai wujud keswadayaan masyarakat petani semakin terbuka lebar serta memberikan peluang kepada masyarakat petani untuk turut mengambil keputusan di dalam semua tahapan pembangunan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka.

Salah satu kunci keberhasilan membangun modal sosial terletak pada kemampuan sekelompok orang dalam suatu perkumpulan untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial. Modal sosial akan kuat tergantung pada kapasitas yang ada dalam kelompok masyarakat tersebut.

Tradisi gotong royong secara nyata telah melembaga dan mengakar kuat, ini diwujudkan dalam berbagai aktivitas keseharian masyarakat Indonesia. Kegiatan gotong royong terekspesikan dalam berbagai aktivitas mulai dari yang bersifat (1) sosial, (2) sosial dan personal serta (3) personal yang diwujudkan dalam bentuk pertukaran (*exchange*). Ditinjau dari bentuk yang dikerjasamakan, gotong royong bisa mencakup material, tenaga, uang dan social spirit. Secara umum aktivitas gotong royong memiliki tema sentral sebagai *mutual help* antar anggota masyarakat yang mana masing-masing pihak terlibat saling memberikan kontribusi dan sebagai reward-nya mereka mendapatkan gain dari aktivitas yang dikerjasamakan.

Subejo dan Iwamoto memberikan terminologi pada praktek gotong royong yang dilembagakan sebagai tradisi oleh warga pedesaan sebagai “*institutionalized stabilizers*” karena aktivitas tersebut memungkinkan proses keberlanjutan (*sustainability*) dan menjamin stabilitas secara ekonomi dan sosial pada

kehidupan rumah tangga di pedesaan. Sullivan menterjemahkan gotong royong sebagai alat *“to carry a load cooperatively--to share the burden”*. Beberapa elemen dasar dalam masyarakat yang teridentifikasi yang menyebabkan mereka tetap mempertahankan dan mempraktekkan tradisi gotong royong .

Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi cenderung bekerja secara gotong-royong, merasa aman untuk berbicara dan mampu mengatasi perbedaan-perbedaan. Sebaliknya, pada masyarakat yang memiliki modal sosial rendah akan tampak adanya kecurigaan satu sama lain, merebaknya ‘kelompok kita’ dan ‘kelompok mereka’, tiadanya kepastian hukum dan keteraturan sosial, serta seringnya muncul ‘kambing hitam’.

Masyarakat selalu berhubungan sosial dengan masyarakat yang lain melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas prinsip kebersamaan. Kemampuan anggota dalam kelompok atau masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergetis akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat tidaknya modal sosial suatu kelompok.

Jadi untuk membangun modal sosial yang kuat diperlukan partisipasi dan dorongan dari anggotanya untuk berperan aktif dalam menjalankan tujuan bersama. Peran serta masyarakat petani dalam pengelolaan irigasi perlu digalakkan dan dihidupkan kembali. Upaya untuk mendorong peran serta petani diperlukan kesadaran dari petani untuk bisa ikut menjaga dan memelihara jaringan irigasi yang sudah ada. Selain itu partisipasi petani akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh pelayanan yang baik dari HIPPA dalam menjalankan

operasi dan pemeliharaan (OP) jaringan irigasi, sehingga modal sosial dalam HIPPA akan mempengaruhi partisipasi petani.

Partisipasi petani dapat diketahui berdasarkan perilaku nyata atau tindakan mereka dalam melakukan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Perubahan partisipasi dari rendah menjadi tinggi mempunyai arti sebagai upaya pengambilan keputusan untuk menerima suatu inovasi atau suatu hal yang baru yang dapat merubah perilaku. Partisipasi petani dalam suatu kegiatan juga merupakan faktor keberhasilan suatu program.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Modal sosial merupakan bentuk sumber daya yang pelakunya berhubungan satu sama lain dan membentuk kelompok sosial. Jadi modal sosial merupakan usaha pengakumulasian tingkah laku masing-masing individu dalam satu bentuk tertentu berupa norma atau suatu kelembagaan. Modal sosial HIPPA terbentuk dari beberapa orang yang membentuk kelompok sosial dan mempunyai tujuan yang sama untuk memberikan pelayanan irigasi kepada petani untuk memenuhi kebutuhan air irigasi bagi sawahnya.

Modal sosial HIPPA merupakan hubungan yang aktif antar anggota. Setiap pola hubungan yang terjadi diikat oleh kepercayaan, norma sosial, dan jaringan kerjasama yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Tinggi dan rendahnya partisipasi dari petani diukur dari keikutsertaan mereka dalam setiap tahapan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi modal sosial (kepercayaan, norma sosial dan jaringan kerjasama) Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)?
2. Bagaimana tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi?
3. Bagaimana hubungan Modal Sosial (kepercayaan, norma sosial dan jaringan kerjasama) Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dengan tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

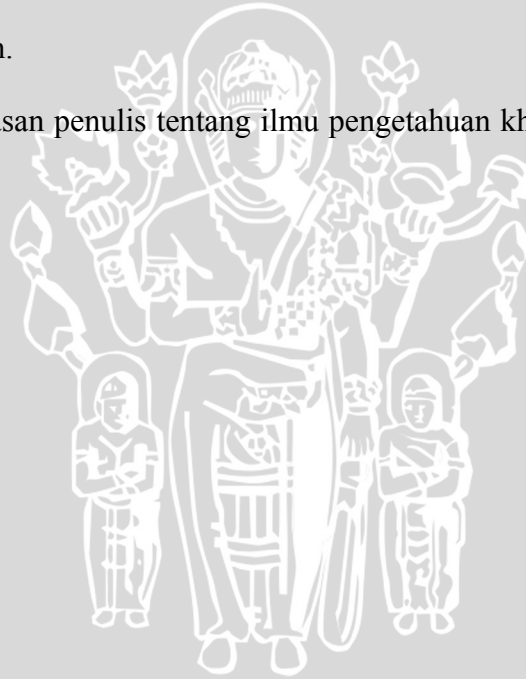
1. Untuk mengetahui kondisi modal sosial (kepercayaan, norma sosial dan jaringan kerjasama) Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)?
2. Untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi?
3. Menganalisis hubungan Modal Sosial (kepercayaan, norma sosial dan jaringan kerjasama) Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dengan tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi?



#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Sebagai bahan masukan, pertimbangan dan informasi bagi pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Menjadi bahan masukan bagi Gabungan HIPPA "TIRTO AJI" dan petani agar lebih berpartisipasi aktif dalam pengelolaan air irigasi.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam kajian ilmu sosial mengenai modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat pada fakultas Pertanian khususnya Sosial Ekonomi Pertanian.
4. Memperluas wawasan penulis tentang ilmu pengetahuan khususnya di bidang Irigasi.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Modal Sosial

#### 2.1.1 Pengertian Modal Sosial

Modal sosial didefinisikan sebagai bentuk sumber daya yang pelakunya berhubungan satu sama lain dan membentuk kelompok sosial. Jadi modal sosial merupakan usaha pengakumulasian tingkah laku masing-masing individu dalam satu bentuk tertentu berupa norma atau suatu kelembagaan (Hasbullah, 2006).

Pengertian modal sosial dalam kajian ilmu-ilmu sosial kontemporer, terkait dengan perilaku kooperatif yang terorganisasikan secara horizontal, meski sering kali tidak formal, yang bisa mendorong pada adanya keteraturan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di samping itu, dalam modal sosial ini terkandung pula hubungan saling mempercayai diantara warga masyarakat dan antara masyarakat dengan negara, bukan hubungan-hubungan dominasi dan otoritarianisme.

Jaringan sosial dan sumber daya yang menjadi elemen penting modal sosial dapat berfungsi optimal dan bermanfaat maksimal bagi warga masyarakat bila mereka memiliki suatu nilai inti yang disebut *civic engagement*. *Civic engagement* adalah pertemuan antar warga yang dilandasi oleh pertautan emosional mendalam, hubungan yang hangat, perasaan dekat secara psikologis, dan ikatan solidaritas yang terbangun atas dasar empati dan persaudaraan universal. *Civic engagement* tidak akan ditemukan dalam suatu hubungan individual atau relasi sosial biasa seperti yang berlangsung di pasar, terminal,

stasiun, mal, atau gedung bioskop. Sebab, relasi sosial yang terjalin di tempat-tempat tersebut bersifat fungsional, sesaat, dan hampir tidak melibatkan sentuhan emosional, sehingga pola interaksi sosial yang terbangun tidak merefleksikan adanya nilai *civic engagement*.

Pada saat ini banyak dijumpai bukti empiris bahwa modal sosial memberikan kontribusi yang signifikan pada perkembangan jangka panjang suatu perusahaan, dalam menumbuhkan suatu peluang, dibutuhkan suatu ketersediaan modal jangka panjang. Komposisi yang selama ini digunakan antara modal alam, modal fisik dan modal manusia perlu dikembangkan dengan menambahkan modal sosial. Modal sosial mengacu pada nilai-nilai individu yang bersifat sosial, hubungannya dengan budaya dalam masyarakat, norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu interaksi antar individu-individu dan institusi dimanapun mereka berada. Modal sosial dimana hubungan antar masyarakat akan runtuh, dan saat ini banyak sekali contoh mengenai krisis tersebut.

Bourdieu (dalam Jousairi Hasbullah, 2006) menjelaskan bahwa “*Social capital is the aggregate of the actual or potential resources which are linked are possession or a durable network of more or less institutionalized relationship of mutual acquaintance or recognition*”. (Modal sosial adalah sekumpulan sumber yang nyata atau potensial yang berkaitan dengan kepemilikan jaringan yang bertahan lama atau hubungan yang saling menguntungkan).

Keuntungan yang diperoleh dari keanggotaan dalam kelompok sosial yaitu terbentuknya solidaritas antar anggota. Salah satu komponen modal sosial adalah jaringan sosial dari individu, kelompok dan organisasi. Komponen-komponen

tersebut bermanfaat dalam memobilisasi rentangan kontak sosial antar pribadi yang sangat luas agar kehidupan sosial ekonomi dan politik berfungsi secara efektif serta membantu agar pola kerjasama dapat berjalan lancar dan saling menguntungkan.

### **2.1.2 Unsur Pokok Modal Sosial**

Inti telaah modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu kelompok untuk berkerjasama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola timbal balik yang saling menguntungkan, dan dibangun di atas kepercayaan yang di topang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Kekuatan tersebut akan maksimal jika di dukung oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan di atas prinsip – prinsip yang telah disebutkan.

#### **1. Partisipasi dalam suatu jaringan**

Modal sosial tidak dibangun hanya oleh suatu individu, melainkan akan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai -nilai yang melekat. Modal sosial akan kuat tergantung pada kapasitas yang ada dalam kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi berikut membangun jaringannya. Salah satu kunci keberhasilan membangun modal sosial terletak pula pada kemampuan sekelompok orang dalam suatu asosiasi atau perkumpulan dalam melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial.

Masyarakat selalu berhubungan sosial dengan masyarakat yang lain melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas prinsip kesukarelaan (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*) dan keadaban (*civility*). Kemampuan anggota-anggota kelompok atau masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergetis akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat tidaknya modal sosial suatu kelompok.

Jaringan hubungan sosial biasanya akan diwarnai oleh suatu tipologi khas sejalan dengan karakteristik dan orientasi kelompok pada kelompok sosial biasanya terbentuk secara tradisional atas dasar kesamaan garis keturunan (*lineage*), pengalaman-pengalaman sosial turun-temurun (*repeated social experiences*) dan kesamaan kepercayaan pada dimensi ketuhanan (*religious beliefs*) cenderung memiliki kohesivitas tinggi, tetapi rentang jaringan maupun *trust* yang terbangun sangat sempit. Sebaiknya, pada kelompok yang dibangun atas dasar kesamaan orientasi dan tujuan dengan ciri pengelolaan organisasi yang lebih modern, akan memiliki tingkat partisipasi anggota yang lebih baik dan memiliki rentang jaringan yang lebih luas. Pada tipologi kelompok yang disebut terakhir akan lebih banyak menghadirkan dampak positif bagi kemajuan kelompok maupun kontribusinya pada pembangunan masyarakat secara luas.

## 2. Resiprocity

Modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran ini bukan sesuatu yang dilakukan secara resiprokal seketika

seperti dalam proses jual beli, melainkan suatu kombinasi jangka pendek dan jangka panjang dalam nuansa *altruism* (semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain). Seseorang atau banyak orang dari suatu kelompok memiliki semangat membantu yang lain tanpa mengharapkan imbalan seketika. Dalam konsep islam, semangat semacam ini disebut sebagai keikhlasan. Semangat untuk membantu bagi keuntungan orang lain. Imbalannya tidak diharapkan seketika dan tanpa batas waktu tertentu. Pada masyarakat, dan pada kelompok-kelompok sosial yang terbentuk, yang di dalamnya memiliki bobot resiprositas kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi. Ini akan juga terefleksikan dengan tingkat kepedulian sosial yang tinggi, saling membantu dan saling memperhatikan. Pada masyarakat yang demikian, kemiskinan akan lebih memungkinkan, dan kemungkinan lebih mudah, diatasi. Begitu juga berbagai problema sosial lainnya akan dapat diminimalkan. Keuntungan lain, masyarakat tersebut akan mudah membangun diri, kelompok dan lingkungan sosial dan fisik mereka secara mengagumkan.

Walaupun demikian, pada suatu kelompok masyarakat yang memiliki tingkat resiprositas yang kuat belum tentu dapat memiliki dampak positif yang cukup besar bagi kelompok lainnya. Ini akan tergantung pada sifat – sifat dan orientasi nilai yang berkembang di masyarakat tersebut untuk tipologi masyarakat yang relatif tertutup, resiprositas yang kuat akan bernilai positif untuk lingkungan setempat, tetapi belum tentu menghasilkan nilai positif bagi kelompok yang lain. Sebaliknya pada suatu kelompok yang memiliki resiprositas kuat dan juga

mempunyai ciri sebagai masyarakat yang terbuka, kemungkinan dampak positif yang lebih luas akan dapat direalisasikan.

### 3. Trust

*Trust* atau saling percaya (mempercayai) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan malakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan merugikan diri dan kelompoknya.

Menurut Fukuyama (1999) *trust* adalah sikap saling mempercayai dimasyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial.

Berbagai tindakan kolektif yang didasari rasa saling mempercayai yang tinggi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai ragam bentuk dan dimensi terutama dalam konteks membangun kemajuan bersama. Kehancuran rasa saling percaya dalam masyarakat akan mengundang hadirnya berbagai problematik sosial yang serius. Masyarakat yang kurang memiliki perasaan saling mempercayai akan sulit menghindari berbagai situasi kerawanan sosial dan ekonomi yang mengancam. Semangat kolektifitas tenggelam dan partisipasi masyarakat untuk membangun bagi kepentingan kehidupan yang lebih baik akan hilang lambat laun akan mendatangkan biaya tinggi bagi pembangunan karena masyarakat cenderung bersikap apatis dan hanya menunggu apa yang akan diberikan oleh pemerintah. Jika rasa saling mempercayai telah luntur maka yang akan terjadi adalah sikap-sikap yang menyimpang dari nilai dan norma yang

berlaku. Kriminalitas akan meningkat, tindakan -tindakan yang anarkis dapat mencuat, kekerasan dan kerusuhan massa akan cepat tersulut dan masyarakat cenderung pasif, sendiri-sendiri dan akhirnya muncul perasaan keterisolasian diri. Pada situasi yang disebut terakhir ini, masyarakat akan gampang terserang berbagai penyakit kejiwaan seperti kecemasan, putus asa dan kemungkinan melahirkan tindakan – tindakan yang fatal bagi dirinya, masyarakat atau negara.

Menurut Francois (2003) dalam buku Jousairi Hasbullah (2006), memandang *trust* sebagai komponen ekonomi yang relevan melekat pada kultur yang ada pada masyarakat yang akan membentuk kekayaan modal sosial. Sedangkan Francis Fukuyama (1999) menyakini bahwa dimensi *trust* merupakan warna dari sistem kesejahteraan bangsa. Kemampuan berkompetisi akan tercipta dan dikondisikan oleh suatu karakteristik yang tumbuh dalam suatu masyarakat yaitu *trust*.

Menurut beberapa pendapat para sosiolog membagi tiga tingkatan *trust* yaitu pada tingkatan individual, tingkatan relasi sosial dan pada tingkatan sistem sosial. Pada tingkatan individual *trust* merupakan kekayaan individu, merupakan variabel personal dan sekaligus sebagai karakteristik individu. Pada tingkatan hubungan sosial *trust* merupakan atribut kolektif untuk mencapai tujuan kelompok. Suatu mekanisme sosial yang menyatu dalam relasi sosial. Sedangkan pada tingkatan sistem sosial *trust* merupakan nilai publik yang berkembangnya di fasilitasi oleh sistem sosial yang ada.

Banyak peneliti merujuk kejarangan sebagai sumber penting tumbuh dan hilangnya *trust* dimaksud, menyatakan bahwa pada tingkat individual, sumber



*trust* berasal dari adanya nilai – nilai yang bersumber dari kepercayaan agama yang di anut, kompetensi seseorang dan keterbukaan yang telah menjadi norma di masyarakat. Pada tingkatan komunitas, sumber *trust* berasal dari norma sosial yang memang telah melekat pada struktur sosial setempat.

*Trust* akan kehilangan daya optimalnya ketika mengabaikan salah satu spektrum penting yang akan di dalamnya, yaitu rentang rasa mempercayai (*the radius of trust*). Pada kelompok, asosiasi atau bentuk-bentuk group lainnya yang berorientasi *inward looking* cenderung memiliki *the radius of trust* sempit. Kelompok ini kemungkinan akan memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk mengembangkan modal sosial yang kuat dan menguntungkan.

#### 4. Norma Sosial

Norma-norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Pengertian norma itu sendiri adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dapat dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma-norma ini biasanya mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku dimasyarakatnya. Aturan-aturan kolektif tersebut biasanya tidak tertulis, akan tetapi dapat dipahami oleh setiap anggota masyarakatnya dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial.

Aturan-aturan kolektif ini misalnya, bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua, menghormati pendapat orang lain, norma untuk hidup sehat, norma untuk tidak mencurigai orang lain, norma untuk selalu bersama-sama dengan

sejenisnya, merupakan contoh norma sosial. Jika dalam suatu komunitas, asosiasi, kelompok atau group, norma tersebut tumbuh, dipertahankan dan kuat akan memperkuat masyarakat itu sendiri.

#### 5. Nilai-nilai bersama

Nilai adalah sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Misalnya, nilai harmoni, pretasi, kerja keras, kompetisi dan lainnya merupakan contoh-contoh nilai yang sangat umum dikenal dalam kehidupan masyarakat. Nilai senantiasa memiliki kandungan konsekuensi yang ambivalen. Nilai harmoni misalnya, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai pemicu keindahan dan kerukunan hubungan sosial yang tercipta, tetapi di sisi lain dipercaya pula untuk senantiasa menghasilkan suatu kenyataan yang menghalangi kompetisi dan produktifitas.

Pada kelompok masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai harmoni biasanya sering ditandai oleh suatu suasana yang merukun, indah, namun, terutama kaitannya dengan diskusi pemecahan masalah misalnya, tidak produktif. Modal sosial yang kuat juga sangat ditentukan oleh konfigurasi nilai yang tercipta pada suatu kelompok masyarakat. Jika suatu kelompok memberi bobot tinggi pada nilai-nilai kompetisi, pencapaian, keterusterangan dan kejujuran maka kelompok tersebut cenderung lebih cepat berkembang dan maju dibandingkan pada kelompok masyarakat yang senantiasa menghindari keterusterangan, kompetisi dan pencapaian.

Nilai senantiasa berperan penting dalam kehidupan manusia. Pada setiap kebudayaan, biasanya terdapat nilai-nilai tertentu yang mendominasi ide yang

berkembang. Dominasi ide tertentu dalam masyarakat akan membentuk dan mempengaruhi antara aturan bertindak masyarakatnya (*the rules of conducts*) dan aturan-aturan bertingkah laku (*the rules of behavior*) yang secara bersama-sama, menurut istilah para sosiolog, membentuk pola-pola kultural (*cultural pattern*).

#### 6. Tindakan yang Proaktif

Salah satu unsur penting Modal Sosial adalah keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan masyarakat. Ide dasar dari *premise* ini, bahwa seseorang atau kelompok senantiasa kreatif dan aktif. Mereka melibatkan diri dan mencari kesempatan-kesempatan yang dapat memperkaya, tidak saja dari sisi material tapi juga kekayaan hubungan-hubungan sosial, dan menguntungkan kelompok, tanpa merugikan orang lain, secara bersama-sama. Mereka cenderung tidak menyukai bantuan-bantuan yang sifatnya dilayani, melainkan lebih memberi pilihan untuk lebih banyak melayani secara proaktif.

Perilaku proaktif memiliki kandungan modal sosial dapat dilihat melalui tindakan-tindakan dari yang paling sederhana sampai yang berdimensi dalam dan luas. Suatu masyarakat yang terbiasa proaktif untuk memungut sampah yang berserakan diruang-ruang publik, membersihkan lingkungan tempat tinggal, melakukan inisiatif untuk menjaga keamanan bersama, merupakan bentuk tindakan yang didalamnya terkandung semangat keaktifan dan kepedulian. Begitu pula dengan inisiatif untuk mengunjungi pengetahuan dan beragam bentuk inisiatif individu yang kemudian menjadi inisiatif kelompok, merupakan wujud proaktifiti yang bernuansa Modal Sosial.

Jadi pada intinya dapat disimpulkan bahwa Modal Sosial merupakan bentuk dari sumber daya yang pelakunya berhubungan langsung antara satu dengan yang lain dan membentuk suatu kelompok sosial. Modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok dan antar kelompok dengan ruang perhatian pada kepercayaan, norma sosial serta jaringan kerjasama antar sesama anggota kelompok. Yang kesemuanya itu dapat berfungsi sebagai perekat bagi setiap individu, sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan, untuk mencapai tujuan bersama.

Francis Fukuyama mengilustrasikan modal sosial dalam *trust, believe and vertrauen* artinya bahwa pentingnya kepercayaan yang mengakar dalam faktor kultural seperti etika dan moral. *Trust* muncul maka komunitas membagikan sekumpulan nilai-nilai moral, sebagai jalan untuk menciptakan pengharapan umum dan kejujuran. Modal sosial merupakan cerminan sejauh mana masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang bersifat unik mampu mengembangkan hubungan-hubungan, interaksi dan transaksi sosial sehingga terwujud struktur sosial. Aspek kebersamaan dalam masyarakat guna memenuhi berbagai kebutuhan merupakan salah satu indikator lemah dan kuatnya modal sosial.

Komponen penting lain dalam modal sosial adalah adanya faktor keterpercayaan dengan semboyan "tidak ada dusta di antara kita", saling menghargai, mengakui, dan menghormati hak-hak antar anggota masyarakat. Dengan adanya semangat dan dorongan masing-masing anggota masyarakat untuk saling jujur, saling menghargai dan memberikan pengakuan tersebut, maka unsut

saling mempercayai dapat menghindari terjadinya kejahatan dalam sistem sosial masyarakat .

Kepercayaan (*trust*) adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Kepercayaan sosial merupakan penerapan terhadap pemahaman ini. Masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi, aturan-aturan sosial cenderung bersifat positif; hubungan-hubungan juga bersifat kerjasama. Kepercayaan sosial pada dasarnya merupakan produk dari modal sosial yang baik. Adanya modal sosial yang baik ditandai oleh adanya lembaga-lembaga sosial yang kokoh; modal sosial melahirkan kehidupan sosial yang harmonis. Kerusakan modal sosial akan menimbulkan anomie dan perilaku anti sosial.

Sebagai orang yang banyak mengkaji tentang modal sosial, Robert D. Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai *mutual trust* antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Trust ini dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain (1) seberapa tinggi tingkat partisipasi masyarakat terhadap keberanian untuk berpendapat dengan pemimpinnya; dan (2) seberapa banyak warganegara yang menggunakan kesempatan tersebut untuk menyalurkan aspirasinya . *Trust* atau rasa percaya (mempercayai) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak, yang lain tidak akan bertindak merugikan diri

dan kelompoknya *Trust* adalah sikap saling mempercayai di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan Modal Sosial.

Kepercayaan merupakan dasar modal sosial dalam mengembangkan jaringan kerjasama dalam kelompok maupun luar kelompok. Kepercayaan dalam masyarakat sebagai sumber modal sosial juga bisa dilihat dari kepercayaan anggota petani terhadap pemimpinnya, kemauan bekerjasama dalam kelompok, serta jaringan kerjasama. Kepemimpinan dalam hal ini dapat dilihat dari tipe kepemimpinan yang dibawa oleh pemimpin organisasi serta keterkaitannya dengan bagaimana cara pemimpin menggalang solidaritas kepada anggotanya, memutuskan kepentingan bersama, serta penegakan demokrasi.

Norma yang terbentuk dan berulangnya pola pergaulan keseharian akan menciptakan aturan aturan tersendiri dalam suatu masyarakat. Aturan yang terbentuk tersebut kemudian akan menjadi dasar yang kuat dalam setiap proses transaksi sosial, dan akan sangat membantu menjadikan berbagai urusan sosial lebih efisien. Ketika norma ini kemudian menjadi norma asosiasi atau norma kelompok, akan sangat banyak manfaatnya dan menguntungkan kehidupan institusi sosial tersebut. Kekuatan-kekuatan sosial dalam melakukan interaksi antar kelompok akan terbentuk. Pada akhirnya mempermudah upaya mencapai kemajuan bersama.

Norma-norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma-norma dapat bersumber dari agama, panduan moral, maupun

standar-standar sekuler seperti halnya kode etik profesional. Norma-norma dibangun dan berkembang berdasarkan sejarah kerjasama di masa lalu dan diterapkan untuk mendukung iklim kerjasama. Norma-norma dapat merupakan pra-kondisi maupun produk dari kepercayaan sosial .

Infrastruktur dinamis dari modal sosial berwujud jaringan-jaringan kerjasama antar manusia. Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh. Orang mengetahui dan bertemu dengan orang lain. Mereka kemudian membangun inter-relasi yang kental, baik bersifat formal maupun informal.

Putnam (1993) berargumen bahwa jaringan-jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerjasama para anggotanya serta manfaat-manfaat dari partisipasinya itu . Jika jaringan dilihat sebagai bukan salah satu organisasi formal, melainkan sebagai modal sosial, dengan demikian dapat dipahami dengan lebih baik fungsi yang sebenarnya dari jaringan. Jaringan ialah hubungan saling percaya berdasarkan moral. Jaringan juga merupakan sekelompok orang yang memiliki norma-norma atau nilai-nilai informal . Norma Sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Pengertian norma itu sendiri adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma-norma ini biasanya terinstitusionalisasi dan mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dan kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya. Aturan-aturan kolektif tersebut

biasanya tidak tertulis tapi dipahami oleh setiap anggota masyarakatnya dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial.

Partisipasi dalam suatu jaringan salah satu kunci keberhasilan membangun Modal Sosial terletak pula pada kemampuan sekelompok orang dalam suatu asosiasi atau perkumpulan dalam melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial. Masyarakat selalu berhubungan sosial dengan masyarakat yang lain melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas prinsip kesukarelaan (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*) dan keadaban (*civility*). Kemampuan anggota kelompok/masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergetis akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat tidaknya modal sosial suatu kelompok. Jaringan sosial yang menciptakan berbagai ragam kualitas sosial berupa saling percaya, terbuka, kesatuan norma, dan menetapkan berbagai jenis sanksi bagi anggotanya.

Norma-norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Norma itu sendiri merupakan sekumpulan aturan yang diharapkan dapat dipatuhi dan diikuti oleh semua anggota pada suatu entitas sosial tertentu. Norma-norma ini biasanya mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku dimasyarakatnya. Aturan-aturan kolektif tersebut biasanya tidak tertulis, akan tetapi dapat dipahami oleh setiap anggota masyarakatnya dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial. Aturan-aturan kolektif ini misalnya, bagaimana cara



menghormati orang yang lebih tua, menghormati pendapat orang lain, norma untuk tidak mencurigai orang lain, norma untuk selalu bersama-sama dengan sejenisnya, merupakan contoh norma sosial. Jika dalam suatu komunitas, asosiasi, kelompok atau group, norma tersebut tumbuh, dipertahankan dan kuat akan memperkuat masyarakat itu sendiri.

Jaringan kerjasama dapat ditunjukkan dengan adanya pertemuan antar anggota sebagai tempat menukar informasi, pengalaman sehingga terwujud kerjasama atau sinergi antar kelompok, yaitu upaya penyesuaian dan koordinasi tingkah laku yang diperlukan untuk mengatasi konflik ketika tingkah laku seseorang atau kelompok dianggap menjadi hambatan oleh orang atau kelompok lain, sehingga akhirnya tingkah laku mereka menjadi cocok satu sama lain. Dengan jaringan sosial yang ada dalam kelompok menumbuhkan kekuatan baru untuk mengembangkan jaringan tersebut keluar kelompok untuk memperkuat modal sosial yang sudah ada.

### 2.1.3 Tipe Modal Sosial

Menurut Woolcock dalam Jousairi (2006) Modal Sosial dibagi dalam 3 tipe, yaitu:

#### 1. Social Bounding

Pengertian social bounding adalah tipe modal sosial dengan karakteristik adanya ikatan yang kuat (adanya perekat sosial) dalam suatu sistem kemasyarakatan. Misalnya, kebanyakan anggota keluarga mempunyai hubungan kekerabatan dengan keluarga yang lain. Yang mungkin masih berada dalam satu

etnis. Disini masih berlaku adanya sistem kekerabatan dengan sistem klen. Di banyak daerah Klen masih berlaku. Pengertian Klen disini sangatlah berbeda maknanya dengan leneage (kelompok kerabat unilateral) yang masih bisa ditelusuri hubungannya saja. Atau suku/stam (kesatuan tertinggi yang mempersatukan kelompok kerabat). Klen merupakan kelompok kerabat tradisional, unilateral dan eksogam.

Hubungan kekerabatan ini bisa menyebabkan adanya rasa empati atau kebersamaan. Bisa juga mewujudkan rasa simpati, rasa berkewajiban, rasa percaya, resiprositas, pengakuan timbal balik nilai kebudayaan yang mereka percaya. *Rule of law* atau aturan main merupakan aturan atau kesepakatan bersama dalam masyarakat, bentuk aturan ini bisa formal dengan sanksi yang jelas seperti aturan undang-undang. Namun ada juga sanksi non formal yang akan diberikan masyarakat kepada anggota masyarakatnya berupa pengucilan, rasa tidak hormat bahkan dianggap tidak ada dalam suatu lingkungan komunitasnya. Ini menimbulkan ketakutan dari setiap anggota masyarakat yang tidak melaksanakan bagian dari tanggung jawabnya. Hal ini berakibat akan adanya social order atau keteraturan dalam masyarakat .

Dalam kehidupan sehari-hari, norma-norma itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Yang perlu diingat bahwa modal sosial ada yang memberikan pengaruh yang baik dan ada yang memberikan pengaruh yang kurang baik. Tradisi atau adat-istiadat (*custom*) yang juga masih tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat desa. Adat-istiadat (*custom*) merupakan tata kelakuan yang kekal serta memiliki integrasi yang kuat dengan pola-pola perilaku masyarakat,

yang mempunyai kekuatan untuk mengikat dengan beban sanksi bagi pelanggarnya. Hal ini kembali berkait pada karakteristik sosio-psikologis masyarakat desa yang masih meyakini suatu kepercayaan tertentu secara homogen.

## 2. Social Bridging

Social Bridging (jembatan sosial) merupakan suatu ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya. Ia bisa muncul karena adanya berbagai macam kelemahan yang ada disekitarnya sehingga mereka memutuskan untuk membangun suatu kekuatan dari kelemahan yang ada. Stephen Aldidgre meng gambarkannya sebagai “pelumas sosial”, yaitu pelancar dari roda-roda penghambat jalannya modal sosial dalam sebuah komunitas.

Social Bridging bisa juga dilihat dengan adanya keterlibatan umum sebagai warga negara (*civic engagement*), asosiasi, dan jaringan. Tujuannya adalah mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat agar masyarakat mampu menggali dan memaksimalkan kekuatan yang mereka miliki baik SDM (Sumber Daya Manusia) dan SDA (Sumber Daya Alam) dapat dicapai.

Ketercapaiannya melalui interaksi sosial sebagai modal utama. Dengan demikian institusi sosial tetap eksis sebagai tempat artikulasi kepentingan bagi masyarakat. Misalnya dengan adanya lembaga arisan, yang sering dikategorikan sebagai *rotating saving and credit associations*. Merupakan asosiasi yang menyediakan fasilitas menabung secara periodik dan menyediakan fasilitas kredit bagi anggota-anggotanya.

Interaksi yang terjalin bisa berwujud kerjasama atau sinergi antar kelompok, yaitu upaya penyesuaian dan koordinasi tingkah laku yang diperlukan untuk mengatasi konflik ketika tingkah laku seseorang atau kelompok dianggap menjadi hambatan oleh orang atau kelompok lain, sehingga akhirnya tingkah laku mereka menjadi cocok satu sama lain.

Kapasitas modal sosial termanifestasikan dalam ketiga bentuk modal sosial tersebut (nilai, institusi, dan mekanisme) yang dapat memfasilitasi dan menjadi arena dalam hubungan antar warga dan antar kelompok berasal dari latar belakang berbeda, baik dari sudut etnis, agama, maupun tingkatan sosial ekonomi. Ketidakmampuan untuk membangun nilai, institusi, dan mekanisme bersifat lintas kelompok akan membuat masyarakat yang bersangkutan tidak mampu mengembangkan modal sosial untuk membangun integrasi sosial.

### 3. Social Linking

Merupakan hubungan sosial yang dikarakteristikan dengan adanya hubungan di antara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya: hubungan antara elit politik dengan masyarakat umum. Dalam hal ini elit politik yang dipandang khalayak sebagai public figure atau tokoh, dan mempunyai status sosial dari pada masyarakat kebanyakan. Namun mereka sama-sama mempunyai kepentingan untuk mengadakan hubungan. Elite politik membutuhkan massa untuk mendapatkan suara dan mendukungnya. Sementara masyarakat berusaha mendapatkan orang yang dipercaya bisa menjadikan penyalur aspirasi dan mereka percaya sebagai wakilnya.

Pada dasarnya ketiga tipe modal sosial ini dapat bekerja tergantung dari keadaannya. Ia dapat bekerja dalam kelemahan maupun kelebihan dalam suatu masyarakat. Ia dapat digunakan dan dijadikan pendukung sekaligus penghambat dalam ikatan sosial tergantung bagaimana individu dan masyarakat memaknainya.

#### 2.1.4 Parameter Modal Sosial

Modal sosial ini mengacu pada organisasi sosial dengan jaringan sosial, norma-norma dan kepercayaan sosial yang menjembatani terciptanya kerjasama dalam komunitas masyarakat sehingga terciptanya suatu kerjasama yang saling menguntungkan.

Pakar sosiologi maupun pakar ekonomi menyatakan bahwa sulit untuk mengukur modal sosial karena bentuknya tidak tertulis dan bersifat informal serta berupa hubungan kerjasama sosial yang berdasarkan pada norma kepercayaan, hubungan timbal balik antar individu dalam suatu kelompok masyarakat. Putnam (dalam Fukuyama, 1999) berpendapat bahwa modal sosial dapat diukur melalui dua cara pengukuran statistik, yaitu :

1. Informasi kelompok dan keanggotaan kelompok misalnya anggota klub olah raga, kelompok yang mempunyai minat terhadap suatu partai politik yang diindekskan dalam bentuk partisipasi politik.
2. Penelitian Survey seperti General Social Survey dan World Value Survey, yang semuanya bertujuan untuk mengetahui seputar nilai dan perilaku manusia.

Fukuyama (1999) menjelaskan bahwa terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam mengukur modal sosial, pendekatan tersebut adalah :

1. Modal sosial mempunyai dimensi kualitatif, misalnya adanya klub olah raga yang bertujuan membantu dalam bertindak dengan baik secara kolektif, tetapi sulit menilai output dari kelompok tersebut.
2. Apa yang disebut sebagai eksternalitas positif atau eksternalitas keanggotaan dalam suatu kelompok yang mempunyai tingkat kepercayaan positif.
3. Apa yang disebut dengan eksternalitas negatif yang dicirikan oleh adanya beberapa kelompok yang secara aktif mempropagandakan intoleransi antar kelompok masyarakat, kebencian dan bahkan pelanggaran hukum terhadap yang bukan anggota masyarakat.

Jadi modal sosial menunjuk pada ciri-ciri organisasi sosial yang berbentuk jaringan-jaringan horisontal yang di dalamnya berisi norma-norma yang memfasilitasi koordinasi, kerja sama, dan saling mengandalkan yang manfaatnya bisa dirasakan bersama oleh anggota organisasi. Dalam konteks itu akan menyumbang pada kemakmuran dan pada gilirannya diperkuat oleh kemakmuran tersebut.

Modal sosial mirip bentuk-bentuk modal lainnya, dalam arti ia juga bersifat produktif. Modal sosial dapat dijelaskan sebagai produk relasi manusia satu sama lain, khususnya relasi yang intim dan konsisten. Modal sosial menunjuk pada jaringan, norma dan kepercayaan yang berpotensi pada produktivitas masyarakat. Namun demikian, modal sosial berbeda dengan modal finansial,

karena modal sosial bersifat kumulatif dan bertambah dengan sendirinya (self-reinforcing).

Modal sosial tidak akan habis jika dipergunakan, melainkan semakin meningkat. Rusaknya modal sosial lebih sering disebabkan bukan karena dipakai, melainkan karena ia tidak dipergunakan. Berbeda dengan modal manusia, modal sosial juga menunjuk pada kemampuan orang untuk berasosiasi dengan orang lain. Bersandar pada norma-norma dan nilai-nilai bersama, asosiasi antar manusia tersebut menghasilkan kepercayaan yang pada gilirannya memiliki nilai ekonomi yang besar dan terukur.

Merujuk pada Edi Suharto, maka ada tiga parameter modal sosial, yaitu kepercayaan (trust), norma-norma (norms) dan jaringan-jaringan (networks). Lebih lanjut, Edi Suharto mengutip Spellerberg, mengemukakan beberapa indikator kunci yang dapat dijadikan ukuran (parameter) modal sosial antara lain :

1. Perasaan identitas
2. Perasaan memiliki
3. Sistem kepercayaan dan ideology
4. Nilai-nilai dan tujuan-tujuan
5. Ketakutan-ketakutan
6. Sikap-sikap terhadap anggota lain dalam masyarakat
7. Persepsi mengenai akses terhadap pelayanan, sumber dan fasilitas (misalnya pekerjaan, pendapatan, pendidikan, perumahan, kesehatan, transportasi, jaminan sosial)
8. Opini mengenai kinerja pemerintah yang telah dilakukan terdahulu

9. Keyakinan dalam lembaga-lembaga masyarakat dan orang-orang pada umumnya
10. Tingkat kepercayaan
11. Kepuasan dalam hidup dan bidang-bidang kemasyarakatan lainnya
12. Harapan-harapan yang ingin dicapai di masa depan.

## 2.2 Tinjauan Partisipasi

### 2.2.1 Pengertian

Menurut pendapat Mardikanto (1994) bahwa partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang di dalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Sedangkan Van Den Ban dan Hawkins (1999) menyatakan bahwa partisipasi merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen (*exogenous change*). Adapun karakteristik dari proses partisipasi seperti ini adalah semakin mantapnya jaringan sosial (*social networking*) yang baru, yang masing-masing selalu berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan yang diinginkan oleh masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan.

Pernyataan-pernyataan tersebut mengandung arti bahwa partisipasi merupakan wujud dari perilaku dalam pencapaian tujuan, keikutsertaan emosional, mental dan kesediaan untuk mengambil bagian dalam pencapaian tujuan.



Partisipasi dapat dilakukan dengan pola profesional maupun parsial. Partisipasi dengan pola profesional adalah partisipasi yang dilakukan sepanjang proses kegiatan, yang dimulai dengan tahap pemberian informasi, pemberian tanggapan, peran serta dalam perencanaan sampai tahap penilaian. Partisipasi dengan pola parsial adalah apabila keikutsertaan masyarakat hanya terbatas pada kegiatan tertentu saja.

Cohen dan Uphoff yang dikutip dari Ibnu Syamsi (1987), menyatakan bahwa partisipasi itu merupakan keterlibatan nyata seseorang dalam proses pembuatan keputusan mengenai apa yang dilakukan dan keterlibatan mereka dalam menjalankan program dan keputusan. Selain itu juga dapat diartikan sebagai keterlibatan mereka dalam menerima hasil.

Menanggapi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Humneryager dan Heckman (1967), mendefinisikan partisipasi sebagai berikut:

*” Participation is defined as an individual’s an emotional involvement in group situation that encourages him to contribute to group goals and to share responsibility for them”.*

Dari definisi tersebut terdapat tiga hal yang dapat ditunjukkan dalam bidang pembangunan, yaitu:

1. Titik berat partisipasi adalah pada keterlibatan mental dan emosional dimana kehadiran secara fisik dalam kelompok semata-mata tanpa keterlibatan mental dan emosional bukanlah partisipasi.
2. Kesiediaan untuk memberi kontribusi, seperti tenaga, dana atau pikiran.

3. Kesiediaan untuk turut bertanggung-jawab atas pelaksanaan atau hasil pembangunan serta menjaga kelestariannya.

Sedangkan Yadaf dalam Margono (1986) menyatakan bahwa partisipasi adalah keterikatan seseorang dalam suatu proses kegiatan secara sukarela atas kemauan sendiri tanpa adanya unsur paksaan. Partisipasi seseorang dapat dilihat dari partisipasinya dalam menyusun rencana kerja, pelaksanaan program, mengevaluasi program, serta menikmati hasil serta keuntungan.

### **2.2.2 Faktor - faktor yang Mempengaruhi Partisipasi**

Menurut Van Den Ban dan Hawkins (1999) menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, yaitu tinggi pendidikan, status sosial yang ditunjukkan oleh adanya perbedaan kekuasaan maupun perbedaan tingkat perekonomian. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi antara lain:

1. Kebutuhan masyarakat untuk memperbaiki kondisi.
2. Kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban sebagai anggota suatu kelompok atau masyarakat.
3. Manfaat yang diperoleh dari suatu program.
4. Umur, yaitu berkaitan dengan kondisi fisik atau kemampuan untuk memberikan sumbangan berupa tenaga.
5. Pembinaan, pendidikan individu yang erat hubungannya dengan pemahaman atas program, pengetahuan dan ketrampilan.

6. Pekerjaan dan status sosial, karena partisipasi akan lebih besar apabila program yang disampaikan berkaitan mata pencaharian masyarakat. Sedangkan status sosial berkaitan dengan kekuatan atau kekuasaan seseorang dalam hidup bermasyarakat yang selanjutnya kekuasaan yang dimiliki memberikan pengaruh yang positif maupun negatif terhadap keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan.
7. Peraturan, ketentuan atau syarat-syarat mengikuti program bersifat mudah atau sulit untuk dipenuhi. Jika peraturan terlalu ketat maka akan sulit untuk dipenuhi dan dapat menghambat partisipasi masyarakat.

### 2.2.3 Sifat dan Ciri Partisipasi

Sifat dan ciri partisipasi dalam masyarakat menurut pendapat Sastropoetra (1998) adalah:

1. Partisipasi haruslah bersifat sukarela.
2. Berbagai masalah haruslah disajikan dan dibicarakan secara jelas dan obyektif.
3. Kesempatan untuk berpartisipasi haruslah mendapatkan keterangan atau informasi yang jelas dan memadai tentang setiap aspek dari suatu program yang akan didiskusikan.
4. Partisipasi masyarakat dalam rangka menentukan kepercayaan terhadap diri sendiri haruslah menyangkut berbagai tingkatan dan berbagai sektor, bersifat dewasa, penuh arti, berkesinambungan dan aktif.

Dari pendapat Sastropoetra dapat diambil kesimpulan bahwa sifat dan ciri partisipasi adalah sukarela, penyajian masalah jelas dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.

#### **2.2.4 Syarat Pelaksanaan Partisipasi**

Agar masyarakat bersedia berpartisipasi maka program yang disusun haruslah mencakup hal-hal berikut:

1. Program disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat secara nyata.
2. Program dijadikan stimulus terhadap masyarakat yang berfungsi mendorong timbulnya respon yang dikehendaki.
3. Program dijadikan motivasi terhadap masyarakat yang berfungsi membangkitkan tingkah laku yang dikehendaki secara berlanjut.

#### **2.2.5 Bentuk Partisipasi**

Pada dasarnya bentuk partisipasi terdiri atas 3 tahap, yaitu:

1. Partisipasi dalam perencanaan

Sumohardjo dalam Margono (1986) mengungkapkan bahwa merencanakan kegiatan merupakan suatu proses menetapkan tujuan dan bentuk kegiatan yang mungkin akan dikerjakan serta bagaimana melakukan kegiatan itu. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan akan menimbulkan rasa akan memiliki dan rasa tanggung jawab akan program dan proyek yang dilaksanakan. Dengan begitu secara moral masyarakat yang bersangkutan merasa memiliki pembangunan itu sebab mereka ikut berpartisipasi dalam menetapkannya.

## 2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Proses pelaksanaan terutama berkaitan dengan partisipasi, Sumohardjo dalam Margono (1986) mendefinisikan bahwa keikutsertaan warga masyarakat dalam merealisasikan aspirasinya, dengan jalan menyumbang pikiran, inisiatif dan kreatif dalam bentuk usul, saran dalam rapat resmi maupun tidak. Kegiatan bekerja merupakan lanjutan dari kegiatan perencanaan. Pada tahap ini kegiatannya berupa sumbangan uang, sumbangan tenaga, sumbangan benda dan waktu. Dalam tahap ini yang dimaksud partisipasi adalah partisipasi dalam memikul beban program dan pertanggung-jawaban pelaksanaan program.

Proses pelaksanaan partisipasi meliputi:

- a. Konsultasi yang biasanya berbentuk jasa.
- b. Sumbangan dalam bentuk uang atau barang.
- c. Mendirikan proyek yang dananya individu.
- d. Sumbangan dalam bentuk kerja.
- e. Aksi massa

## 3. Partisipasi dalam monitoring dan evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam memonitoring dan evaluasi juga sangat penting. Suatu program atau proyek yang telah selesai dilaksanakan diharapkan mempunyai arti dan menguntungkan bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya monitoring dari masyarakat agar pelaksanaan program atau proyek berjalan sesuai tujuan yang diharapkan dan pada akhirnya dapat menguntungkan bagi masyarakat. Evaluasi bagi kelayakan program merupakan tindak lanjut dari monitoring suatu program. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam

menevaluasi suatu program maka berguna untuk keefektifan program selanjutnya sehingga program yang akan dilaksanakan akan benar-benar efektif. Bentuk partisipasi masyarakat adalah mau memantau jalannya program, mengkritisi kelebihan dan kekurangan program serta memelihara dan ikut mengembangkan suatu program supaya lebih berguna (Mardikanto, 1994).

Menurut Margono (1986) partisipasi tidak hanya berarti menyumbangkan materi saja, tetapi lebih dari itu partisipasi meliputi berbagai aspek yakni meliputi kegiatan-kegiatan memberi input dan menerima imbalan atas input tersebut dan menikmati hasilnya.

#### **2.2.6 Syarat Terbentuknya Partisipasi**

Menurut Margono (1996) bahwa syarat terbentuknya partisipasi meliputi tiga hal yaitu:

1. Kemauan untuk berpartisipasi, secara psikologis kemauan berpartisipasi dapat muncul dengan adanya motif intrinsik (dari dalam diri sendiri) maupun ekstrinsik (karena rangsangan, dorongan atau tekanan dari luar).
2. Kemampuan untuk berpartisipasi, adanya kemampuan untuk berpartisipasi belum tentu akan menjamin partisipasi yang diharapkan jika yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk dapat berpartisipasi dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan.
3. Kesempatan berpartisipasi, adanya kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh warga masyarakat untuk berpartisipasi belum tentu menjamin

tumbuhnya partisipasi jika mereka tidak diberikan dan ditunjukkan adanya kesempatan untuk berpartisipasi.

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan bahwa dalam berpartisipasi, maka seseorang tersebut harus mempunyai kemauan yang dimotivasi oleh dirinya sendiri atau lingkungannya, kemampuan serta didukung adanya kesempatan atau peluang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Jadi partisipasi seseorang akan terbentuk saat seseorang itu memperoleh dorongan dari dalam dirinya dan dari luar dirinya atau lingkungan tempat tinggalnya.

### **2.2.7 Manfaat Partisipasi**

Partisipasi dalam masyarakat penting dalam pembangunan dan bahkan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri yakni terlibatnya, tergeraknya seluruh masyarakat dalam suatu proses pembangunan secara terencana sesuai dengan arah dan strategi yang telah ditetapkan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Diana Conyers sebagaimana dikutip dalam Supriatna, 2000 (dalam skripsi Vera) yaitu tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangatlah penting, hal ini karena:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaanya, karena mereka akan lebih

mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut.

3. Adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

### **2.2.8 Kendala Partisipasi**

Dalam kondisi lain terdapat tiga hal yang dapat menghalangi pelaksanaan partisipasi yaitu:

1. Hambatan struktural, yang menyangkut lingkungan kebijakan politik yang dijalankan.
2. Hambatan administrasi, dimana administrasi sentralik mengakibatkan keputusan pembangunan masih selalu diputuskan di tingkat pusat.
3. Hambatan sosial, hubungan dengan struktur sosial seperti terdapatnya kelompok-kelompok elit yang berpengaruh pada pelaksanaan partisipasi dalam arti negatif.

Menurut Kumorotomo (1992), terdapat beberapa kendala partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Pemerintah mendahulukan peraturan dan perundangan yang ketat dari pada diplomasi.
2. Pemerintah mengutamakan pengusaha dan memusatkan pengambilan keputusan pada tingkat nasional dengan kurang memahami kondisi lokal
3. Pegawai pemerintah seringkali memiliki sikap yang negatif pada masyarakat lokal



4. Kurangnya pelatihan dalam konsep, strategi dan konsep partisipasi
5. Kurangnya pendidikan partisipasi dengan mengikut-sertakan pegawai pemerintah dan masyarakat lokal
6. Masyarakat tidak menerima manfaat atau keuntungan yang pantas.

### 2.3 Telaah Penelitian Terdahulu

Menurut Subejo (2004) dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan *Social Capital* dalam Pembangunan Ekonomi: Suatu Pengantar untuk Studi *Social Capital* di Pedesaan Indonesia” menyimpulkan bahwa *Social capital* telah muncul dan tumbuh menjadi salah satu tema utama bagi banyak ahli dan peneliti dalam bidang yang terkait, Hal ini didasari pada kesepahaman bersama bahwa *social capital* merupakan faktor yang penting yang berpengaruh signifikan pada perumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan secara umum. Meskipun secara formal studi *social capital* belum banyak dilakukan dan dikembangkan di Indonesia, namun beberapa studi awal tentang aktivitas gotong royong dan institusi kerja untuk tolong menolong di pedesaan paling tidak telah membuka peluang yang lebih luas sebagai referensi awal untuk studi yang lebih intensif dan komprehensif tentang praktek dan mekanisme kerja dan keberlanjutan *social capital* di Indonesia khususnya di daerah pedesaan.

Studi-studi awal secara umum telah menyimpulkan bahwa aktifitas warga masyarakat yang terinstitusionalisasikan dalam berbagai type gotong royong yang mencakup dimensi sangat luas mulai dari kepentingan publik/sosial sampai

kepentingan tingkat individu telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberlangsungan rumah tangga masyarakat di pedesaan baik secara sosial maupun ekonomi. Kegiatan-kegiatan yang antara lain termanifestasikan dalam institusi kerja untuk saling tolong menolong pada tataran tertentu telah memberikan jaminan atau *self-guaratying* kepada semua anggota masyarakat untuk mendapatkan kesempatan dan hak penghidupan yang layak secara sosial dan ekonomi melalui aktivitas-aktivitas kerjasama yang mampu memenuhi kebutuhan individu dan juga kepentingan bersama/kelompok.

Penelaahan pada institusi kerja untuk tolong menolong saja nampaknya masih belum cukup, masih ada variasi bentuk-bentuk institusi lokal yang lain yang juga dapat diacu sebagai bagian dari sistem jaring pengaman sosial yang telah dikembangkan dan terlembagakan secara tradisional oleh warga masyarakat. Institusi lokal tersebut merupakan lembaga dan tatanan bersama yang memungkinkan suatu keberlanjutan dan stabilitas bagi setiap rumah tangga sebagai warga masyarakat. Beberapa aspek kajian antara lain institusi yang memiliki fungsi pelayanan sosial, kelompok simpan pinjam berotasi/arisan, Jaring pengaman sosial tradisional lainnya, sistem pewarisan yang seimbang, sistem penyakapan dan bagi hasil serta pelayanan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang lebih mendalam. Institusi-institusi tersebut memungkinkan akses yang lebih besar baik bagi kalangan yang kurang mampu maupun kalangan menengah ke atas di pedesaan untuk mencapai stabilitas secara ekonomi dan sosial dalam kehidupannya. Selain studi tentang karakteristik dari masing-masing institusi juga dapat dilakukan pelacakan bagaimana peranan

dan kontribusi institusi-institusi tersebut dalam menjamin keberlanjutan ekonomi rumah tangga masyarakat. Tidak kalah pentingnya, studi tentang mekanisme dan proses kerjasama antar warga masyarakat yang terwujud dalam berbagai bentuk kerjasama perlu diteliti secara mendalam pula.

Hal ini memungkinkan untuk dapat mengidentifikasi mekanisme kerjasama yang lebih efisien serta dapat teridentifikasi variable-variabel utama yang menentukan *performance* kerjasama sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan oleh pelakunya. *Opportunistic behavior*, *free rider* dan *rent seeking* yang umumnya menjadi tema sentral sebagai penghambat dan perusak organisasi dan sistem kerjasama dapat diteliti dengan seksama, kajian dapat diarahkan untuk menjawab hipotesa tentang bagaimana keberadaan faktor penghambat tersebut dalam praktek nyata kerjasama serta bagaimana strategi pemain atau pelakunya untuk mengeliminasi hal tersebut sehingga proses kerjasama dapat tetap berlangsung dengan baik. Bagaimanapun juga modernisasi yang secara sederhana dapat ditandai dengan masuknya ekonomi pasar ke segala aspek kehidupan masyarakat pedesaan telah secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi aktivitas kerjasama antar warga masyarakat lokal. Kajian terkait yang perlu dilakukan antara lain mencakup bagaimana dampak (positif dan atau negatif) dengan masuknya ekonomi pasar serta dapat dilakukan pula identifikasi terhadap institusi lokal dengan karakteristik yang seperti apa yang memiliki kemampuan bertahan bahkan tumbuh dan berkembang ditengah menguatnya pengaruh ekonomi pasar di daerah pedesaan.

Menurut Ahmad Erani Yustika, SE,M.Sc.Ph.D dalam bukunya Ekonomi Kelembagaan “Definisi, Teori, & Strategi” mendefinisikan Modal sosial adalah infrastruktur sosial yang terbangun dari warga yang didasarkan saling percaya, bekerja satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama dan menghasilkan kehidupan yang berkeadaban (civic culture). Seperti modal-modal lain dalam ekonomi, modal sosial mempunyai peran strategis karena bersifat produktif dan mempunyai fungsi sebagai perekat elemen-elemen masyarakat melalui hubungan relasi yang intim dan konsisten. Modal sosial terdiri dari dimensi-dimensi norma, kepercayaan, keterpaduan, solidaritas, jaringan dan kelompok. yang merupakan produk dari modal sosial-modal sosial yang ditandai oleh adanya lembaga-lembaga sosial yang kokoh; modal sosial melahirkan kehidupan sosial yang harmonis; merusakkan modal sosial akan menimbulkan anomie dan perilaku anti sosial.

Berbeda dengan modal finansial, modal sosial bersifat kumulatif dan bertambah dengan sendirinya (*self reinforcing*). Karena itu, modal sosial tidak akan habis jika dipergunakan, melainkan semakin meningkat. Rusaknya modal sosial lebih sering disebabkan bukan karena dipakai, melainkan karena ia tidak dipergunakan. Salah satu bentuk lembaga usaha ekonomi yang bermuatan modal sosial adalah Lembaga Mikro Keuangan (LKM) yang didalamnya mengandung dimensi-dimensi norma, kepercayaan, keterpaduan, solidaritas, kelompok dan jaringan.

Menurut Dede Mariana (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Modal Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan” menyimpulkan bahwa lembaga kemasyarakatan memainkan peran strategis dalam perencanaan pembangunan karena lembaga inilah yang melahirkan sistem gagasan dan perilaku masyarakat yang diperlukan dalam mendorong perencanaan pembangunan yang partisipatif. Dalam hal ini, lembaga kemasyarakatan berkaitan erat dengan modal sosial karena norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam modal sosial perlu dikonkretkan melalui mekanisme yang disediakan oleh lembaga kemasyarakatan. Selanjutnya, nilai dan mekanisme ini difasilitasi oleh institusi yang berwujud dalam berbagai komponen stakeholders yakni pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang berperan dalam perencanaan pembangunan.

Masalah pembangunan desa sering hanya dilihat dari perspektif ekonomi, yang mengaitkan konsep pembangunan dengan pencapaian indikator-indikator pertumbuhan ekonomi, termasuk salah satunya peningkatan daya beli. Padahal, dalam konteks desa-desa di Jawa Barat, terdapat aspek politik, sosial, dan budaya yang perlu menjadi perhatian. Pandangan romantisme yang melihat desa sebagai wilayah yang lugu, belum terjamah dan masih kental dengan pola hidup tradisional, tampaknya tidak lagi relevan untuk melihat kondisi pedesaan dewasa ini.

Menurut Zahratul Mufidah (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Hubungan Antara Modal Manusia dan Modal Sosial dengan Partisipasi Masyarakat Desa Hutan” menyimpulkan bahwa *Social capital* dalam program

PHBM merupakan kemampuan masyarakat dalam LMDH untuk bekerjasama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama yaitu melestarikan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pola interrelasi yang imbal balik dan saling menguntungkan serta dibangun atas dasar kepercayaan yang ditopang oleh norma dan nilai sosial yang positif dan kuat.

Partisipasi anggota adalah peran serta atau keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang untuk mengambil bagian dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta ikut memonitoring dan mengevaluasi program guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan anggota mengenai program PHBM adalah perencanaan mengenai teknis pertanian yang benar guna kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Pelaksanaan anggota mengenai program PHBM adalah keseriusan anggota dalam melaksanakan program PHBM. Memonitoring dan mengevaluasi dari program PHBM bagi anggota adalah pengawasan serta evaluasi selama kegiatan program PHBM yang dilakukan oleh anggota guna tindak lanjut program.

Terdapat hubungan antara *social capital* dengan partisipasi anggota dalam program PHBM. Hal ini karena kepercayaan anggota terhadap kelompok dan individu di dalamnya cukup tinggi sehingga aspirasi anggota bisa terakomodasi serta menumbuhkan kemauan bekerjasama yang tinggi, tidak bergerak sendiri-sendiri sehingga partisipasi kolektif anggota bisa berjalan dengan baik dengan tetap pada aturan-aturan yang telah disepakati bersama.

## 2.4 Tinjauan Tentang GHIPPA

### 2.4.1 Konsep GHIPPA

Gabungan HIPPA merupakan suatu organisasi yang terbentuk dari beberapa HIPPA yang mempunyai tujuan sama yaitu mendayagunakan potensi mengelola jaringan irigasi agar dalam pelayanannya kepada anggota secara tepat guna dan berhasil guna.

Wilayah kerja HIPPA yaitu meliputi wilayah administratif desa yang bersangkutan yang memiliki beberapa segi positif antara lain kompatibel dengan wilayah kerja lembaga pengelola irigasi tradisional yang ada sebelumnya (Jogotirto).

Dua dekade terakhir di berbagai negara di dunia telah terjadi pergeseran paradigma pembangunan irigasi dari sentralistis dan pendekatan teknis kepada pendekatan disentralistis, sosio-teknis artinya memperhatikan keterpaduan antar aspek teknis dan aspek sosial dalam pembangunan irigasi. Sedangkan pendekatan partisipatif artinya memberikan kesempatan kepada petani melalui kelembagaan yang ada untuk terlibat dalam proses pembangunan jaringan irigasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Lubis dan Harahap, 1988). Ada beberapa alasan yang mendorong terjadinya pergeseran paradigma pembangunan irigasi tersebut, yaitu tekanan keuangan pada pemerintah, kurang cukupnya dana yang dialokasikan pada pengelolaan irigasi, meluasnya kerusakan dan rendahnya kinerja sistem irigasi dan lembaga yang ada dalam mengelola sistem irigasi, kegagalan dalam pengumpulan biaya pengelolaan irigasi dari petani, keinginan pemerintah menguraangi biaya dan merealokasikan penerimaan pemerintah, dan

meningkatnya kepercayaan pemerintah akan kemampuan petani dan kelompok lokal mengambil alih pengelolaan irigasi dari pemerintah (Vermillion, 1999).

Pemerintah melakukan penetrasi kebijaksanaan pengelolaan air. Ketika pemerintah melakukan penetrasi kebijakan dengan tujuan untuk memperbaiki sistem irigasi yang dikelola oleh masyarakat, maka mulai diintroduksi sistem pengelolaan dan rancang bangun yang bersifat estandar di semua daerah irigasi. Hal tersebut mendorong terbaikannya kelembagaan pengelolaan yang sudah ada dan diganti dengan kelembagaan yang dianggap lebih memadai seperti Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). Penetrasi kebijakan dengan pendekatan proyek telah menimbulkan ketergantungan yang tinggi oleh masyarakat petani terhadap bantuan pemerintah dalam mengelola sistem irigasi (Pasandran, 2004).

Pada era reformasi dan desentralisasi (otonomi daerah) digunakan sebagai tonggak upaya memulihkan kembali kapital sosial yang ada pada masyarakat. Pada hakekatnya hal tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan *good governance* dalam pengelolaan irigasi dan sumberdaya air pada umumnya karena besarnya peran irigasi dalam pengelolaan sumberdaya air di pedesaan. Upaya pemulihan tersebut diwujudkan dalam bentuk Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI). Salah satu unsur kebijakan tersebut adalah Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) kepada petani. Karena manajemen irigasi berbasis masyarakat dianggap sebagai tujuan dan telah dilakukan upaya-upaya untuk mencapai tujuan tersebut, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan format kelembagaan yang dianggap paling sesuai. Pada kebijakan baru ini, masyarakat petani semakin memiliki peran yang besar



dalam pengelolaan irigasi, melalui kelembagaan P3A di tingkat tersier dan Gabungan P3A pada tingkat sekunder atau primer (Hidayat, 2005).

#### 2.4.2 Pembentukan GHIPPA

Sejalan dengan peraturan Pemerintah Daerah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Irigasi di Jawa Timur dan Inores Nomor 3 Tahun 1999, maka para petani pemakai air melalui musyawarah Petani Pemakai Air pada tanggal 12 Februari 2000 di Balai Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk membentuk Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) “Tirto Aji” dengan susunan pengurus sebagai berikut:

- Ketua : Lasidi
- Sekretaris : Sumarno
- Bendahara : Sulastri
- Bagian Teknik : Siman
- Pembantu Teknik : Sunandar
- Ketua Blok I : Sumarji
- Ketua Blok II : Mujiarto
- Ketua Sub Blok I : Jadi
- Ketua Sub Blok II : Lazi
- Ketua Sub Blok III : Lamidi
- Ketua Sub Blok IV : Muji
- Ketua Sub Blok V : Katno

### Wilayah kerja Daerah Irigasi Widas Tingkat Jaringan Irigasi Ngudikan

Kiri dengan luas areal 657 Hektar, yang terdiri dari :

1. Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor : 25 Ha
2. Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor : 50 Ha
3. Desa Gemenggeng Kecamatan Bagor : 51 Ha
4. Desa Banaran Wetan Kecamatan Bagor : 4 Ha
5. Desa Sidokare Kecamatan Rejoso : 112 Ha
6. Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso : 152 Ha
7. Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso : 50 Ha
8. Desa Setren Kecamatan Rejoso : 42 Ha
9. Desa Mungkung Kecamatan Rejoso : 77 Ha
10. Desa Gempol Kecamatan Rejoso : 54 Ha
11. Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk : 40 Ha

Sarana yang dimiliki Gabungan HIPPA “Tirto Aji” meliputi :

- Areal Teknis : 657 Ha
- Saluran Primer : 3.534 Meter
- Saluran Sekunder : 4.042 Meter
- Pintu Air : 31 Buah
- Kebutuhan Debit Air : 700 lt/det

### 2.4.3 Bidang Organisasi

#### 1. Susunan Pengurus

Pada tahun 2008 Pengurus Gabungan HIPPA “Tirto Aji” mengalami perubahan dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Lasidi
- Sekretaris : Sumarno
- Bendahara : Sulastrri
- Bagian Teknik : Siman
- Pembantu Teknik : Sunandar
- Ketua Blok I : Sumarji
- Ketua Blok II : Mujiarto
- Ketua Sub Blok I : Jadi
- Ketua Sub Blok II : Sukarno
- Ketua Sub Blok III : Lamidi
- Ketua Sub Blok IV : Muji
- Ketua Sub Blok V : Katno
- PPA : Marsaid

#### 2. Rapat Pengurus

Rapat pengurus diselenggarakan setiap bulan sekali. Tujuan dari rapat pengurus antara lain :

- Membahas program kerja yang sudah ditetapkan
- Membahas permasalahan yang timbul
- Laporan hasil penarikan iuran HIPPA dan IPAIR

- Informasi atau petunjuk dari para pembina
- Menertipkan langkah-langkah yang sudah menjadi keputusan dalam Rapat Anggota.

### 3. Pembinaan Keanggotaan

Pembinaan anggota pengurus dilakukan secara rutin setiap 4 bulan sekali yang bertempat di Pendopo Desa dan Posko yang telah ditentukan, selain itu pembinaan HIPPA juga melalui pertemuan rutin kelompok tani di desa masing-masing. Pembinaan berupa pengaturan pola tanam, tata tanam, teknis pertanian, gilir air, pemeliharaan saluran dan kesadaran pembayaran IPAIR.

#### 2.4.4 Bidang Keuangan

IPAIR adalah Iuran Petani Atas Irigasi yang diterima. Penetapan besar iuran pengelolaan irigasi yang dipungut untuk jaringan primer dan sekunder yaitu sebesar Rp.25.000,-/ha/tahun. Iuran tersebut dipungut, disimpan dan dimanfaatkan oleh HIPPA, secara:

1. Otonom : Tidak dipengaruhi oleh pihak lain, sesuai dengan kebutuhan anggota untuk peningkatan pengelolaan air irigasi
2. Transparan : Tidak ditutupi
3. Akuntabilitas : Pengelolaan keuangan dapat dipertanggung jawabkan (pemasukan dan pengeluaran jelas).

Iuran yang dipungut dari anggota HIPPA tersebut akan digunakan untuk biaya pengelolaan jaringan primer, sekunder dan tersier dengan berpedoman pada program yang telah ditetapkan. Biaya pengelolaan irigasi Ngudikan Kiri akan

ditetapkan setelah dilakukan penelusuran jaringan irigasi oleh pengurus Gabungan HIPPA dan wakil dari masing-masing pengurus HIPPA dengan bimbingan dari Dinas Pengairan Kabupaten. Insentif/upah pungut diberikan kepada yang terlibat dalam kegiatan pemungutan iuran sebesar 10% dari besar iuran yang dikumpulkan dari anggotanya. Biaya administrasi organisasi Gabungan HIPPA adalah 10% dan honorarium pengurus Gabungan HIPPA ditetapkan sebesar 20% dari besar iuran yang terkumpul dari anggota Gabungan HIPPA.

#### **2.4.5 Teknik Keirigasian**

##### **1. Pengaturan Air Irigasi**

###### **a. Mekanisme Pengaturan Air**

Pada dasarnya petani tidak menangani pemberian air. Pemberian air dilaksanakan oleh pengurus Gabungan HIPPA didampingi oleh Juru Pengairan diterima oleh Bagian Teknis, kemudian diteruskan kepada Ketua Blok. Ketua Blok memberikan ke Sub Blok dan diteruskan kepada Ketua Kelompok kemudian diberikan ke petak-petak sawah.

###### **b. Cara Pengaturan Air**

Pada saat air cukup, pemberian air secara serempak diberikan kepada anggota HIPPA. Namun apabila air kurang maka pemberian air dibagikan secara bergilir. Apabila kebutuhan air tetap tidak mencukupi maka dibantu dengan pompa yang di atur per sub blok.

## 2. Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Untuk pemeliharaan jaringan irigasi pengurus telah membuat rencana kegiatan pemeliharaan. Untuk pemeliharaan rutin berupa pembersihan saluran. Sedangkan untuk pemeliharaan berkala maupun darurat menyesuaikan keadaan dilapangan.

## 3. Pembangunan Jaringan Irigasi

Pembangunan jaringan irigasi telah dilaksanakan dengan baik dari dana swadaya murni maupun gabungan swadaya masyarakat petani dan pemerintah.

### 2.4.6 Bidang Koordinasi

#### 1. Koordinasi HIPPA dengan HIPPA lainnya

Paling tidak sebulan sekali diadakan pertemuan/rapat antar HIPPA yang dikoordinasikan oleh Cabang Dinas Pengairan atau Juru Pengairan. Ini merupakan media komunikasi, konsultasi dan perencanaan terpadu antar HIPPA tersebut.

#### 2. Koordinasi HIPPA dengan Kelompok Tani

Dalam rapat anggota maupun pengurus, selalu mengundang pengurus kelompok tani sebagai mitra kerja. Keterpaduan perencanaan, kegiatan yang menyangkut melipat gandakan hasil pertanian selalu dibahas dalam form ini. Pola tanam tanam dan teknik pertanian yang lain selalu mendapat bimbingan dari Mantri Pertanian setempat.

#### 3. Koordinasi dengan Kelompok Tani

Kelompok Tani selalu diundang dan dilibatkan dalam rapat-rapat anggota maupun rapar pengurus. Kegiatan Kelompok Tani selalu terpadu, misalnya dalam

motivasi pemberantasan hama tanaman, teknik bercocok tanam dan penanganan pasca panen.

#### 4. Koordinasi dengan PPL dan Juru Pengairan

Di dalam rapat pengurus dan rapat anggota selalu mengundang/dihadiri oleh PPL sekaligus memberikan informasi dan program pembinaan kepada para petani anggota HIPPA.

#### 5. Koordinasi dengan Pendamping Teknik

Di dalam rapat pengurus dan rapat anggota selalu mengundang/dihadiri Juru Pengairan sekaligus memberikan informasi dan pembinaan. Selain itu setiap bulan sekali Juru Pengairan mengadakan pertemuan/rapat antar HIPPA dalam wilayah binaannya.

#### 6. Koordinasi dengan Pemerintah Desa

Pemerintah desa sangat berkewajiban terhadap pengembangan HIPPA, terutama di dalam menggerakkan warga masyarakat petani dalam pelaksanaan pembangunan. Di dalam rapat pengurus dan rapat anggota selalu mengundang oleh aparat Pemerintah Desa sekaligus memberikan pembinaan.

### 2.4.7 Tugas Pengurus GHIPPA

#### 1. Ketua Gabungan HIPPA

- Mewakili Gabungan HIPPA dalam pertemuan Panitia Irigasi Tingkat Kabupaten
- Mewakili Gabungan HIPPA dalam pertemuan Gabungan di Tingkat Induk
- Mengkoordinir kegiatan di Tingkat Gabungan Sekunder

- Menampung permasalahan yang muncul dan mencari pemecahannya
  - Bertanggung jawab atas jalannya organisasi.
2. Wakil Ketua Gabungan HIPPA
- Mewakili Ketua Gabungan HIPPA apabila berhalangan
  - Membimbing dan mengawasi anggota pengurus sesuai tugas masing-masing
  - Mengkoordinir dan melaksanakan usaha ekonomi organisasi
  - Bertanggung jawab kepada Ketua Gabungan HIPPA atas pengaturan di dalam organisasi.
3. Sekretaris Gabungan HIPPA
- Melaksanakan administrasi kesekretariatan Gabungan HIPPA
  - Melaksanakan inventarisasi anggota pengurus dan HIPPA anggota
  - Melaksanakan inventarisasi kekayaan organisasi
  - Menyusun atau membaca notulen rapat anggota dan rapat pengurus
  - Menyusun laporan pertanggung jawaban kesekretariatan
  - Bertanggung jawab atas jalannya administrasi dalam organisasi.
4. Bendahara Gabungan HIPPA
- Menerima uang iuran dari Bendahara HIPPA anggota
  - Mencatat penerimaan uang dan pengeluarannya
  - Membuat administrasi keuangan yang dilaporkan kepada rapat anggota
  - Bertanggung jawab atas penggunaan dana organisasi.
5. Bagian Teknis Gabungan HIPPA
- Menerima air dan jadwal pembagian air dan petugas Dinas Pengairan Kabupaten sesuai dengan kebutuhan (di pintu sekunder)



- Mengatur giliran air pada tingkat blok dan mengawasinya
- Memberikan masukan dalam perencanaan teknis untuk perbaikan jaringan irigasi
- Membimbing dan mengawasi pemeliharaan saluran irigasi dan bangunan pelengkapya agar berfungsi dengan baik
- Mengerahkan tenaga gotong-royong dalam hal perbaikan/pemeliharaan jaringan irigasi.

#### **2.4.8 Sanksi Terhadap Pelanggaran**

Setiap anggota wajib ikut melestarikan jaringan irigasi, membayar iuran serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pada Rapat Anggota.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dikenakan sanksi antara lain :

- Bagi anggota yang menunggak pembayaran iuran wajib dikenakan denda sebesar 10% dari jumlah iuran yang harus dibayarkan.
- Pencurian air dari anggota lain dikenakan sanksi berupa tidak diberi air pada giliran berikutnya, dan apabila dilakukan 3 kali pelanggaran yang sama akan dikeluarkan dari keanggotaan GHIPPA.
- Pengrusakan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapya dikenakan sanksi berupa memperbaiki kembali seperti keadaan semula.

### III. KERANGKA KONSEPTUAL

#### 3.1 Kerangka Pemikiran

Menurut Maskey dan Weber (1996), menyebutkan bahwa irigasi adalah suatu sistem yang kompleks, berisikan suatu subsistem yang berinteraksi, seperti subsistem air, lingkungan, ekonomi dan manusia. Diantara semua subsistem itu, subsistem manusia memegang peranan yang sangat penting. Hal ini merefleksikan kemampuan petani untuk bereaksi.

Sebagaimana diketahui bahwa air merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting artinya bagi kehidupan baik bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Oleh karena itu selayaknya bila air dihargai sebagai potensi ekonomi dan dimanfaatkan sebaik – baiknya dalam arti harus dipergunakan secara efektif dan efisien.

Sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1986 tentang irigasi di Jawa Timur Inpres Nomor 3 Tahun 1999, maka petani pemakai air melalui musyawarah Petani Pemakai Air pada tanggal 12 Pebruari 2000 di Balai Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk membentuk Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (Gabungan HIPPA) “Tirto Aji” yang bertujuan untuk memberikan jatah air kepada petani dengan luas areal 657 Ha yang meliputi wilayah kecamatan Bagor, kecamatan Rejoso dan kecamatan Nganjuk.

Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) adalah gabungan dari anggota HIPPA yang mempunyai tujuan mendayakan potensi mengelola jaringan

irigasi agar dalam pelayanannya kepada anggota secara tepat guna dan berhasil guna.

Modal sosial Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) adalah gabungan dari beberapa orang yang membentuk kelompok sosial dan mempunyai tujuan bersama dalam pengelolaan air irigasi. Modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok dan antar kelompok dengan ruang perhatian pada kepercayaan, norma sosial serta jaringan kerjasama antar sesama anggota kelompok. Kepercayaan merupakan dasar modal sosial dalam mengembangkan jaringan kerjasama dalam kelompok maupun luar kelompok.

Kepercayaan dalam masyarakat sebagai sumber modal sosial yang bisa dilihat dari kepercayaan anggota petani terhadap pemimpinnya, kemauan bekerjasama dalam kelompok, serta jaringan kerjasama. Kepemimpinan dalam hal ini dapat dilihat dari tipe kepemimpinan yang dibawa oleh pemimpin organisasi serta keterkaitannya dengan bagaimana cara pemimpin menggalang solidaritas kepada anggotanya, memutuskan kepentingan bersama, serta penegakan demokrasi. Selain dari kepemimpinan, kemauan bekerjasama dari semua elemen masyarakat petani juga menentukan kuat tidaknya modal sosial dalam suatu lembaga. Sikap mau bekerjasama baik dari sesama anggota pengurus maupun petani dengan anggota pengurusnya akan menimbulkan suatu tindakan kolektif yang tinggi yang nantinya berujung pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai ragam bentuk dan dimensi terutama dalam konteks membangun kemajuan bersama.

Norma-norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Norma itu sendiri merupakan sekumpulan aturan yang diharapkan dapat dipatuhi dan diikuti oleh semua anggota pada suatu entitas sosial tertentu. Norma-norma ini biasanya mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku dimasyarakatnya. Aturan-aturan kolektif tersebut biasanya tidak tertulis, akan tetapi dapat dipahami oleh setiap anggota masyarakatnya dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial.

Aturan-aturan kolektif ini misalnya, bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua, menghormati pendapat orang lain, norma untuk tidak mencurigai orang lain, norma untuk selalu bersama-sama dengan sejenisnya, merupakan contoh norma sosial. Jika dalam suatu komunitas, asosiasi, kelompok atau group, norma tersebut tumbuh, dipertahankan dan kuat akan memperkuat masyarakat itu sendiri.

Jaringan kerjasama dapat ditunjukkan dengan adanya pertemuan antar anggota sebagai tempat menukar informasi, pengalaman sehingga terwujud kerjasama atau sinergi antar kelompok, yaitu upaya penyesuaian dan koordinasi tingkah laku yang diperlukan untuk mengatasi konflik ketika tingkah laku seseorang atau kelompok dianggap menjadi hambatan oleh orang atau kelompok lain, sehingga akhirnya tingkah laku mereka menjadi cocok satu sama lain. Dengan jaringan sosial yang ada dalam kelompok menumbuhkan kekuatan baru

untuk mengembangkan jaringan tersebut keluar kelompok untuk memperkuat modal sosial yang sudah ada.

Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) “Tirto Aji” ini mendapat sambutan hangat dari petani untuk ikut berpartisipasi pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap monitoring dan evaluasi. Dengan partisipasi petani yang aktif, maka akan terjalin suatu modal sosial yang baik antara Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dengan petani pemakai air dalam pemenuhan kebutuhan air. Namun sebaliknya, pelaksanaan program ini tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa adanya partisipasi oleh petani itu sendiri pada tiap tahapannya.

Partisipasi menurut Mardikanto (1994) dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang di dalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri. Sedangkan menurut Van Den Ban (2000) menyatakan bahwa partisipasi merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen (*exogenous change*). Adapun karakteristik dari proses partisipasi seperti ini adalah semakin mantapnya jaringan sosial (*social networking*) yang baru, yang masing-masing selalu berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan yang diinginkan oleh masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan. Hal tersebut juga terjadi pada suatu masyarakat tani, yang biasanya tergabung dalam kelompok tani.

Partisipasi terdiri dari 3 tahap, yaitu partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Menurut Sumohardjo dalam Margono (1986) Merencanakan kegiatan merupakan suatu proses menetapkan

tujuan dan bentuk kegiatan yang mungkin akan dikerjakan serta bagaimana melakukan kegiatan itu. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan akan menimbulkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab akan program dan proyek yang dilaksanakan.

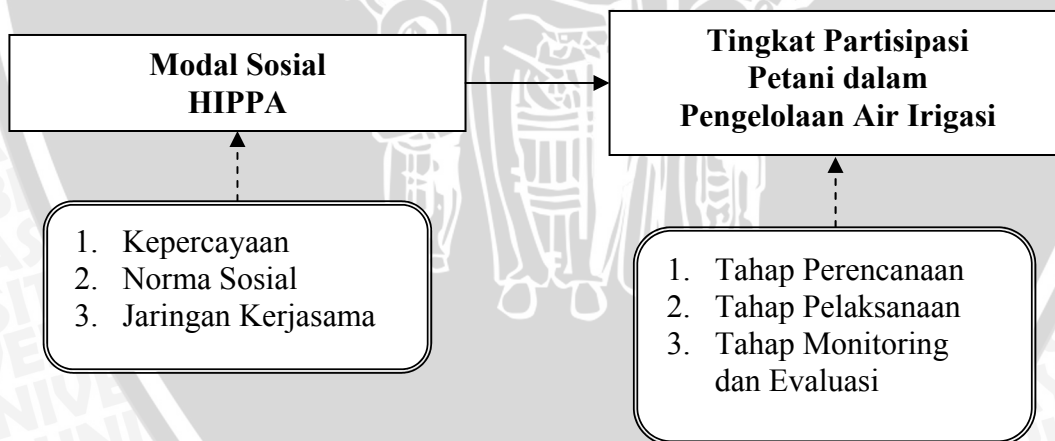
Proses pelaksanaan terutama berkaitan dengan partisipasi, Sumohardjo dalam Margono (1986) mendefinisikan bahwa keikutsertaan warga masyarakat dalam merealisasikan aspirasinya, dengan jalan menyumbang pikiran, inisiatif dan kreatif dalam bentuk usul, saran dalam rapat resmi maupun tidak. Dalam tahap ini yang dimaksud partisipasi adalah partisipasi dalam memikul beban program dan pertanggung-jawaban pelaksanaan program.

Menurut Mardikanto (1994), partisipasi masyarakat dalam memonitoring dan evaluasi juga sangat penting. Suatu program atau proyek yang telah selesai dilaksanakan diharapkan mempunyai arti dan menguntungkan bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya monitoring dari masyarakat agar pelaksanaan program atau proyek berjalan sesuai tujuan yang diharapkan dan pada akhirnya dapat menguntungkan bagi masyarakat. Evaluasi bagi kelayakan program merupakan tindak lanjut dari monitoring suatu program. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi suatu program maka berguna untuk keefektifan program selanjutnya sehingga program yang akan dilaksanakan akan benar-benar efektif.

Bentuk partisipasi masyarakat adalah mau memantau jalannya program, mengkritisi kelebihan dan kekurangan program serta memelihara dan ikut mengembangkan suatu program supaya lebih berguna.

Partisipasi petani dapat diketahui berdasarkan perilaku nyata atau tindakan mereka dalam melakukan kegiatan. Perubahan pola partisipasi dari rendah menjadi tinggi mempunyai arti sebagai upaya pengambilan keputusan untuk menerima suatu inovasi atau suatu hal yang baru yang dapat merubah perilaku.

Berdasarkan alur teoritis di atas, maka secara skematis dapat dirumuskan kerangka pemikiran hubungan antara modal sosial Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) terhadap tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi yang tersaji pada gambar 1 di bawah ini :



Keterangan :   
 —————> menggambarkan hubungan   
 - - - - -> menggambarkan indikator

Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir

### 3.2 Hipotesis

Hipotesis yang dapat ditarik dari dalam penelitian ini diduga terdapat hubungan positif antara modal sosial Himpunan Petani Pamakai Air (HIPPA) terhadap tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi.

### 3.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam penelitian ini, maka akan dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) “Tirto Aji” di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri Kabupaten Nganjuk.
2. Penelitian ini dibatasi pada modal sosial Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) “Tirto Aji” di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri Kabupaten Nganjuk yang diukur melalui ketaatan pada kepercayaan, norma sosial dan jaringan kerjasama.
3. Penelitian ini dibatasi hanya pada partisipasi petani yang meliputi partisipasi dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring dan evaluasi.

### 3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### 3.4.1 Definisi Operasional

Agar terjadi keseragaman dalam menginterpretasikan pengertian tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini maka dapat dirumuskan definisi operasional sebagai berikut:



1. Modal sosial merupakan bentuk dari sumber daya yang pelakunya berhubungan langsung antara satu dengan yang lain dan membentuk suatu kelompok sosial. Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) merupakan suatu kelompok sosial yang terbentuk dari kumpulan anggota HIPPA. Modal sosial HIPPA dapat terjalin dengan baik apabila terdapat kepercayaan, norma sosial dan jaringan kerjasama antara anggota HIPPA dengan petani pemakai air.
  - a. Kepercayaan adalah suatu sikap atau tindakan dimana dapat mempercayai orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan senantiasa bertindak untuk saling mendukung.
  - b. Norma sosial adalah suatu peraturan yang diharapkan dapat dipatuhi dan diikuti oleh semua anggota HIPPA yang mengandung sanksi baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu konteks hubungan sosial.
  - c. Jaringan kerjasama adalah suatu hubungan yang didasari oleh sikap saling mempercayai dan saling membutuhkan untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan komunitas dengan menjalin hubungan kerjasama antara seseorang dengan pihak lain.
2. Partisipasi adalah keterikatan seseorang dalam suatu proses kegiatan secara sukarela atas kemauan sendiri tanpa adanya unsur paksaan. Jadi partisipasi dapat diartikan sebagai tingkat partisipasi petani dalam kegiatan pengelolaan air irigasi dapat dilihat dari partisipasi mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi dari kegiatan tersebut.

- a. Keikutsertaan petani dalam perencanaan kegiatan adalah keterlibatan petani dalam rapat penyusunan rencana kerja kelompok.
- b. Keikutsertaan dalam pelaksanaan adalah keterlibatan petani dalam pelaksanaan yang dilihat dari sejauh mana pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama.
- c. Keikutsertaan dalam memonitoring dan mengevaluasi adalah keterlibatan anggota dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan serta adanya tindak lanjut berupa pemanfaatan hasil kegiatan

### 3.4.2 Pengukuran Variabel

#### 3.4.2.1 Pengukuran Variabel Modal Sosial HIPPA

Variabelnya terdiri dari kepercayaan, norma sosial dan jaringan kerjasama.

**Tabel 1. Pengukuran Modal Sosial (X)**

No	Keterangan	Skor
<b>I</b>	<b>KEPERCAYAAN</b>	
1.	Kepercayaan yang diberikan anggota (pengurus HIPPA) kepada ketua HIPPA dalam menerima perintah	
	a. Mau melaksanakan perintah dan berkerjasama	3
	b. Mau melaksanakan perintah bila diminta	2
	c. Tidak mau melaksanakan perintah	1
2.	Kepercayaan yang diberikan anggota (petani) kepada pengurus HIPPA dalam menerima perintah	
	a. Mau melaksanakan perintah dan berkerjasama	3
	b. Mau melaksanakan perintah bila diminta	2
	c. Tidak mau melaksanakan perintah	1

3.	Hubungan ketua HIPPA dengan pengurus HIPPA a. Selalu berkerjasama dan mementingkan kepentingan sosial b. Selalu berkerjasama namun hanya untuk kepentingan individu c. Tidak pernah mau berkerjasama	3 2 1
4.	Hubungan ketua HIPPA dengan anggota (petani) a. Saling mendukung dan terbuka untuk kemajuan bersama b. Saling mendukung namun hubungannya saling tertutup c. Tidak saling mendukung dan terbuka	3 2 1
5.	Hubungan pengurus HIPPA dengan anggota (petani) a. Selalu ada koordinasi yang baik dan transfer informasi dari ketua HIPPA b. Jarang ada koordinasi dan transfer informasi dari ketua HIPPA c. Tidak pernah ada koordinasi maupun transfer informasi	3 2 1
6.	Hubungan antar pengurus HIPPA a. Baik (saling berkerjasama) b. Kurang baik (berkerjasama bila diminta oleh ketua HIPPA) c. Buruk (berjalan dengan sendiri-sendiri)	3 2 1
7.	Transfer informasi dari ketua HIPPA kepada anggota a. Informasi yang diterima petani baik b. Informasi yang diterima petani kurang baik c. Informasi yang diterima petani buruk	3 2 1
<b>Skor maksimal</b>		<b>21</b>
<b>Skor minimal</b>		<b>7</b>

**Keterangan Skor : 7 – 11,67 = Kategori Rendah**  
**11,68 – 16,35 = Kategori Sedang**  
**16,36 – 21 = Kategori Tinggi**

<b>II</b>	<b>NORMA SOSIAL</b>	
1.	Peraturan yang dibuat oleh HIPPA (tentang sanksi penyalahgunaan IPAIR dan penyelewengan air irigasi) a. Ada dan berjalan b. Ada namun tidak dijalankan c. Tidak ada peraturan	3 2 1
2.	Pandangan terhadap peraturan yang telah dibuat a. Menguntungkan b. Hanya menguntungkan sebagian pihak saja c. Merugikan semua pihak	3 2 1
3.	Ketaatan ketua HIPPA terhadap peraturan yang ada a. Tahu dan menaati peeraturan yang ada b. Tahu namun tidak menaati c. Tidak tahu	3 2 1

4.	Ketaatan pengurus HIPPA terhadap peraturan yang ada a. Tahu dan menaati peraturan yang ada b. Tahu namun tidak menaati c. Tidak tahu	3 2 1
5.	Ketaatan anggota (petani) terhadap peraturan yang ada a. Tahu dan menaati peraturan yang ada b. Tahu namun tidak menaati c. Tidak tahu	3 2 1
6.	Sanksi terhadap pelanggaran peraturan yang ada a. Ada dan berlaku bagi semua pihak b. Ada tetapi hanya berlaku bagi sebagian pihak c. Tidak ada sanksi	3 2 1
7.	Keadilan peraturan dalam mengatur hak dan kewajiban a. Adil (tidak ada pilih kasih bagi semua pihak) b. Kurang adil (hanya menguntungkan sebagian pihak) c. Tidak adil bagi semua pihak	3 2 1
8.	Pemberian sanksi bila ada yang melanggar peraturan a. Sesuai dengan tingkatan kesalahan b. Semua kesalahan di anggap sama c. Sesuai kemauan ketua HIPPA	3 2 1
<b>Skor maksimal</b>		<b>24</b>
<b>Skor minimal</b>		<b>8</b>

**Keterangan Skor : 8 – 13,33 = Kategori Rendah**  
**13,34 – 18,67 = Kategori Sedang**  
**18,68 – 24 = Kategori Tinggi**

<b>III</b>	<b>JARINGAN KERJASAMA</b>	
1.	Kerjasama antar anggota HIPPA a. Adanya kerjasama dan dukungan antar anggota HIPPA b. Adanya kerjasama antar anggota HIPPA namun tidak saling mendukung c. Tidak ada kerjasama dan dukungan	3 2 1
2.	Kerjasama antar anggota HIPPA dalam Gabungan HIPPA a. Adanya kerjasama dan dukungan antar anggota HIPPA b. Adanya kerjasama antar anggota HIPPA namun tidak saling mendukung c. Tidak ada kerjasama dan dukungan	3 2 1
3.	Kerjasama dengan kelompok tani a. Adanya kerjasama dan dukungan dengan kelompok tani b. Adanya kerjasama dengan kelompok tani namun tidak saling mendukung c. Tidak ada kerjasama dan dukungan	3 2 1

4.	Kerjasama dengan Petugas Penyuluh Lapang (PPL)	
	a. Adanya kerjasama dan dukungan dengan PPL	3
	b. Adanya kerjasama dengan PPL namun tidak saling mendukung	2
	c. Tidak ada kerjasama dan dukungan	1
5.	Kerjasama dengan Juru Pengairan	
	a. Adanya kerjasama dan dukungan dengan Juru Pengairan	3
	b. Adanya kerjasama dengan Juru Pengairan namun tidak saling mendukung	2
	c. Tidak ada kerjasama dan dukungan	1
6.	Kerjasama dengan Pemerintah Desa	
	a. Adanya kerjasama dan dukungan dengan Pemerintah Desa	3
	b. Adanya kerjasama dengan Pemerintah Desa namun tidak saling mendukung	2
	c. Tidak ada kerjasama dan dukungan	1
7.	Kerjasama dengan Dinas Pertanian	
	a. Adanya kerjasama dan dukungan dengan Dinas Pertanian	3
	b. Adanya kerjasama dengan Dinas Pertanian namun tidak saling mendukung	2
	c. Tidak ada kerjasama dan dukungan	1
8.	Kerjasama dengan Dinas Pengairan	
	a. Adanya kerjasama dan dukungan dengan Dinas Pengairan	3
	b. Adanya kerjasama dengan Dinas Pengairan namun tidak saling mendukung	2
	c. Tidak ada kerjasama dan dukungan	1
<b>Skor maksimal</b>		<b>24</b>
<b>Skor minimal</b>		<b>8</b>

**Keterangan Skor : 8 – 13,33 = Kategori Rendah**  
**13,34 – 18,67 = Kategori Sedang**  
**18,68 – 24 = Kategori Tinggi**

#### 3.4.2.2 Pengukuran Variabel Partisipasi Petani

Variabelnya terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, serta tahap monitoring dan evaluasi.

**Tabel 2. Pengukuran Variabel Partisipasi (Y)**

No	Keterangan	Skor
<b>I</b>	<b>TAHAP PERENCANAAN</b>	
1.	Keterlibatan anggota dalam rapat rencana tata tanam dan pola tanam <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota hadir dalam rapat dan mengikuti kesepakatan bersama</li> <li>b. Anggota hadir dalam rapat, namun tidak mengikuti kesepakatan bersama</li> <li>c. Anggota tidak hadir</li> </ul>	3 2 1
2.	Keterlibatan anggota dalam rapat perencanaan pembagian air <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota hadir dalam rapat dan mengikuti kesepakatan bersama</li> <li>b. Anggota hadir dalam rapat namun tidak mengikuti kesepakatan bersama</li> <li>c. Anggota tidak hadir</li> </ul>	3 2 1
3.	Keterlibatan anggota dalam rapat perencanaan pemeliharaan saluran irigasi <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota hadir dalam rapat dan memberi saran</li> <li>b. Anggota hadir namun tidak memberikan saran</li> <li>c. Anggota tidak hadir</li> </ul>	3 2 1
4.	Keterlibatan anggota dalam rapat perencanaan penentuan sarana yang dibutuhkan dalam pemeliharaan saluran <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota hadir dalam rapat dan memahami dengan baik</li> <li>b. Anggota hadir dalam rapat namun tidak memahami dengan baik</li> <li>c. Anggota tidak hadir</li> </ul>	3 2 1
5.	Keikutsertaan anggota dalam menyampaikan pendapat atau saran dalam rapat <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota hadir dalam rapat dan memberikan pendapat</li> <li>b. Anggota hadir dalam rapat namun tidak memberikan pendapat</li> <li>c. Anggota tidak hadir</li> </ul>	3 2 1
6	Keterlibatan anggota dalam penentuan besarnya IPAIR <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota terlibat langsung dan mengikuti kesepakatan bersama</li> <li>b. Anggota terlibat langsung namun tidak mengikuti kesepakatan bersama</li> <li>c. Anggota tidak pernah memberikan pendapat</li> </ul>	3 2 1

7.	Keterlibatan anggota dalam menyusun penggunaan dana IPAIR	
	a. Anggota terlibat langsung dan mengikuti kesepakatan bersama	3
	b. Anggota terlibat langsung namun tidak mengikuti kesepakatan bersama	2
	c. Anggota tidak pernah memberikan pendapat	1
<b>Skor maksimal</b>		<b>21</b>
<b>Skor minimal</b>		<b>7</b>

**Keterangan Skor : 7 – 11,67 = Kategori Rendah**  
**11,68 – 16,35 = Kategori Sedang**  
**16,36 – 21 = Kategori Tinggi**

<b>II.</b>	<b>TAHAP PELAKSANAAN</b>	
1	Keikutsertaan anggota dalam pelaksanaan tata tanam dan pola tanam	
	a. Anggota melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat	3
	b. Anggota melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat namun dengan terpaksa	2
	c. Anggota tidak mau melaksanakan	1
2.	Keikutsertaan anggota dalam pembangunan saluran air yang dilakukan secara gotong royong	
	a. Anggota ikut serta dalam kegiatan gotong royong	3
	b. Anggota jarang ikut serta	2
	c. Anggota tidak pernah ikut serta	1
3.	Keikutsertaan anggota dalam setiap kegiatan gotong royong membersihkan saluran air	
	a. Anggota ikut serta dalam kegiatan gotong royong	3
	b. Anggota jarang ikut serta	2
	c. Anggota tidak pernah ikut serta	1
4.	Kehadiran anggota dalam setiap pertemuan rutin kelompok	
	a. Ya, selalu (> dari 60%)	3
	b. Kadang – kadang (30% sampai 60%)	2
	c. Tidak pernah (< dari 30%)	1
5.	Kehadiran anggota dalam pelatihan yang diberikan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)	
	a. Ya, selalu (> dari 60%)	3
	b. Kadang – kadang (30% sampai 60%)	2
	c. Tidak pernah (< dari 30%)	1
6.	Kedisiplinan anggota dalam membayar IPAIR	
	a. Anggota selalu membayar tepat waktu	3
	b. Anggota jarang membayar tepat waktu	2
	c. Anggota tidak pernah membayar IPAIR	1

7.	Pembayaran IPAIR yang dilakukan oleh anggota	
	a. Sesuai dengan besar yang ditentukan	3
	b. Kadang-kadang tidak sesuai besar yang ditentukan	2
	c. Tidak pernah membayar IPAIR	1
<b>Skor maksimal</b>		<b>21</b>
<b>Skor minimal</b>		<b>7</b>

**Keterangan Skor : 7 – 11,67 = Kategori Rendah**  
**11,68 – 16,35 = Kategori Sedang**  
**16,36 – 21 = Kategori Tinggi**

<b>III</b>	<b>TAHAP MONITORING DAN EVALUASI</b>	
1.	Hasil kegiatan pembagian air irigasi	
	a. Sukses dilihat dari semua anggota menerima jatah air dengan adil dan merata	3
	b. Kurang sukses dilihat dari adanya sebagian anggota yang dirugikan dalam pembagian air	2
	c. Tidak sukses dilihat dari semua anggota dirugikan	1
2.	Pelaporan adanya kendala kurangnya pasokan air	
	a. Anggota melakukan pelaporan secara kontinyu	3
	b. Anggota melakukan pelaporan namun tidak kontinyu	2
	c. Anggota tidak melakukan pelaporan adanya kendala	1
3.	Kegiatan monitoring yang dilakukan HIPPA (bagian teknis) terhadap pembagian air	
	a. Setiap kali pembagian air	3
	b. Setiap bulan sekali	2
	c. Tidak pernah	1
4.	Kehadiran anggota dalam rapat evaluasi kerja HIPPA yang sudah dilakukan	
	a. Sering (> dari 60%)	3
	b. Jarang (30% sampai 60%)	2
	c. Tidak pernah (< dari 30%)	1
5.	Kehadiran anggota dalam rapat evaluasi kerja HIPPA yang akan dilakukan	
	a. Sering (> dari 60%)	3
	b. Jarang (30% sampai 60%)	2
	c. Tidak pernah (< dari 30%)	1
6.	Evaluasi pembayaran IPAIR dari anggota	
	a. 75% - 100%	3
	b. 50% - 75%	2
	c. Kurang dari 50%	1
7.	Penggunaan alokasi dana IPAIR	
	a. Sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat	3
	b. Sebagian ada yang menyimpang dari kesepakatan	2
	c. Tidak ada yang sesuai dengan kesepakatan	1
<b>Skor maksimal</b>		<b>21</b>
<b>Skor minimal</b>		<b>7</b>

**Keterangan Skor : 7 – 11,67 = Kategori Rendah**  
**11,68 – 16,35 = Kategori Sedang**  
**16,36 – 21 = Kategori Tinggi**



## IV. METODE PENELITIAN

### 4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*) yaitu jenis penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel – variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian fokus penelitian penjelasan terletak pada penjelasan hubungan-hubungan antar variabel. Hidayat (1989). Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara Modal Sosial Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) terhadap tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi.

### 4.2 Penentuan Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) pada Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) “Tirto Aji” yang meliputi Daerah Irigasi Widas Tingkat Jaringan Irigasi Ngudikan Kiri dengan luas areal 657 Ha. Penelitian dilakukan di lokasi tersebut karena pada lokasi tersebut merupakan Gabungan HIPPA yang memiliki areal yang cukup luas (657 Ha) dan meliputi wilayah kecamatan Bagor, Rejoso dan Nganjuk.

### 4.3 Teknik Sampling

Penelitian tentang Hubungan Antara Modal Sosial Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) terhadap Tingkat Partisipasi Petani dalam Pengelolaan Air Irigasi di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri Kabupaten Nganjuk menggunakan metode penelitian *Multistage Random Sampling* (teknik random bertahap), yaitu penelitian yang mengambil sampel dengan menggunakan dua tahap atau lebih. Populasi dibagi-bagi dalam lapisan, kemudian sejumlah lapisan dipilih (tahap pertama). Setiap lapisan yang dipilih dibagi-bagi dalam kelompok. Dari setiap lapisan yang dipilih pada tahap pertama, dipilih lagi sejumlah kelompok (tahap kedua). Begitulah seterusnya dengan seberapa tahap berikutnya (Hidayat,1989). Metode ini dipilih karena pada Gabungan HIPPA “Tirto Aji” terdapat 11 desa yang tersebar dalam 3 kecamatan dengan populasi 1201 orang petani.

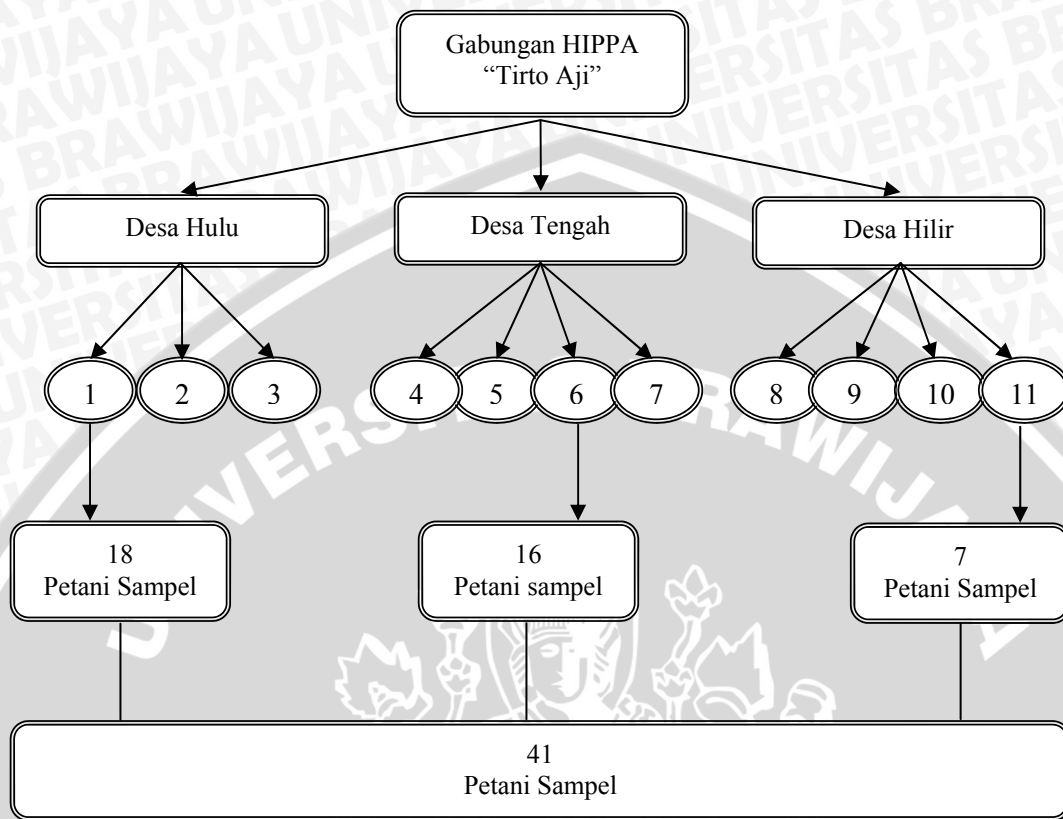
Untuk menentukan sampel yang akan di ambil, berikut adalah tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti, antara lain :

1. Tahap pertama adalah membagi populasi ke dalam tiga lapisan, yaitu desa Hulu, desa Tengah dan desa Hilir.
2. Tahap kedua adalah mengambil sampel HIPPA dari masing-masing lapisan desa dengan sampel secara random. Beberapa HIPPA yang digunakan sebagai sampel, antara lain HIPPA desa Banarankulon, HIPPA desa Gemenggeng dan HIPPA desa Kedungdowo. Dari ke tiga HIPPA tersebut digunakan sebagai sampel dengan alasan mewakili HIPPA dari masing-masing lapisan Hulu,

Tengah dan Hilir. Dengan jumlah dari desa Banarankulon 118 orang petani, desa Gemenggeng 106 orang petani dan desa Kedungdowo 44 orang petani.

3. Kemudian tahap terakhir adalah menentukan petani sampel dari masing-masing desa dengan metode random. Dari setiap kelompok yang menjadi sampel diambil petani sebanyak 15% dari anggota populasi desa. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (1997), dalam teknik pengambilan sampel secara random bahwa jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15%, atau 20-25% atau lebih. Jadi sampel sebesar 15% diharapkan cukup representatif untuk memperoleh data berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Dari perhitungan tersebut didapatkan sampel sebesar 41 orang petani dari jumlah populasi sebanyak 1201 orang petani.

Dari tahapan-tahapan diatas dapat diketahui bahwa untuk memperoleh jumlah sampel 41 petani sampel dari total populasi GHIPPA sebanyak 1201 petani adalah dengan menggunakan metode *Multistage Random Sampling*. Adapun urutan pengambilan sampel dapat dilihat pada gambar 2 skema berikut ini:



Keterangan Desa:

- 1 : HIPPA Desa Banarankulon Kecamatan Bagor
- 2 : HIPPA Desa Banaranwetan Kecamatan Bagor
- 3 : HIPPA Desa Sidokare Kecamatan Rejoso
- 4 : HIPPA Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor
- 5 : HIPPA Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso
- 6 : HIPPA Desa Gemenggeng Kecamatan Bagor
- 7 : HIPPA Desa Mungkung Kecamatan Rejoso
- 8 : HIPPA Desa Setren Kecamatan Rejoso
- 9 : HIPPA Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso
- 10 : HIPPA Desa Gempol Kecamatan Rejoso
- 11 : HIPPA Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk

Gambar 2. Skema Teknik Sampling dengan *Multistage Random Sampling*

#### 4.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari responden. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen, laporan atau data-data yang ada pada Gabungan HIPPA “Tirto Aji”. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

##### 4.4.1 Wawancara

a. Wawancara terstruktur (dengan menggunakan kuisisioner)

Wawancara terstruktur adalah pengumpulan data dengan menggunakan kuisisioner yaitu yang berbentuk daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis untuk memperoleh jawaban dari sampel berupa data yang berkaitan dengan penelitian. Kuisisioner ini akan diberikan kepada petani untuk diisi, peneliti akan mendampingi petani dalam pengisian kuisisioner, dimana apabila ada pertanyaan yang kurang dimengerti oleh petani dapat langsung dijelaskan oleh peneliti. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer tentang modal sosial serta partisipasi petani.

b. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara mendalam ini dalam bentuk diskusi terfokus dengan mengangkat topik-topik tertentu yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi untuk memperjelas kuisisioner (alasan responden memilih jawaban tersebut) yang dilakukan dengan bertatap muka dengan petani secara langsung.

#### 4.4.2 Observasi

Observasi ini merupakan pengamatan peneliti secara langsung kepada objek yang diteliti guna memperoleh data situasi di daerah penelitian. Menurut Marshall (1995) dalam Sugiyono (2008) menyatakan bahwa melalui observasi peneliti bisa belajar perilaku dan makna perilaku tersebut. Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, pendengaran, peraba dan pengecap. Dalam hal ini dilakukan untuk memperoleh data primer dan memberikan data-data tambahan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara. Sehingga peneliti dapat mengamati secara langsung partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi.

#### 4.4.3 Dokumentasi

Peneliti menggunakan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari beberapa dokumen baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang diperoleh dari lokasi penelitian, literatur dan hasil penelitian sebelumnya. Data yang diambil bertujuan untuk memperoleh data sekunder.

### 4.5 Teknik Analisis Data

#### 4.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis ini digunakan Analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menjelaskan suatu fenomena atau kenyataan yang ada dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Deskriptif kualitatif menggunakan bantuan alat kuantitatif melalui pemberian skor. Tahap-tahap yang digunakan antara lain :

### 1. Menentukan kelas (K)

Kelas yang ditetapkan untuk masing-masing variabel adalah 3 kelas ( $K=3$ ), yaitu tinggi, sedang dan rendah.

### 2. Menentukan kisaran (R)

Kisaran adalah selisih antara nilai pengamatan (skor) tertinggi dan nilai pengamatan terendah. kisaran didapatkan dari persamaan sebagai berikut :

$$R = X_1 - X_2$$

Keterangan :

R = kisaran

$X_1$  = nilai (skor) tertinggi untuk setiap sub variabel

$X_2$  = nilai (skor) terendah untuk setiap sub variabel

### 3. Menentukan selang kelas (I)

Selang kelas adalah jarak atau besarnya nilai antar kelas yang telah ditentukan. Besarnya selang kelas didapatkan berdasarkan persamaan :

$$I = \frac{R}{K}$$

Keterangan :

I = selang kelas

R = kisaran

K = banyaknya kelas

#### 4.5.2 Korelasi Rank Spearman

Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi Rank Spearman ( $r_s$ ). Perhitungan ini digunakan untuk menguji adanya hubungan antara modal sosial HIPPA dalam Gabungan HIPPA terhadap tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi.

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum di^2}{N^3 - N}$$

Keterangan:

$r_s$  = Koefisien korelasi Rank Spearman

$di^2$  = Disparitas (simpangan atau selisih Rangkaing)

N = Jumlah sampel

Bilamana ada banyak nilai Rank yang sama maka menggunakan faktor koreksi. Rumus faktor koreksi menurut Siegel (1992), sebagai berikut:

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

Dimana t merupakan banyaknya observasi yang berangka sama pada suatu ranking tertentu. Apabila proporsi angka sama besar maka harus dipergunakan faktor koreksi dalam perhitungan  $r_s$ .

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d^2}{2\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

Dimana

$$\sum x^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum T_x$$

$$\sum y^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum T_y$$



Dengan  $\sum T$  menunjukkan jumlah berbagai harga T untuk semua kelompok yang berlainan yang memiliki observasi berangka sama. Jika harga  $N > 10$  maka uji signifikansi terhadap nilai  $r_s$  yang diperoleh dapat diujikan dengan menghitung besarnya nilai t terlebih dahulu dengan rumus berikut:

$$t_{hit} = r_s \sqrt{\frac{n-2}{1-r_s^2}}$$

Keterangan:  $t_{hit}$  = Tingkat signifikansi

$r_s$  = Koefisien korelasi Rank Spearman

$n$  = Jumlah sampel

Uji  $t_{hit}$  dilakukan dengan menggunakan  $db = n-2$  pada selang kepercayaan 95% dengan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,042 dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05.

a. Hipotesis:

1.  $H_0 : \rho_s = 0$  berarti tidak terdapat hubungan / korelasi positif antara modal sosial Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) terhadap tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi.
2.  $H_1 : \rho_s \neq 0$  berarti terdapat hubungan / korelasi positif antara modal sosial Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) terhadap tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi.

b. Kaidah pengujian

1. Jika  $t_{hit} \leq t_{tab}$  maka terima  $H_0$ , artinya tidak terdapat korelasi positif antara modal sosial Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) terhadap tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi.
2. Jika  $t_{hit} > t_{tab}$  maka tolak  $H_0$ , artinya terdapat korelasi positif antara modal sosial Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) terhadap tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi.



## V. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

### 5.1 Keadaan Wilayah

Gabungan HIPPA “Tirto Aji” mempunyai wilayah kerja yang meliputi Daerah Irigasi Ngudikan Kiri dengan luas areal 657 Ha. Gabungan HIPPA “Tirto Aji” terletak pada ketinggian 60 meter diatas permukaan laut, jarak terhadap pusat pemerintahan Ibu Kota Kecamatan 5 Km, Ibu Kota Kabupaten 15 Km dan Ibu Kota Propinsi 125 Km.

Gabungan HIPPA “Tirto Aji” berbatasan dengan beberapa wilayah. Batas wilayah secara administratif adalah :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Rejoso
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Brebek
3. Sebelah Barat : Kecamatan Wilangan
4. Sebelah Timur : Kecamatan Sukomoro

### 5.2 Keadaan Penduduk

#### 5.2.1 Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Keadaan penduduk di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri.

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	15.106	49,52
2.	Perempuan	15.400	50,48
<b>Total</b>		<b>30.506</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Monografi GHIPPA “Tirto Aji”, 2009.

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa keadaan penduduk di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri berdasarkan jenis kelamin yaitu untuk laki-laki 15.106 jiwa atau 49,52 % dan untuk perempuan 15.400 jiwa atau 50,48 %. Hal ini berarti bahwa angka kelahiran penduduk dengan jenis kelamin perempuan lebih besar bila dibandingkan dengan angka kelahiran penduduk dengan jenis kelamin laki-laki.

### 5.2.2 Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur

Keadaan penduduk di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri.

No	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	0 – 18	7.625	24,99
2.	19 – 35	6.100	20,00
3.	36 – 55	9.266	30,38
4.	> 56	7.515	24,63
<b>Total</b>		<b>30.506</b>	<b>100</b>

Sumber : Monografi GHIPPA “Tirto Aji” dan Wawancara, 2009.

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa keadaan penduduk berdasarkan umur di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri didominasi oleh penduduk yang produktif untuk mengelola sawahnya (bertani) yaitu pada umur 36-55 tahun yaitu sebanyak 9.266 jiwa dengan persentase 30,38%. Kemudian pada urutan kedua diduduki oleh penduduk yang berumur 0-18 tahun sebanyak 7.625 jiwa dengan persentase 24,99%, pada umur ini penduduk termasuk dalam golongan muda yang tidak produktif, dan penghidupan mereka tergantung pada penduduk yang produktif. Kemudian urutan selanjutnya diduduki oleh penduduk yang berumur >56 tahun sebanyak 7.515 jiwa dengan presentase 24,63%, pada usia ini penduduk lebih

banyak untuk memilih istirahat atau mengurangi aktivitas bekerjanya karena faktor usia. Pada urutan terakhir diduduki pada umur 19-35 tahun sebesar 6.100 jiwa atau 20%, pada usia sekian penduduk lebih giat bekerja karena faktor usia yang masih muda dan mempunyai fisik yang kuat.

### 5.2.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keadaan penduduk di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah tamat SLTP/ sederajat sebesar 7.986 jiwa atau 35,05% dari jumlah keseluruhan penduduk. Setelah itu penduduk dengan tingkat pendidikan tamat SLTA/ sederajat sebesar 5.231 jiwa atau 22,96%, dan diikuti oleh penduduk dengan tingkat pendidikan tamat SD/ sederajat sebesar 4.745 jiwa atau 20,83%. Kemudian penduduk dengan tingkat pendidikan tidak tamat SD/ sederajat sebesar 2.506 jiwa atau 10,99%. Dan penduduk dengan tingkat pendidikan tamat akademi dan perguruan tinggi sebesar 2.317 jiwa atau 10,17 %.

Keadaan penduduk di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri.

No	Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Tidak tamat SD/ Sederajat	2.506	10,99
2.	Tamat SD/ Sederajat	4.745	20,83
3.	Tamat SLTP/ Sederajat	7.986	35,05
4.	Tamat SLTA/ Sederajat	5.231	22,96
5.	Tamat Sarjana	2.317	10,17
<b>Total</b>		22.785	100,00

Sumber : Monografi Gabungan HIPPA "Tirto Aji" dan wawancara, 2009.

Dari tabel 5 tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan penduduk di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri adalah lulusan SLTP. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri telah memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi dan telah memenuhi wajib belajar 9 tahun sesuai dengan yang telah dianjurkan oleh pemerintah.

#### 5.2.4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Keadaan penduduk berdasarkan mata pencarian di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri.

No	Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Pegawai Negeri Sipil	528	2,73
2.	ABRI	71	0,37
3.	Swasta	1.105	5,72
4.	Pedagang	703	3,64
5.	Konstruksi	259	1,34
6.	Petani	5.928	30,67
7.	Buruh Tani	8.692	44,98
8.	Peternak	1.175	6,08
9.	Lain-lain	864	4,47
<b>Total</b>		<b>19.325</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Monografi Gabungan HIPPA "Tirto Aji", 2009.

Dari tabel 6 dapat diketahui gambaran mata pencarian penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang paling tinggi ada pada sektor pertanian (petani dan buruh tani) yaitu sebanyak 14.620 jiwa atau 75,65%, urutan kedua adalah pada peternak sebanyak 1.175 jiwa atau sebesar 6,08%, urutan ketiga adalah pekerja swasta yaitu sebanyak 1.105 jiwa atau sebesar 5,72%, urutan

keempat adalah pedagang sebesar 703 jiwa atau 3,64%, urutan kelima adalah pegawai negeri sipil sebesar 528 jiwa atau sebesar 2,73%, urutan ketujuh adalah pada konstruksi sebesar 259 jiwa atau 1,34%. Dan yang terakhir ada pada ABRI yaitu sebesar 71 jiwa atau sebesar 0,37% dari penduduk usia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri sebagian besar adalah petani, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa penduduk di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri mayoritas berpenghasilan dari usaha tani yang mereka kelola dan kembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka sehari-hari. Selain itu daerah tersebut merupakan wilayah pedesaan dengan lahan pertanian yang cukup luas.

### 5.3 Keadaan Pertanian

#### 5.3.1 Luas Lahan

Luas lahan ada di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri adalah seluas 657 Ha dalam bentuk sawah irigasi yang terbagi dalam 11 desa.

Tabel 7. Luas lahan di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri.

No	Anggota HIPPA	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Desa Banaran kulon	25	3,80
2.	Desa Kendalrejo	50	7,61
3.	Desa Gemenggeng	51	7,76
4.	Desa Banaran wetan	4	0,61
5.	Desa Sidokare	112	17,05
6.	Desa Sukorejo	152	23,13
7.	Desa Mojorembun	50	7,61
8.	Desa Setren	42	6,39
9.	Desa Mungkung	77	11,72
10.	Desa Gempol	54	8,22
11.	Desa Kedungdowo	40	6,10
<b>Total</b>		657	100,00

Sumber : Monografi Gabungan HIPPA "Tirto Aji", 2009.

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa luas lahan di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri yang paling luas diduduki oleh Desa Sukorejo dengan luas 157 Ha atau dengan presentase 23, 13% dari total seluruh wilayah yang ada di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri. Urutan kedua diduduki oleh desa Sidokare dengan luas 112 Ha atau dengan presentase 17,05%. Urutan ketiga diduduki oleh desa Mungkung dengan luas 77 Ha atau dengan presentase 11,72%. Urutan keempat diduduki oleh desa Gempol dengan luas 54 Ha atau dengan presentase 8,22%. Urutan kelima diduduki oleh desa Gemenggeng dengan luas 51 Ha atau dengan presentase 7,76%. Urutan keenam diduduki oleh 2 desa yaitu desa Mojorembun dan desa Kendalrejo dengan masing-masing luas 50 Ha atau dengan presentase 7,61%. Urutan ketujuh diduduki oleh desa Setren dengan luas 42 Ha atau dengan presentase 6,39%. Urutan kedelapan diduduki oleh desa Kedungdowo dengan luas 40 Ha atau dengan presentase 6,10%. Urutan kesembilan diduduki oleh desa Banarankulon dengan luas 25 Ha atau dengan presentase 3,80%. Dan Urutan terakhir diduduki oleh desa Banaranwetan dengan luas 4 Ha atau dengan presentase 0,61%.

### **5.3.2 Luas Tanam dan Produksinya**

Luas tanam di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri seutuhnya dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai macam komoditas pertanian guna mencukupi kebutuhan masyarakat setempat. Adapun rincian luas tanam dan komoditas pertanian serta produksinya dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini.



Tabel 8. Luas Tanam dan Produksinya di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri.

No	Jenis Komoditi	Luas Tanam (ha)	Produksi (ton)	Bentuk Produksi
1	Palawija			
	a. Kedelai	657	985	Polong
	b. Jagung	260	910	Pipilan
2	Padi	657	5.256	Gabah
3	Bawang merah	657	13.797	Umbi

Sumber : Monografi Gabungan HIPPA "Tirto Aji", 2009.

Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa luas tanam tertinggi pada komoditi bawang merah seluas 657 ha dengan produksi 13.797 ton dengan bentuk produksi berupa umbi. Pada tanaman padi dengan luas 657 ha dengan tingkat produksi 5.256 ton dengan bentuk produksi berupa gabah. Pada tanaman palawija yang paling tinggi adalah komoditi kedelai dengan luas 657 ha dengan produksi 985 ton dengan bentuk produksi berupa polong. Sedangkan untuk komoditi Jagung dengan luas tanam 260 Ha dapat menghasilkan produksi 910 ton dalam bentuk pipilan.

### 5.3.3 Pola Tanam

Pola tanam yang diterapkan di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri adalah pola tanam di sawah. Dengan adanya pola tanam ini dapat diketahui kapan waktu tanam yang bisanya diterapkan oleh petani untuk lahan usahatannya.

Pada pola tanam di sawah yang paling dominan ditanam adalah tanaman bawang merah, namun adakalanya petani juga menanam padi atau kedelai. Untuk pola tanam dapat dilihat sebagai berikut:

### I. Pola tanam I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Padi			Kedelai			Bawang merah			Bawang merah		

### II. Pola tanam II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bawang merah			kedelai			Bawang merah			Bawang merah		

### III. Pola tanam III

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Padi			Kedelai			Bawang merah			Jagung		

Sumber : Monorafi Gabungan HIPPA "Tirto Aji", 2009.

Gambar 3. Pola Tanam

Pola tanam diatas diterapkan petani sesuai dengan keadaan yang terjadi pada saat itu. Pada pola tanam I pada bulan ke 7 sampai bulan 12 ditanami bawang merah dan pada bulan lain ditanami padi dan kedelai. Pada pola tanam II hampir sepanjang tahun ditanami bawang merah kecuali bulan 4 sampai bulan 6 ditanami kedelai. Pada pola tanam III hanya pada bulan 7 dan bulan 9 ditanami bawang merah, pada bulan yang lain ditanami padi, kedelai ataupun jagung sesuai dengan ketersediaan air. Jika ketersediaan air mencukupi petani lebih baik mengusahakan tanaman bawang merah. Akan tetapi bila ketersediaan air kurang memadai mereka menanam jagung ataupun kedelai.

#### 5.3.4 Debit Air

Debit air Daerah Irigasi Ngudikan Kiri berbeda-beda jumlahnya dalam tiap bulan. Pada bulan Desember, Januari, Februari, Maret dan April debit air 500 liter/detik, sedangkan pada bulan Mei, Juni dan Juli debit air sebanyak 400

liter/detik. Selanjutnya pada bulan Agustus jumlah debit airnya turun lagi tinggal 350 liter/detik, dan bulan September jumlah debit air tinggal 150 liter/detik. Sedangkan pada bulan Oktober dan November tidak ada debit air.

Berikut adalah kalender debit air Daerah Irigasi Ngudikan Kiri.

12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
500 lt/dtk				400 lt/dt			350 lt/dtk		150 lt/dtk		0 lt/dtk	

Sumber : Monorafi Gabungan HIPPA "Tirto Aji", 2009.

Gambar 4. Kalender Debit Air di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri.

### 5.3.5 Curah Hujan

Selain air dari saluran irigasi petani juga mengandalkan air hujan untuk kebutuhan air sawahnya. Stasiun curah hujan yang paling dekat dengan Stasiun Ngudikan. Curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Maret dengan curah hujan 521 mm atau dengan presentase 30,10% dari total keseluruhan 1 tahun 2008. Urutan kedua terjadi pada bulan November dengan curah hujan 359 mm atau dengan presentase 20,74%. Urutan ketiga terjadi pada bulan Desember dengan curah hujan 221 mm atau dengan presentase 12,77%. Urutan keempat terjadi pada bulan Januari dengan curah hujan 189 mm atau dengan presentase 10,82%. Urutan kelima terjadi pada bulan April dengan curah hujan 185 mm atau dengan presentase 10,78%. Urutan keenam terjadi pada bulan Februari dan Mei dengan curah hujan 103 mm atau dengan presentase 5,95%. Dan urutan terakhir terjadi pada bulan Oktober dengan curah hujan 50 mm atau dengan presentase 2,89%. Sedangkan pada bulan Juni, Juli, Agustus dan September tidak terjadi hujan.

Adapun rincian Curah Hujan pada Stasiun Ngudikan dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini :

Tabel 9. Data Curah Hujan pada Stasiun Ngudikan per Tahun 2008.

No	Bulan	Total Curah Hujan (mm)	Presentase (%)
1	Januari	189	10,82
2	Februari	103	5,95
3	Maret	521	30,10
4	April	185	10,78
5	Mei	103	5,95
6	Juni	0	0
7	Juli	0	0
8	Agustus	0	0
9	September	0	0
10	Oktober	50	2,89
11	November	359	20,74
12	Desember	221	12,77
	Total	1.731	100

Sumber : Dinas Pengairan, 2009.

### 5.3.6 Kondisi Jaringan Irigasi

Kondisi jaringan irigasi di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri cukup baik, hal tersebut disebabkan oleh Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan secara rutin. Jaringan irigasi di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri meliputi saluran irigasi dan bangunan irigasi. Saluran irigasi yang ada di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri antara lain: Saluran primer dengan panjang 3.534 meter, saluran sekunder dengan panjang 4.042 meter dan saluran tersier yang menghubungkan langsung ke sawah-sawah petani. Sedangkan bangunan irigasi yang ada di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri adalah 1 unit Dam Primer Ngudikan Kiri, 4 unit Dam Sekunder yang terbagi dalam 4 desa yaitu Dam Banaran, Dam Sidokare, Dam Gemenggeng dan Dam Mungking. Dari Dam Saluran Sekunder tersebut

kemudian terhubung ke saluran-saluran tersier dengan 31 balok sekat atau pintu air yang menghubungkan ke sawah-sawah petani.



Gambar 5. Dam Ngudikan Kiri (Saluran Primer)



Gambar 6. Dam Sidokare (Saluran Sekunder)

## VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 6.1 Deskripsi Modal Sosial HIPPA

Modal Sosial dalam HIPPA merupakan kemampuan pengurus maupun anggota HIPPA untuk bekerjasama dengan berlandaskan kepercayaan untuk membangun suatu jaringan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Modal Sosial tidak dibangun dalam satu individu, melainkan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat (Fukuyama, 1999). Pada penelitian ini, indikator modal sosial meliputi kepercayaan, norma sosial serta jaringan kerjasama. Modal sosial diukur dengan skoring pada setiap tingkatnya serta menjadikannya 3 kategori yaitu modal sosial rendah, sedang, dan tinggi. Secara rinci, modal sosial dalam HIPPA akan dijelaskan sebagai berikut :

#### 6.1.1 Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu tindakan dimana dapat mempercayai orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan senantiasa bertindak untuk saling mendukung antara petani, pengurus dan ketua HIPPA. Adapun penjelasan untuk tiap indikator kepercayaan antara anggota (petani) terhadap ketua dan pengurus HIPPA dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini:

Tabel 10. Skor Kepercayaan anggota Gabungan HIPPA "Tirto Aji", 2009.

No	Indikator	Skor maks	Skor yang dicapai	% terhadap skor maksimal	Kategori
1	Kepercayaan yang diberikan pengurus kepada ketua HIPPA	3	2,83	94,33	Tinggi
2	Kepercayaan yang diberikan petani kepada ketua HIPPA	3	2,80	93,33	Tinggi
3	Hubungan antara Ketua dengan Pengurus HIPPA	3	2,93	97,66	Tinggi
4	Hubungan antara Ketua HIPPA dengan Petani	3	2,85	95	Tinggi
5	Hubungan Pengurus HIPPA dengan Petani	3	3	100	Tinggi
6	Hubungan antar Pengurus HIPPA	3	2,93	97,66	Tinggi
7	Transfer informasi dari Ketua HIPPA kepada Petani	3	2,88	96	Tinggi
	Jumlah	21	20,23	96,33	Tinggi

Sumber : Analisis data primer

Keterangan :

Rendah 7 - 11,67 (33,33% - 55,57%)

Sedang 11,68 - 16,35 (55,58% - 77,86%)

Tinggi 16,36 - 21 ( 77,87% - 100%)

Dari tabel 10 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan tingkat kepercayaan anggota (petani) terhadap ketua dan pengurus HIPPA tergolong dalam kategori tinggi yaitu 20,23 atau 96,33%. Hal ini karena unsur kepercayaan yang tinggi antara sesama anggota dan pengurus kelompok, sehingga anggota (petani) selalu terbuka kepada ketua serta dengan pengurus, selain itu transfer informasi juga terus berjalan baik dari ketua maupun dari pengurus melalui pertemuan rutin sehingga mereka dapat saling bertukar informasi.

Dari hasil pengamatan di lapang, kepercayaan petani kepada ketuanya adalah dengan pemberian teladan dan pelayanan yang baik kepada anggotanya untuk ikut serta merawat saluran irigasi. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Paidi selaku anggota HIPPA Banaran Kulon dalam wawancara yang dilakukan tanggal 15 Mei 2009:

*“Nek aku dewe yo percoyo ae mas opo seng diomongne pak Lasidi, masalahe wong’e wes 3 taon luweh dadi ketua HIPPA. Lan wong’e iku bener-bener iso merjuangne banyu gae petani koyok aku iki. Biyen iku sakdurung’e dibentok HIPPA wong-wong podo rebutan banyu mas, malah sampek gelot barang...”*

“Kalau saya pribadi percaya mas dengan yang diperintahkan pak Lasidi, karena orangnya sudah 3 tahun lebih menjadi ketua HIPPA. Dan pak Lasidi benar-benar bisa mencukupi kebutuhan air bagi petani seperti saya ini. Dulu itu sebelum dibentuk HIPPA orang-orang rebutan air mas, dan juga malah sampai berantem...”

Dengan dibentuknya HIPPA, pembagian air dapat bergilir dan penggunaannya bisa efisien, sehingga kepercayaan yang diberikan petani kepada ketua sangat tinggi karena ketua dan pengurus HIPPA dapat mengelola dengan baik pembagian air irigasi.

### 6.1.2 Norma Sosial

Norma sosial adalah suatu peraturan yang diharapkan dapat dipatuhi dan diikuti oleh semua anggota HIPPA yang mengandung sanksi baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu konteks hubungan sosial. Norma / aturan sangat



berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat.

Dari hasil pengamatan di lapang, secara keseluruhan ketaatan anggota terhadap norma sosial tergolong tinggi yaitu 22,58 atau 94,08% dari skor maksimal. Hal ini karena dalam Gabungan HIPPA “Tirto Aji” terdapat aturan yang telah disepakati bersama serta kesadaran yang cukup tinggi dari masing-masing anggota (baik ketua, pengurus dan petani) untuk melaksanakan aturan tersebut beserta sanksi-sanksi yang mengikutinya. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Mujiran selaku anggota HIPPA Gemenggeng dalam wawancara yang dilakukan tanggal 19 Mei 2009:

*“Peraturan yo mesti enek mas, nek gak enek wong-wong nek yo podo rebutan banyu meneh koyok biyen sakdurung’e dibentok HIPPA. Karo ndene peraturan kan yo digawe kanggo apik’e kabeh...”*

“Peraturan ya pasti ada mas, kalau tidak ada orang-orang akan berebut air lagi seperti dulu sebelum dibentuk HIPPA. Selain itu peraturan juga dibuat untuk kebaikan bersama...”

Secara terperinci dijelaskan pada tabel 11 berikut ini:

Tabel 11. Skor Norma Sosial pada anggota Gabungan HIPPA "Tirto Aji", 2009.

No	Indikator	Skor maks	Skor yang dicapai	% terhadap skor maksimal	Kategori
1	Peraturan yang dibuat oleh HIPPA	3	3	100	Tinggi
2	Pandangan terhadap peraturan yang telah dibuat	3	3	100	Tinggi
3	Ketaatan Ketua HIPPA terhadap peraturan yang ada	3	2,51	83,67	Tinggi
4	Ketaatan Pengurus HIPPA terhadap peraturan yang ada	3	2,51	83,67	Tinggi
5	Ketaatan petani terhadap peraturan yang ada	3	2,80	93,33	Tinggi
6	Sanksi terhadap pelanggaran peraturan	3	2,85	95	Tinggi
7	Keadilan peraturan dalam mengatur hak dan kewajiban semua pihak	3	2,93	97,66	Tinggi
8	Pemberian sanksi terhadap pelanggaran	3	2,97	99	Tinggi
	Jumlah	24	22,58	94,08	Tinggi

Sumber : Analisis data primer

Keterangan :

Rendah = 8 – 13,33 atau (33,33% - 55,54%)

Sedang = 13,34 – 18,67 atau (55,58% - 77,79%)

Tinggi = 18,68 – 24 atau (77,83% - 100%)

Peraturan-peraturan yang ada dalam Gabungan HIPPA "Tirto Aji" tersebut disertai dengan sanksi-sanksi sebagai imbalan dari pelanggaran dari aturan yang berlaku. Sanksi yang berlaku dalam Gabungan HIPPA "Tirto Aji" apabila ada anggota yang melakukan pencurian air (jadwal gilir) antara lain bagi anggota yang menunggak pembayaran iuran wajib dikenakan denda sebesar 10%

dari jumlah iuran yang harus dibayarkan, pencurian air dari anggota lain dikenakan sanksi berupa tidak diberi air pada giliran berikutnya, dan apabila dilakukan 3 kali pelanggaran yang sama akan dikeluarkan dari keanggotaan GHIPPA, pengrusakan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapanya dikenakan sanksi berupa memperbaiki kembali seperti keadaan semula. Dengan adanya sanksi yang mendidik tersebut membuat anggota lebih waspada dan selalu berusaha untuk mematuhi aturan tersebut.

### 6.1.3 Jaringan Kerjasama

Jaringan kerjasama adalah suatu hubungan yang didasari oleh sikap saling mempercayai dan saling membutuhkan untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan komunitas dengan menjalin hubungan kerjasama antara seseorang dengan pihak lain.

Jaringan kerjasama terbentuk berdasarkan kepentingan atau ketertarikan individu secara prinsip atau pemikiran. Jaringan kerjasama di Gabungan HIPPA “Tirto Aji” melalui hubungan sosial antar kelompok individu dan jaringan di luar kelompoknya guna menguatkan hubungan kerjasama.

Jaringan kerjasama tersebut terjalin dengan baik karena toleransi anggota terhadap kelompok lain cukup tinggi, sehingga keterbukaan dan akses dalam menambah dan saling bertukar informasi semakin mudah. Selain itu dengan adanya timbal balik yang bersifat positif menyebabkan kerjasama semakin erat dan makin luas.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 12 di bawah ini:

Tabel 12. Skor Jaringan Kerjasama anggota Gabungan HIPPA "Tirto Aji", 2009.

No	Indikator	Skor maks	Skor yang dicapai	% terhadap skor maksimal	Kategori
1	Kerjasama antar anggota HIPPA	3	3	100	Tinggi
2	Kerjasama antar HIPPA dalam Gabungan HIPPA	3	3	100	Tinggi
3	Kerjasama dengan kelompok tani	3	2,93	97,66	Tinggi
4	Kerjasama dengan PPL	3	2,85	95	Tinggi
5	Kerjasama dengan Juru Pengairan	3	2,93	97,66	Tinggi
6	Kerjasama dengan Pemerintah Desa	3	2,83	94,33	Tinggi
7	Kerjasama dengan Dinas Pertanian	3	2,83	94,33	Tinggi
8	Kerjasama dengan Dinas Pengairan	3	2,83	94,33	Tinggi
	Jumlah	24	23,19	95,30	Tinggi

Sumber : Analisis data primer

Keterangan:

Rendah = 8 – 13,33 atau (33,33% - 55,54%)

Sedang = 13,34 – 18,67 atau (55,58% - 77,79%)

Tinggi = 18,68 – 24 atau (77,83% - 100%)

Dari tabel 12 diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan jaringan kerjasama yang dibangun oleh anggota Gabungan HIPPA "Tirto Aji" tergolong tinggi yaitu 23,19 atau 95,30%. Hal tersebut karena jaringan yang dijalin oleh pengurus GHIPPA terhadap kelompok lain seperti Juru Pengairan, Petugas Penyuluh Lapang, Kelompok Tani, Dinas Pertanian, Dinas Pengairan serta Pemerintah Desa mendapat dukungan yang baik. Kerjasama yang dilakukan biasanya seperti pemberian penyuluhan kepada anggota HIPPA baik masalah produk-produk pertanian maupun tentang pemeliharaan saluran irigasi. Hal ini

sesuai yang disampaikan oleh Bapak Mujiran selaku anggota HIPPA Gemenggeng dalam wawancara yang dilakukan tanggal 19 Mei 2009:

*“Sering mas enek petugas teko pas wayah’e arisan, biasane nguwehi penjelasan kanggo petani lek enek wineh utowo obat-obat anyar... ”*

*“Sering mas ada petugas datang pada waktu ada arisan (pertemuan rutin), biasanya memberikan penyuluhan kepada petani apabila ada benih varietas baru maupun obat-obatan (pestisida)...”*

Dari pengamatan di lapang, petugas Juru Pengairan juga hadir pada waktu arisan rutin Gabungan HIPPA “Tirto aji”. Kerjasama yang dapat dilihat yaitu Juru Pengairan menghubungi petugas pintu air Widias untuk mengurangi debit air yang mengalir ke Daerah Irigasi Ngudikan Kiri karena pada saat itu Daerah Irigasi Ngudikan Kiri kelebihan air irigasi.

Dari penjelasan keseluruhan tentang kondisi Modal Sosial di atas baik dari kepercayaan, norma sosial serta jaringan kerjasama maka dapat disimpulkan melalui tabel 13 yang disajikan di bawah ini:

Tabel 13. Skor Modal Sosial HIPPA dalam Gabungan HIPPA ”Tirto Aji”, 2009.

No	Indikator	Skor maks	Skor yang dicapai	% terhadap skor maksimal	Kategori
1	Kepercayaan	21	20,23	96,33	Tinggi
2	Norma Sosial	24	22,58	94,07	Tinggi
3	Jaringan Kerjasama	24	23,19	96,62	Tinggi
	Jumlah	69	66,00	95,65	Tinggi

Sumber : Analisis data primer

Keterangan:

Rendah 23 – 38,33 atau (33,33% - 55,55%)

Sedang 38,34 – 53,67 atau (55,56 – 77,78%)

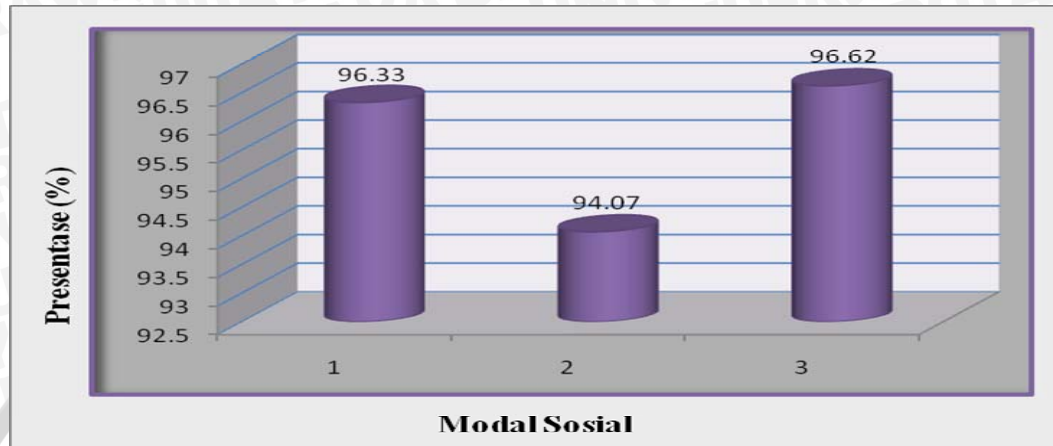
Tinggi 53,68 – 69 atau (77,79% - 100%)

Berdasarkan tabel 13 di atas dapat dilihat bahwa Modal Sosial HIPPA yang tergabung dalam Gabungan HIPPA “Tirto Aji” secara keseluruhan termasuk dalam kategori tinggi yaitu 66 atau 95,65%. Hal tersebut karena anggota Gabungan HIPPA “Tirto Aji” yang masih kental budaya gotong royongnya serta adanya norma-norma dalam kelompok yang secara tidak langsung menyatukan individu-individu dalam suatu kelompok. Sebagaimana pernyataan Fukuyama (2003) yang mengartikan modal sosial sebagai segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, dan didalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma yang tumbuh dan dipatuhi.

Selain itu sesuai dengan kondisi di lapang, kepercayaan yang diberikan anggota kepada Ketua HIPPA sangat tinggi karena kinerja yang baik dari ketua maupun pengurus HIPPA sehingga mampu mengelola air dan membagikan kepada anggota (petani) secara adil dan merata. Selain itu anggota Gabungan HIPPA “Tirto Aji” juga toleran dengan masyarakat di luar kelompoknya serta lebih terbuka dengan segala inovasi yang masuk ke kelompok mereka.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jaringan kerjasama yang di bentuk oleh Gabungan HIPPA “Tirto Aji” baik dari dalam anggota GHIPPA maupun dari luar GHIPPA antara lain: Juru Pengairan, Petugas Penyuluh Lapang, Kelompok Tani, Dinas Pertanian, Dinas Pengairan serta Pemerintah Desa.

Hasil dari penelitian untuk masing-masing indikator Modal Sosial dapat digambarkan dalam grafik dibawah ini:



Keterangan:

1. Kepercayaan.
2. Norma Sosial.
3. Jaringan Kerjasama.

Gambar 7. Persentase Modal Sosial HIPPA, 2009.

## 6.2 Deskripsi Partisipasi Petani Dalam Pengelolaan Air Irigasi

Partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi adalah keikutsertaan petani anggota Gabungan HIPPA "Tirto Aji" dalam perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Dalam partisipasi terdapat beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan yang diartikan sebagai tahap dalam proses pembuatan keputusan mengenai apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Kemudian tahap pelaksanaan yang dapat dilakukan melalui keikutsertaan petani dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan dari hasil kesepakatan yang telah dibuat dan yang terakhir monitoring dan evaluasi yaitu keikutsertaan petani dalam mengawasi jalannya pelaksanaan yang telah dilakukan serta mengevaluasi sebagai acuan untuk rencana kerja kedepannya.

Dalam penelitian ini, partisipasi dibahas pada tiga aspek yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring & evaluasi. Untuk mengetahui lebih rinci mengenai uraian masing-masing indikator partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini:

### **6.2.1 Tahap Perencanaan**

Partisipasi petani dalam tahap perencanaan merupakan keikutsertaan anggota dalam pengambilan keputusan terhadap rencana kegiatan.

Dari penelitian di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi petani pada tahap perencanaan secara keseluruhan termasuk dalam kategori tinggi yaitu 19,17 atau 93,86%. Hal tersebut karena petani anggota Gabungan HIPPA "Tirto Aji" sangat antusias dalam menyikapi kegiatan tersebut. Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan antara lain penyusunan rencana kerja tata tanam, pola tanam, pembagian jadwal gilir air dan penentuan besar IPAIR (Iuran Petani Atas Irigasi yang diterima) beserta penggunaan dana tersebut.

Penyusunan rencana kerja tersebut dilakukan setelah panen raya dan menjelang musim tanam selanjutnya. Penyusunan rencana kerja dilakukan oleh anggota masing-masing HIPPA terlebih dahulu dengan cara musyawarah. Setelah mendapat hasil keputusan kemudian perwakilan dari masing-masing HIPPA akan mengadakan musyawarah dalam Gabungan HIPPA yang dihadiri oleh semua anggota HIPPA beserta pengurus-pengurusnya. Dalam musyawarah tersebut menampung semua pendapat dari masing-masing HIPPA kemudian mengambil satu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua anggota. Apabila dalam



musyawarah tersebut mengalami jalan buntu dilakukan voting dengan suara terbanyak. Namun menurut pengakuan beberapa anggota, dalam musyawarah jarang sekali mengalami jalan buntu karena anggotanya bisa diajak kerjasama dan saling menghargai sesama anggota. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Warso selaku anggota HIPPA Banarankulon dalam wawancara yang dilakukan tanggal 15 Mei 2009:

*“Dateng mriki niku biasane nek badhe panen raya bawang merah mas wes mulai mbahas wayah’e tanduran nopo seng wayah’e dipun tanem, amargi taneman dateng mriki serentak lan waktu maksimal nandor namong 15 dino... ”*

“Disini itu biasanya kalau mau panen raya Bawang Merah mas sudah mulai membahas rencana tanaman yang akan ditanam selanjutnya, karena tanaman disini dilakukan serentak dan dengan waktu maksimal 15 hari...”

Dari hasil pengamatan di lapang terlihat antusias anggota untuk hadir dalam rapat perencanaan kegiatan juga diimbangi dengan masukan atau pendapat dari para anggota. Hal ini dapat dilihat dari indikator kelima yaitu keikutsertaan anggota dalam menyampaikan pendapat atau saran yang mencapai skor 2,78 atau dengan presentase 92,67%. Jadi petani benar-benar bisa berpartisipasi secara aktif dalam menyampaikan pendapatnya.

Berikut ini hasil penelitian dari masing-masing indikator tahap perencanaan:

Tabel 14. Skor partisipasi petani tahap perencanaan dalam pengelolaan air irigasi, 2009.

No	Indikator	Skor maks	Skor yang dicapai	% terhadap skor maksimal	Kategori
1	Keterlibatan anggota dalam rencana tata tanam dan pola tanam	3	3	100	Tinggi
2	Keterlibatan anggota dalam perencanaan pembagian air irigasi	3	3	100	Tinggi
3	Keterlibatan anggota dalam pemeliharaan saluran irigasi	3	2,83	94,33	Tinggi
4	Keterlibatan anggota dalam penentuan sarana dalam pemeliharaan saluran irigasi	3	2,78	92,67	Tinggi
5	Keikutsertaan anggota dalam menyampaaikan pendapat	3	2,78	92,67	Tinggi
6	Keterlibatan anggota dalam penentuan besarnya IPAIR	3	2,63	87,86	Tinggi
7	Keterlibatan anggota dalam penggunaan dana IPAIR	3	2,68	89,33	Tinggi
	Jumlah	21	19,71	93,86	Tinggi

Sumber : Analisis data primer

Kategori:

Rendah 7 – 11,67 (33,33% - 55,57%)

Sedang 11,68 – 16,35 (55,62% - 77,86%)

Tinggi 16,36 - 21 (77,90% -100%)

### 6.2.2 Tahap Pelaksanaan

Partisipasi anggota pada tahap pelaksanaan merupakan keikutsertaan anggota dalam menjalankan kegiatan yang sudah direncanakan dan disepakati bersama. Partisipasi anggota pada tahap pelaksanaan tergolong dalam kategori tinggi, yaitu dengan nilai rata-rata skor 19,93 atau rata-rata anggota berpartisipasi dalam tahap pelaksanaan sebesar 94,90%. Indikator yang digunakan untuk mengetahui partisipasi anggota pada tahap pelaksanaan meliputi pelaksanaan tata tanam dan pola tanam, kegiatan gotong royong dalam memperbaiki dan membersihkan saluran air, kehadiran anggota dalam pertemuan rutin (arisan) dan pelatihan yang diberikan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), kedisiplinan dalam pembayaran IPAIR yang dilakukan oleh anggota. Mengenai skor rata-rata yang dicapai responden di lapang di setiap indikator pada tahap pelaksanaan dapat dilihat pada tabel 15 berikut:

Tabel 15. Skor partisipasi petani tahap pelaksanaan dalam pengelolaan air irigasi, 2009.

No	Indikator	Skor maks	Skor yang dicapai	% terhadap skor maksimal	Kategori
1	Keikutsertaan anggota dalam pelaksanaan tata tanam dan pola tanam	3	3	100	Tinggi
2	Keikutsertaan anggota dalam kegiatan gotong royong memperbaiki saluran air	3	2,63	87,67	Tinggi
3	Keikutsertaan anggota dalam kegiatan gotong royong membersihkan saluran air	3	2,63	87,67	Tinggi
4	Kehadiran anggota dalam pertemuan rutin	3	2,83	94,33	Tinggi
5	Kehadiran anggota dalam pelatihan yang diberikan PPL	3	2,83	94,33	Tinggi
6	Kedisiplinan anggota membayar IPAIR	3	3	100	Tinggi
7	Pembayaran IPAIR yang dilakukan anggota	3	3	100	Tinggi
	Jumlah	21	19,93	94,90	Tinggi

Sumber : Analisis data primer

Kategori:

Rendah 7 – 11,67 (33,33% - 55,57%)

Sedang 11,68 – 16,35 (55,62% - 77,86%)

Tinggi 16,36 - 21 (77,90% -100%)

Dari tabel 15 di atas dapat diketahui bahwa hasil penelitian di lapang pada masing-masing indikator partisipasi pada tahap pelaksanaan tergolong tinggi, hal tersebut karena keikutsertaan petani dalam melaksanakan kegiatan yang telah disusun dalam rencana kerja dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran.

Misalnya saja pada indikator pelaksanaan tata tanam dan pola tanam. Dari hasil pengamatan peneliti, benar-benar terlihat bahwa petani anggota Gabungan HIPPA “Tirto Aji” secara serentak menanam satu jenis komoditi yang sama. Sedangkan pada indikator keikutsertaan anggota dalam gotong royong dalam memperbaiki dan membersihkan saluran air irigasi juga benar-benar terlihat antusias dari petani untuk bersama-sama melaksanakan pekerjaan yang berguna untuk melancarkan aliran air irigasi. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Suprpto selaku anggota HIPPA Kedungdowo dalam wawancara yang dilakukan tanggal 30 Mei 2009:

*“Petani malah seneng mas kalo di jak kerja bakti ngersik’i kali, masalahe kan yo kanggo kepentingan bersama. Engko nek kaline mambeg kan yo petani dewe seng bingung mergo banyune gak iso mili. Seng penting enek seng nyediani kopi karo jajan, wong-wong mesti akeh seng ngiwangi...”*

“Petani malah senang mas kalau di ajak kerja bakti membersihkan saluran irigasi, karena itu kan juga untuk kepentingan bersama. Nanti kalau saluran air irigasi buntu petani juga akan repot karena airnya tidak bisa mengalir. Yang penting ada yang menyediakan kopi sama camilan, orang-orang pasti banyak yang ikut membantu...”

Selain dalam kegiatan gotong royong memperbaiki dan membersihkan saluran irigasi, kehadiran petani anggota Gabungan HIPPA “Tirto Aji” dalam setiap pertemuan rutin kelompok (arisan) dan dalam pelatihan yang diberikan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga tergolong dalam kategori tinggi. Hal tersebut karena sikap saling keterbukaan antar anggota akan tercipta dan anggota juga bisa secara langsung menyampaikan pendapatnya tentang masalah irigasi dan bagaimana solusinya agar dapat diterima oleh semua anggota.

### **6.2.3 Tahap Monitoring dan Evaluasi**

Tahap monitoring dan evaluasi pada prinsipnya adalah tindakan pengawasan, penilaian dan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan secara efektif dan efisien (Slamet,1986).

Dalam penelitian ini, tahap monitoring dan evaluasi dibagi menjadi 7 indikator, yaitu: pengukuran hasil kegiatan, pelaporan anggota adanya kendala kurangnya pasokan air, kegiatan monitoring yang dilakukan bagian teknis HIPPA, kehadiran anggota dalam rapat evaluasi kerja yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan serta evaluasi pembayaran IPAIR dan penggunaan alokasi dana IPAIR. Berikut ini disajikan tabel 16 yang berisi skor perolehan yang diraih pada tiap indikator:

Tabel 16. Skor partisipasi petani tahap Monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan air irigasi, 2009.

No	Indikator	Skor maks	Skor yang dicapai	% terhadap skor maksimal	Kategori
1	Pengukuran hasil kegiatan	3	3	100	Tinggi
2	Pelaporan anggota dengan adanya kendala kurangnya pasokan air	3	2,88	96	Tinggi
3	Monitoring yang dilakukan bagian teknis HIPPA	3	2,95	98,33	Tinggi
4	Kehadiran anggota dalam evaluasi kerja yang sudah dilakukan	3	2,80	93,33	Tinggi
5	Kehadiran anggota dalam evaluasi kerja yang akan dilakukan	3	2,80	93,33	Tinggi
6	Evaluasi pembayaran IPAIR Penggunaan	3	3	100	Tinggi
7	Alokasi dana IPAIR	3	2,95	98,33	Tinggi
	Jumlah	21	20,39	97,09	Tinggi

Sumber : Analisis data primer

Kategori:

Rendah 7 – 11,67 (33,33% - 55,57%)

Sedang 11,68 – 16,35 (55,62% - 77,86%)

Tinggi 16,36 - 21 (77,90% -100%)

Dari tabel 16 diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan skor partisipasi pada tahap monitoring dan evaluasi yang dicapai anggota tergolong kategori tinggi, yaitu sebesar 20,39 dari skor maksimal 21 atau 97,09%.

Pada indikator pertama yaitu pengukuran hasil kegiatan pembagian air, skor yang dicapai anggota sebesar 3 atau 100%. Hal ini berarti petani dapat

dinyatakan bahwa dapat menerima jatah air irigasi secara adil dan merata tanpa ada pilih kasih ataupun yang dirugikan. Demikian juga pada indikator kedua untuk pelaporan anggota apabila ada kendala kurangnya pasokan air irigasi, partisipasi petani juga sangat tinggi dalam melaporkan apabila ada kendala kurangnya pasokan air, sehingga dengan demikian anggota HIPPA bisa mengoreksi mencari penyebab kurangnya pasokan air dan dapat mencari solusi agar tidak terjadi lagi dikemudian hari. Hal tersebut sebenarnya juga masih berhubungan dengan indikator ketiga yaitu kegiatan monitoring yang dilakukan bagian teknis HIPPA, skor yang dicapai 2,95 atau 98,33%. Jadi dapat disimpulkan bawa kegiatan monitoring yang dilakukan bagian teknis HIPPA termasuk dalam kategori tinggi yaitu untuk melakukan kontrol air setiap kali pembagian air irigasi.

Pada indikator keempat dan kelima yaitu tentang kehadiran anggota dalam rapat evaluasi kerja HIPPA yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan juga termasuk dalam kategori tinggi. Dari penelitian di lapang terlihat bahwa keikutsertaan anggota sangat tinggi untuk melakukan evaluasi kerja. Dengan demikian apabila ada masalah-masalah dilapang akan segera mudah di atasi dan mencari jalan keluar yang baik untuk bersama apabila dilakukan dengan musyawarah.

Sedangkan pada indikator keenam tentang evaluasi pembayaran IPAIR termasuk dalam kategori tinggi dengan skor 3 atau 100%, berarti partisipasi petani dalam pembayaran IPAIR dapat disimpulkan bahwa semua anggota HIPPA membayar IPAIR sesuai dengan kewajibannya. Begitu juga pada



indikator ketujuh tentang penggunaan alokasi dana IPAIR juga dapat berjalan sesuai kesepakatan yang telah dibuat, hal tersebut terlihat dari skor yang dicapai di lapang mencapai 2,95 atau 98,33%.

Dari pengamatan di lapang benar-benar terlihat pada buku kas Gabungan HIPPA “Tirto Aji” rincian bahwa seluruh anggota Gabungan HIPPA “Tirto Aji” telah membayar IPAIR sesuai dengan luas lahannya, selain itu penggunaan dana juga ada perinciannya guna pertanggungjawaban penggunaan dana IPAIR.

Dari keseluruhan tahap partisipasi yang dilalui Petani dalam pengelolaan air irigasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahap monitoring dan evaluasi yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan pada tabel 17 di bawah ini:

Tabel 17. Skor partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi, 2009.

No	Indikator	Skor maks	Skor yang dicapai	% terhadap skor maksimal	Kategori
1	Perencanaan	21	19,71	93,86	Tinggi
2	Pelaksanaan	21	19,93	94,90	Tinggi
3	Monitoring&Evaluasi	21	20,39	97,09	Tinggi
	Jumlah	63	60,02	95,28	Tinggi

Sumber : Analisis data primer

Kategori:

Rendah 21 - 35 atau (33,33% - 55,55%)

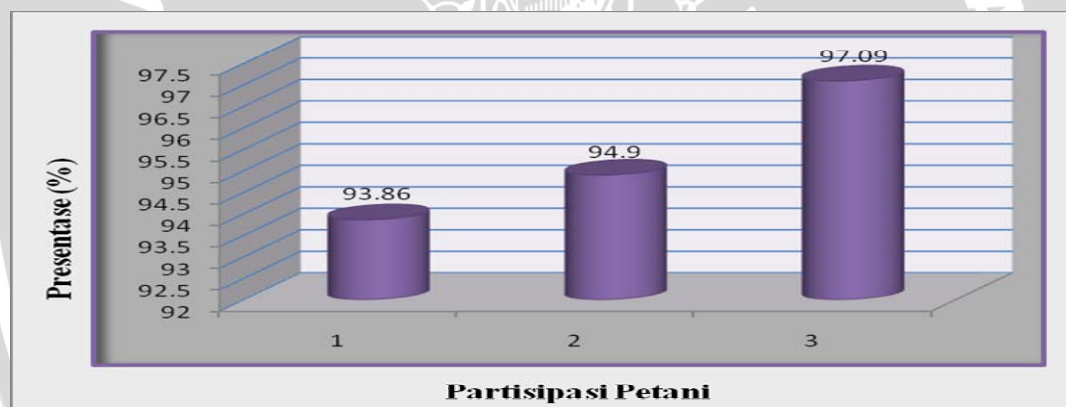
Sedang 36 - 50 atau (57,14% - 79,36%)

Tinggi 51 - 63 atau (80,95% - 100%)

Dari tabel 17 diatas dapat dilihat bahwa skor partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi adalah 60,02 atau 95,28% dari skor maksimal 63 dan termasuk dalam kategori tinggi. Partisipasi yang dibahas dalam penelitian ini meliputi tiga hal yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring & evaluasi. Hal

ini berarti bahwa, partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi dipengaruhi oleh kesadaran yang tinggi atau atas kemauannya sendiri dalam keikutsertaannya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Hal ini terlihat pada penelitian dilapang dengan diperoleh skor 19,71 atau 93,86% dari skor maksimal 21 untuk tahap perencanaan, untuk tahap pelaksanaan diperoleh skor 19,93 atau 94,90% dari skor maksimal. Sedangkan pada tahap monitoring dan menikmati hasil diperoleh skor 20,39 atau 97,09% dari skor maksimal 21.

Hasil dari penelitian untuk masing-masing indikator dapat digambarkan dalam grafik dibawah ini:



Keterangan:

1. Partisipasi tahap perencanaan.
2. Partisipasi tahap pelaksanaan.
3. Partisipasi tahap monitoring dan evaluasi.

Gambar 8. Persentase Partisipasi Petani dalam Pengelolaan Air Irigasi, 2009.

### 6.3 Hubungan Antara Modal Sosial HIPPA Dengan Partisipasi Petani Dalam Pengelolaan Air Irigasi

Untuk mengetahui apakah partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi ini dipengaruhi oleh Modal Sosial Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam

Gabungan Himpunan Petani Pemakai air (GHIPPA) maka dilakukan analisis dengan menggunakan korelasi *Rank Spearman*. Hasil analisis ini dapat dilihat pada tabel 18 dibawah ini :

Tabel 18. Hubungan antara Modal Sosial HIPPA dalam Gabungan HIPPA terhadap tingkat Partisipasi Petani dalam pengelolaan air irigasi, 2009.

No	Modal Sosial	Koefisien Korelasi ( $r_s$ )	$t_{hitung}$
1	Kepercayaan	0,11	0,69
2	Norma Sosial	0,13	0,82
3	Jaringan Kerjasama	0,36	2,41*
4	Total Modal Sosial	0,26	1,68

Sumber : Analisis data primer

Keterangan :

1. Perhitungan *Rank Spearman* ( $r_s$ ) dapat dilihat pada lampiran
2. Hubungan nyata pada tingkat signifikansi 0,05 (\*)
3.  $t(0,05 ; 39) = 2,042$

### 6.3.1 Hubungan Antara Kepercayaan Dengan Partisipasi

Kepercayaan adalah suatu sikap atau tindakan dimana dapat mempercayai orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan senantiasa bertindak untuk saling mendukung. Menurut Fukuyama (1999) *trust* adalah sikap saling mempercayai dimasyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara kepercayaan dan partisipasi diperoleh  $t_{hitung} = 0,69$  yang dibandingkan dengan  $t_{tab} = 2,042$  sehingga  $t_{hitung} < t_{tab}$ . Hal ini berarti bahwa menerima  $H_0$  dan menolak  $H_1$  yang artinya tidak terdapat hubungan antara kepercayaan dengan partisipasi petani. Dikarenakan tingkat kepercayaan kepada ketua maupun pengurus GHIPPA yang sangat tinggi,

hal ini disebabkan oleh pelayanan atau kinerja GHIPPA yang cukup baik dan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut terbukti sejak tahun 1990 sebelum dibentuknya GHIPPA "Tirto Aji", pada waktu itu masih dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan nama IPAIR (Iuran Pelayanan Air Irigasi). Pada masa itu petani tetap membayar iuran kepada Dispenda sebagai imbalan atas air irigasi yang diterima meskipun petani tidak mengetahui transparansi organisasinya.

### 6.3.2 Hubungan Antara Norma Sosial Dengan Partisipasi

Norma sosial adalah suatu peraturan yang diharapkan dapat dipatuhi dan diikuti oleh semua anggota HIPPA yang mengandung sanksi baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu konteks hubungan sosial. Norma-norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Sanksi yang ada didalamnya dapat mencegah individu untuk berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku dimasyarakatnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara norma sosial dan partisipasi diperoleh  $t_{hit} = 0,82$  yang dibandingkan dengan  $t_{tab} = 2,042$  sehingga  $t_{hit} < t_{tab}$ . Hal ini berarti bahwa menerima  $H_0$  dan menolak  $H_1$  yang artinya tidak terdapat hubungan antara norma sosial dengan partisipasi petani. Dalam hal ini disebabkan karena adanya kesadaran yang tinggi yang dimiliki petani untuk berpartisipasi dalam pengelolaan air irigasi. Sehingga ketaatan terhadap norma yang dibuat oleh GHIPPA tersebut tidak berpengaruh pada partisipasi petani. Karena sebelum dibentuk GHIPPA sudah ada aturan atau norma-norma yang mengatur tentang

keirigasian, namun dulu pelaksanaannya masih kurang tegas dengan pemberian sanksi-sanksinya bagi penyelewengannya. Namun sekarang kesadaran petani untuk menghormati hak orang lain dalam mendapatkan air irigasi sudah sangat tinggi, sehingga sudah jarang dan hampir tidak pernah ada pencurian air yang dilakukan oleh petani karena pembagian air yang dilakukan oleh GHIPPA bisa secara adil dan merata bagi semua petani anggota GHIPPA "Tirto Aji".

### 6.3.3 Hubungan Antara Jaringan Kerjasama Dengan Partisipasi

Jaringan kerjasama adalah suatu alasan yang mendasari seseorang untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan komunitas dengan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain. Jaringan kerjasama terbentuk berdasarkan kepentingan atau ketertarikan individu/kelompok secara prinsip dan pemikiran. Dengan menguatkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak maka informasi yang diterima petani tentang inovasi baru juga akan lebih banyak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara jaringan kerjasama dan partisipasi diperoleh  $t_{hit} = 2,41$  yang dibandingkan dengan  $t_{tab} = 2,042$  sehingga  $t_{hit} > t_{tab}$ . Hal ini berarti bahwa menerima  $H_1$  dan menolak  $H_0$  yang artinya terdapat hubungan antara jaringan kerjasama dengan partisipasi petani. Dalam hal ini disebabkan oleh adanya suatu hubungan yang nyata dan sosialisasi yang baik antar anggota maupun dengan pihak-pihak lain. Dalam perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi selalu melibatkan seluruh anggota HIPPA (baik petani, ketua dan pengurus) untuk berkoordinasi dulu sebelum memutuskan suatu hal yang berhubungan dengan seluruh anggota HIPPA. Selain itu kerjasama

dengan pihak luar misalnya kelompok tani, Petugas Penyuluh Lapangan, Juru Pengairan, Pemerintah Desa, Dinas Pengairan dan Dinas Pertanian juga sangat diperlukan. Karena pihak-pihak tersebut juga turut membantu dalam kelancaran proses irigasi untuk bisa sampai mengairi sawah petani. Hal tersebut meliputi pembantuan dana untuk perbaikan saluran irigasi, jumlah debit air yang diterima petani, juga sampai penyaluran produk-produk pertanian (benih, pupuk dll). Karena Gabungan HIPPA "Tirto Aji" tidak mampu berdiri sendiri tanpa adanya partisipasi yang tinggi dari petani, begitu juga sebaliknya petani tidak akan mau berkerjasama dengan GHIPPA apabila tidak ada pelayanan yang baik dari Gabungan HIPPA "Tirto Aji".

#### **6.3.4 Hubungan Antara Modal Sosial Dengan Partisipasi**

Modal Sosial merupakan bentuk dari sumber daya yang pelakunya berhubungan langsung antara satu dengan yang lain dan membentuk suatu kelompok sosial. Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) merupakan suatu kelompok sosial yang terbentuk dari kumpulan anggota HIPPA. Modal sosial HIPPA dapat terjalin dengan baik apabila terdapat kepercayaan, norma sosial dan jaringan kerjasama antara anggota HIPPA dengan petani pemakai air.

Partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi adalah peran serta atau keikutsertaan dari seorang petani atau sekelompok orang petani untuk mengambil bagian dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta ikut memonitoring dan mengevaluasi kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan perencanaan yaitu meliputi penyusunan rencana kerja atau rencana kegiatan yang

akan dilaksanakan, tahap pelaksanaan yaitu meliputi pelaksanaan rencana kegiatan atau rencana kegiatan yang telah disusun dan disepakati bersama sampai keseriusan petani dalam menjalankannya. Sedangkan tahap monitoring dan evaluasi yaitu kegiatan dalam mengawasi kegiatan yang sedang berjalan serta mengevaluasi hasil kegiatan apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuan atau belum.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan hubungan antara modal sosial dan partisipasi diperoleh  $t_{hit} = 1,68$  yang dibandingkan dengan  $t_{tab} = 2,042$  sehingga  $t_{hit} < t_{tab}$ . Hal ini berarti bahwa menerima  $H_0$  dan menolak  $H_1$  yang artinya tidak terdapat hubungan antara modal sosial dengan partisipasi petani. Dalam hal ini disebabkan karena adanya kesadaran yang tinggi dan kemauan yang kuat yang dimiliki petani untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan air irigasi mereka mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap monitoring dan evaluasi. Selain itu petani juga sangat membutuhkan air irigasi untuk kebutuhan sawahnya, karena dengan menggunakan air irigasi dari sungai lebih murah dibandingkan menggunakan pompa air dengan perbandingan 1 : 6, yaitu pada 1 Ha sawah dalam sekali tanam petani hanya membayar Rp. 100.000,00 kepada HIPPA dan Rp. 25.000,00 kepada GHIPPA, sedangkan apabila menggunakan pompa air sekitar Rp. 500.000,00 sampai Rp. 700.000,00 untuk satu kali tanam dengan luas sawah 1 Ha.

## VII. KESIMPULAN DAN SARAN

### 7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi Modal Sosial dalam Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) "Tirto Aji" di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri Kabupaten Nganjuk tergolong tinggi dengan skor 66 atau 95,65% dari skor maksimal. Kepercayaan anggota kepada Ketua dan pengurus HIPPA mempunyai skor 20,23 atau 96,33% dari skor maksimal dan termasuk dalam kategori tinggi. Ketaatan terhadap aturan atau norma sosial dalam Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) mempunyai skor 22,58 atau 94,07% dari skor maksimal dan termasuk dalam kategori tinggi. Jaringan Kerjasama yang dijalin Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) baik diantara anggota maupun dengan kelompok lain mempunyai skor 23,19 atau 96,62% dari skor maksimal dan termasuk dalam kategori tinggi.
2. Partisipasi Petani dalam pengelolaan air irigasi pada Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) "Tirto Aji" di Daerah Irigasi Ngudikan Kiri Kabupaten Nganjuk tergolong tinggi dengan skor 60,02 atau 95,28% dari skor maksimal. Pada tahap perencanaan mencapai skor 19,71 atau 93,86% dari skor maksimal dan termasuk dalam kategori tinggi Pada tahap pelaksanaan termasuk dalam kategori tinggi dengan skor 19,93 atau 94,90% dari skor maksimal. Pada tahap monitoring dan evaluasi juga



termasuk dalam kategori tinggi dengan skor 20,39 atau 97,09% dari skor maksimal.

3. Hubungan Modal Sosial HIPPA dengan partisipasi Petani dalam pengelolaan air irigasi adalah sebagai berikut:

- Tidak terdapat hubungan nyata antara kepercayaan kepada ketua dan pengurus HIPPA dan norma sosial dalam HIPPA dengan partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi, karena adanya pelayanan irigasi oleh Gabungan HIPPA yang baik dan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun; adanya kesadaran yang dimiliki petani untuk berpartisipasi dalam pengelolaan air irigasi mereka, dan terpenuhinya kebutuhan air irigasi petani.
- Terdapat hubungan nyata antara jaringan kerjasama dengan partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi. Dalam hal ini disebabkan oleh adanya suatu hubungan timbal balik dan sosialisasi yang baik antar anggota HIPPA maupun dengan pihak-pihak lain.
- Secara keseluruhan tidak terdapat hubungan nyata antara modal sosial dengan partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi. Karena adanya kesadaran yang tinggi dan kemauan yang kuat yang dimiliki petani untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan air irigasi mereka mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap monitoring dan evaluasi. Selain itu juga disebabkan oleh faktor biaya, karena dengan menggunakan air irigasi dari GHPPA lebih murah dibandingkan menggunakan pompa air, yaitu untuk 1 Ha sawah dalam sekali tanam

petani hanya membayar Rp. 100.000,00 kepada GHIPPA, sedangkan apabila menggunakan pompa air akan menghabiskan biaya antara Rp. 500.000,00 sampai Rp. 700.000,00 untuk satu kali tanam dengan luas sawah 1 Ha.

## 7.2 Saran

Dari hasil penelitian ini dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Modal Sosial dan partisipasi petani yang perlu diperhatikan:
  - a. Kepercayaan yang diberikan kepada ketua dan pengurus Gabungan HIPPA harus tetap dipertahankan dan dapat dijadikan teladan untuk mengelola saluran irigasi selanjutnya.
  - b. Kesadaran yang tinggi dalam menghargai hak-hak orang lain harus tetap dipertahankan agar semua anggota Gabungan HIPPA "Tirto Aji" dapat menerima jatah air irigasinya masing-masing secara cukup.
  - c. Jaringan kerjasama dengan pihak luar maupun antar anggota HIPPA yang tinggi harus tetap dipertahankan dan lebih dikembangkan lagi guna untuk lebih meningkatkan kerjasama yang positif dan berguna untuk kepentingan bersama.

2. Partisipasi petani yang tinggi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan air irigasi harus tetap dipertahankan, dalam hal ini yaitu selalu melibatkan seluruh petani anggota Gabungan HIPPA “Tirto Aji” untuk tetap berpartisipasi secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai tahap monitoring dan evaluasi.
3. Diperlukan penelitian lebih lanjut yang berkenaan dengan partisipasi petani pemakai air dengan modal sosial yang berbeda, sehingga dapat dirumuskannya kinerja Gabungan HIPPA agar dapat lebih baik lagi dalam pelayanannya kepada petani pemakai air.



## DAFTAR PUSTAKA

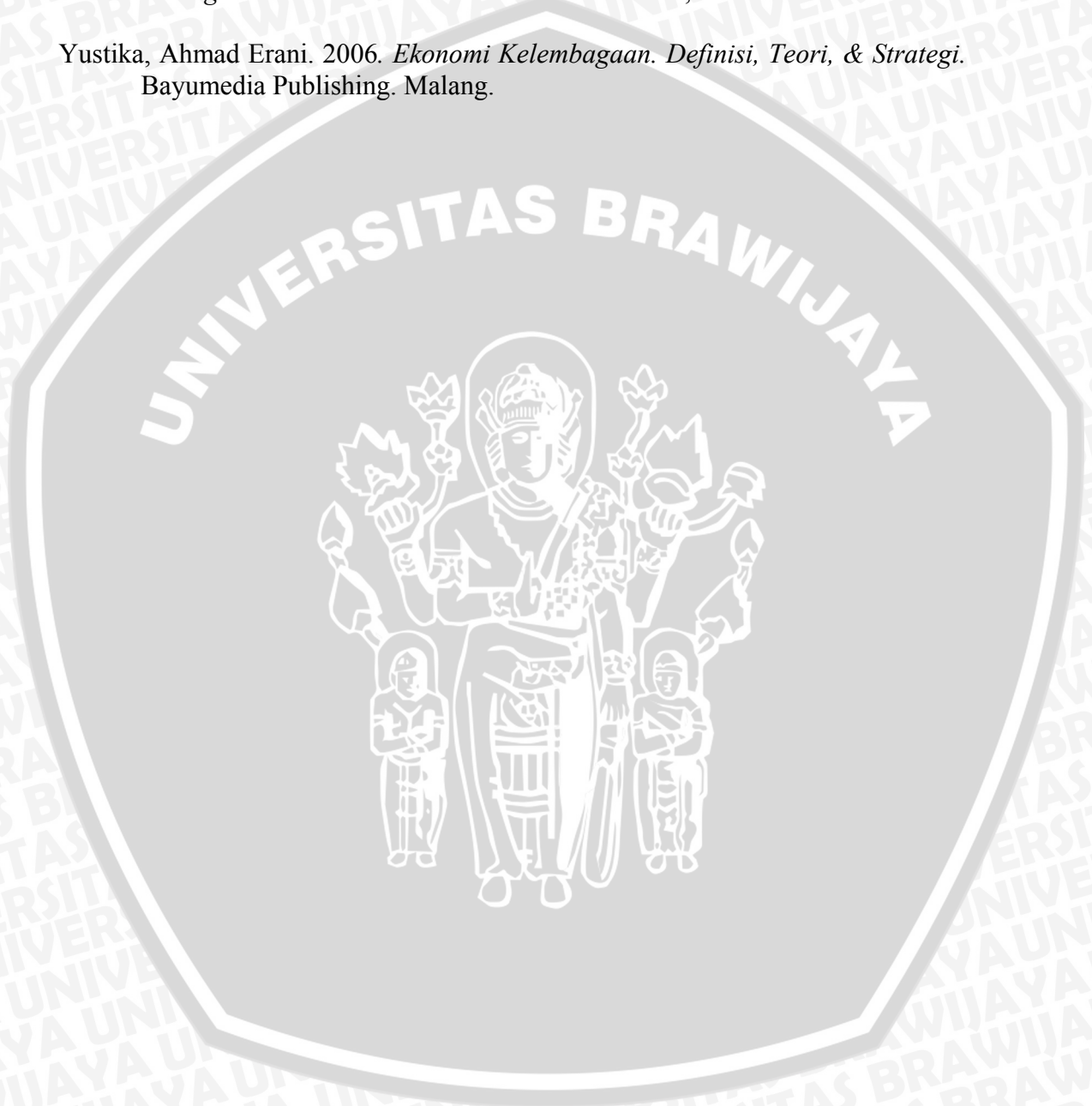
- Ambler, JS. 1992. *Dinamika Irigasi Petani. Kerangka dan Prinsip - Prinsip Kelembagaan. Dalam Pasandaran. Irigasi di Indonesia. Dinamika Kelembagaan Petani*. LP3ES. Jakarta.
- Arif, Sigit Supadmo. 1999. *Aspek Fisik Dan Teknik. Pengenalan dan Dasar Perancangan. Pelatihan Metode Pendekatan Partisipatif dalam Pembagian Irigasi*.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ban, Vanden dan HS Hawkins. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Kanisius. Yogyakarta
- Cohen, D, & Prusak, L. 2001. *In Good Company: How Social Makes Organizations Work*. Harvard Business Press.
- Fukuyama, Francis. 1999. *Social Capital and Civil Society*. Institute of Public Policy. George Mason. University.
- Hidayat, H. 1989. *Diktat Kuliah Metode Penelitian Sosial*. Fakultas Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang.
- Hidayat, K. 2005. *Dampak Kelembagaan, Teknis, Dan Sosial Ekonomi Dari Implementasi Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi*. Agrivita. Jurnal Ilmu Pertanian. Malang.
- Hummernayeger, S.G & Heckmen, E.L. 1967. *Human Relation in Management*. South Westren Publishing. NewYork.
- Jousairi, Hasbulah. 2006. *Social Capital. Menuju Keunggulan Budaya Indonesia*. MR-United Press. Jakarta.
- Kumalasari, Vera. 2007. *Partisipasi Petani Dalam Program Agrowisata Berbasis Masyarakat "Wisata Bukit Apel"*. Skripsi Fakultas Pertanian UB. Malang.
- Kumorotomo, Wahyudi. 1992. *Akuntabilitas Komunikasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Lubis, S. dan A. Harahap. 1992. *Mencari Konsep Pendekatan Partisipatif: Kasus Pembangunan irigasi di Indonesia*. Dalam JohnS. Ambler, 1992 (Penyunting). *Dinamika Irigasi Petani di Indonesia*. CSIS, Jakarta.

- Mardikanto. 1994. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Mariana, Dede. 2006. *Social Capital dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*.  
<http://www.bappeda-jabar.go.id>. Di akses pada tanggal 23 Maret 2009.
- Maskey, R.K & K.E. Weber. 1996. *Evaluating Factors in Influencing Farmers Satisfaction With Their Irrigation System. A Case From The Hills Of Nepal. Dalam Irrigation And Drainage System*. Vol 10 Th 1996. Kluwer Academic Publisher, Netherland.
- Mufidah, Zahratul. 2009. *Hubungan Antara Modal Manusia dan Modal Sosial Dengan Partisipasi Masyarakat Desa Hutan Pada Program PHBN*. Skripsi Fakultas Pertanian UB. Malang.
- Pasandran, E. 2004. *Politik Ekonomi Reformasi Irigasi Tinjauan Kritis Terhadap RUU Sumberdaya Air*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Jakarta.
- Putnam, et.al., 1993, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton. University Press, Princeton, USA.  
<http://www.google.com>. Di akses pada tanggal 24 Juli 2009
- Rina, Agustina. 2001. *Hubungan Tingkat Kemampuan Kelompok Tani Dengan Tingkat Partisipasi dan Tanggungjawab Petani Dalam Pembangunan Pertanian di Indonesia*. Skripsi Fakultas Pertanian UB. Malang.
- Sastropoetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasif dan Disiplin Pembangunan*. Alumni. Bandung.
- Siegel, Sidney. 1992. *Statistik Non Parametrik Untuk Ilmu- Ilmu Sosial*. PT Gramedia. Jakarta.
- Slamet, Margono. 1986. *Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan*. Seminar Pengembangan Pedesaan. Universitas Brawijaya. Malang.
- Subejo. 2004. *Peranan Social Capital dalam Pembangunan Ekonomi: Suatu Pengantar untuk Studi Social Capital di Pedesaan Indonesia*.  
<http://www.google.com>. Di akses pada tanggal 24 Juli 2009.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Syamsi, Ibnu. 1987. *Pokok-Pokok Kebijakan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran*. Rajawali. Yogyakarta.

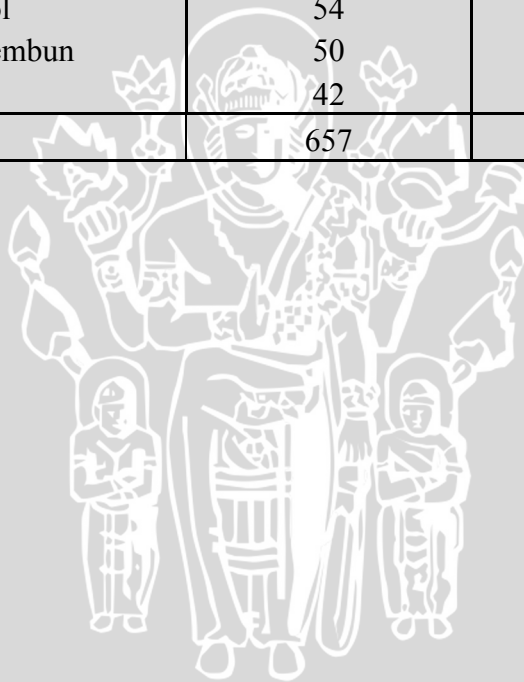
Vermillion, D. L. 1999. *Irrigation Management Transfer: Toward an Integrate Management Revolution*. World Bank Publication, New York.

Yustika, Ahmad Erani. 2006. *Ekonomi Kelembagaan. Definisi, Teori, & Strategi*. Bayumedia Publishing. Malang.



Lampiran 1. Data Luas Lahan dan Jumlah Anggota Gabungan HIPPA  
“Tirto Aji”.

Nomor	HIPPA	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Anggota (Orang)
1	Desa Banaran Kulon	25	118
2	Desa Banaran Wetan	4	4
3	Desa Sidokare	112	215
4	Desa Kendalrejo	50	50
5	Desa Gemenggeng	51	106
6	Desa Sukorejo	152	400
7	Mungkung	77	101
8	Desa Kedungdowo	40	44
9	Desa Gempol	54	70
10	Desa Mojorembun	50	40
11	Desa Setren	42	53
<b>Jumlah</b>		<b>657</b>	<b>1201</b>



Lampiran 2. Tabel Penentuan Jumlah Sampel.

No	Nama HIPPA	Jumlah Anggota	15% dari Anggota sampel	Jumlah sampel
1.	<b>HIPPA Desa Banarankulon</b>	<b>118</b>	17,7	18
2.	HIPPA Desa Banaran Wetan	4	-	-
3.	HIPPA Desa Sidokare	215	-	-
4.	HIPPA Desa Kendalrejo	50	-	-
5.	<b>HIPPA Desa Gemenggeng</b>	<b>106</b>	15,9	16
6.	HIPPA Desa Sukorejo	400	-	-
7.	HIPPA Desa Mungkung	101	-	-
8.	<b>HIPPA Desa Kedungdowo</b>	<b>44</b>	6,6	7
9.	HIPPA Desa Gempol	70	-	-
10.	HIPPA Desa Mojorembun	40	-	-
11.	HIPPA Desa Setren	53	-	-
Total		1201	40,2	41



## Lampiran 3. Daftar Responden.

Wilayah Irigasi	No	Nama Responden	Umur (tahun)	Pendidikan Terakhir	Luas Lahan (Ha)
<b>Hulu</b>	1	Suraji	53	SLTA	0,28
	2	Paidi	25	SD	1,14
	3	S. Suyanto	49	SD	0,35
	4	Wardani	42	SLTA	0,25
	5	Warso	40	SD	0,50
	6	Asri	65	SD	0,60
	7	Andoyo	53	SLTP	0,35
	8	Sadi	50	SD	0,50
	9	Pujiana	40	SD	0,70
	10	Marsono	50	SD	0,28
	11	Djiran	45	SD	0,21
	12	Parno	41	SD	1,00
	13	Sadimun	35	SLTP	0,30
	14	Pardi	30	SLTP	0,42
	15	Ladi S	40	SD	0,14
	16	Pairan	43	SLTP	0,14
	17	Djayadi	62	SD	0,56
	18	Sadi	57	SD	0,19
<b>Tengah</b>	19	Marno	34	SLTA	1,00
	20	Suratman	53	SD	0,21
	21	Wiji	65	SD	0,30
	22	Winarno	36	SLTP	0,56
	23	Akad	65	SD	0,29
	24	Mujiran	50	SD	1,50
	25	Tukimin	53	SD	0,35
	26	Widodo	46	SLTP	0,70
	27	Sugeng	38	SLTP	0,42
	28	Tresno	48	SD	1,00
	29	Marsono	43	SLTA	0,42
	30	Heri	59	SLTA	1,14
	31	Sukadi	61	SD	0,28
	32	Mat Jarot	39	SLTA	0,21
	33	Kusnan	54	SLTP	0,14
	34	Haris	42	SLTP	0,19
<b>Hilir</b>	35	Suyono	50	SLTP	0,29
	36	Parji	48	S1	2,00
	37	Masiran	51	SD	0,14
	38	Narko	35	SLTP	0,29
	39	Suprpto	37	SLTA	2,00
	40	Sutoyo	40	SD	0,42
	41	Yadi	35	SD	0,35

#### Lampiran 4. Perhitungan Untuk Menentukan Kriteria Modal Sosial HIPPA.

Dengan menggunakan skoring, maka untuk menentukan Modal Sosial HIPPA adalah :

1. Menentukan kelas, yaitu : tinggi, sedang, rendah.
2. Menentukan kisaran

$$\begin{aligned} R &= X_t - X_r \\ &= 69 - 23 \\ &= 46 \end{aligned}$$

3. Menentukan selang kelas

$$\begin{aligned} I &= R / K \\ &= 46 / 3 \\ &= 15,33 \end{aligned}$$

Sehingga dari perhitungan di atas, dapat ditentukan 3 kategori dalam Modal Sosial HIPPA, yaitu :

- Kategori Modal Sosial tinggi = 53,68 – 69 atau 77,80% - 100%
- Kategori Modal Sosial sedang = 38,34 – 53,67 atau 55,56% - 77,78%
- Kategori Modal Sosial rendah = 23 – 38,33 atau 33,33% - 55,55%

Sedangkan perhitungan untuk menentukan masing-masing indikator penilaian Modal Sosial HIPPA adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

$$\begin{aligned} R &= X_t - X_r & I &= R / K \\ &= 21 - 7 & &= 14 / 3 \\ &= 14 & &= 4,67 \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh 3 kategori penilaian sebagai berikut :

- Kategori kepercayaan tinggi = 16,36 - 21 atau 77,90% - 100%
- Kategori kepercayaan sedang = 11,68 – 16,35 atau 55,62% - 77,86%
- Kategori kepercayaan rendah = 7 – 11,67 atau 33,33% - 55,57%

## 2. Norma Sosial

$$\begin{aligned} R &= X_t - X_r & I &= R / K \\ &= 24 - 8 & &= 16 / 3 \\ &= 16 & &= 5,33 \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh 3 kategori penilaian sebagai berikut :

$$\text{Kategori norma sosial tinggi} = 18,68 - 24 \quad \text{atau } 77,83 - 100\%$$

$$\text{Kategori norma sosial sedang} = 13,34 - 18,67 \quad \text{atau } 55,58\% - 77,79\%$$

$$\text{Kategori norma sosial rendah} = 8 - 13,33 \quad \text{atau } 33,33\% - 55,54\%$$

## 3. Jaringan Kerjasama

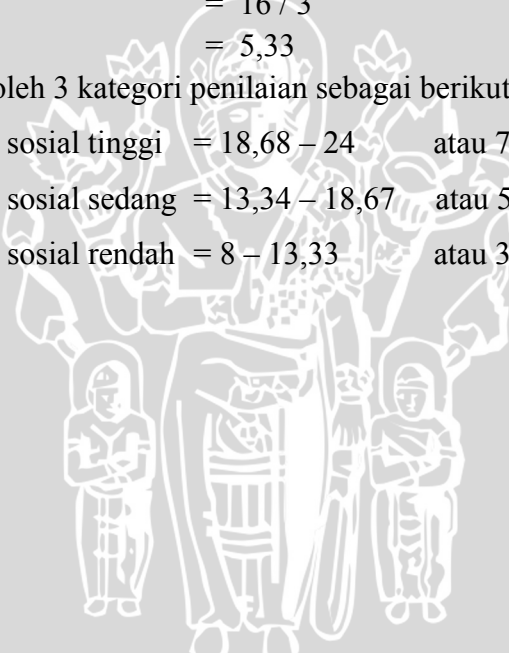
$$\begin{aligned} R &= X_t - X_r & I &= R / K \\ &= 24 - 8 & &= 16 / 3 \\ &= 16 & &= 5,33 \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh 3 kategori penilaian sebagai berikut :

$$\text{Kategori norma sosial tinggi} = 18,68 - 24 \quad \text{atau } 77,83 - 100\%$$

$$\text{Kategori norma sosial sedang} = 13,34 - 18,67 \quad \text{atau } 55,58\% - 77,79\%$$

$$\text{Kategori norma sosial rendah} = 8 - 13,33 \quad \text{atau } 33,33\% - 55,54\%$$



### Lampiran 5. Perhitungan Untuk Menentukan Kriteria Partisipasi.

Dengan menggunakan skoring, maka untuk menentukan partisipasi petani adalah :

1. Menentukan kelas, yaitu : tinggi, sedang, rendah.
2. Menentukan kisaran

$$\begin{aligned} R &= X_t - X_r \\ &= 63 - 21 \\ &= 42 \end{aligned}$$

3. Menentukan selang kelas

$$\begin{aligned} I &= R / K \\ &= 42 / 3 \\ &= 14 \end{aligned}$$

Sehingga dari perhitungan di atas, dapat ditentukan 3 kategori dalam tingkat partisipasi petani, yaitu :

- Kategori partisipasi tinggi = 51 – 63 atau 80,95% - 100%
- Kategori partisipasi sedang = 36 – 50 atau 57,14% - 79,36%
- Kategori partisipasi rendah = 21 – 35 atau 33,33% - 55,55%

Sedangkan perhitungan untuk menentukan masing-masing indikator penilaian Partisipasi adalah sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan

$$\begin{aligned} R &= X_t - X_r & I &= R / K \\ &= 21 - 7 & &= 14 / 3 \\ &= 14 & &= 4,67 \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh 3 kategori penilaian sebagai berikut :

- Kategori perencanaan tinggi = 16,36 - 21 atau 77,90% - 100%
- Kategori perencanaan sedang = 11,68 – 16,35 atau 55,62% - 77,86%
- Kategori perencanaan rendah = 7 – 11,67 atau 33,33% - 55,57%

## 2. Tahap Pelaksanaan

$$\begin{aligned} R &= X_t - X_r & I &= R / K \\ &= 21 - 7 & &= 14 / 3 \\ &= 14 & &= 4,67 \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh 3 kategori penilaian sebagai berikut :

Kategori pelaksanaan tinggi = 16,36 - 21 atau 77,90% - 100%

Kategori pelaksanaan sedang = 11,68 - 16,35 atau 55,62% - 77,86%

Kategori pelaksanaan rendah = 7 - 11,67 atau 33,33% - 55,57%

## 3. Tahap Monitoring dan Evaluasi (Monev)

$$\begin{aligned} R &= X_t - X_r & I &= R / K \\ &= 21 - 7 & &= 14 / 3 \\ &= 14 & &= 4,67 \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh 3 kategori penilaian sebagai berikut :

Kategori monev tinggi = 16,36 - 21 atau 77,90% - 100%

Kategori monev sedang = 11,68 - 16,35 atau 55,62% - 77,86%

Kategori monev rendah = 7 - 11,67 atau 33,33% - 55,57%



**Lampiran 7. Skor Modal Sosial HIPPA.**

Responden	Modal Sosial			Total	Kategori
	Kepercayaan	Norma Sosial	Jaringan		
1	19	24	24	67	Tinggi
2	21	24	24	69	Tinggi
3	21	24	24	69	Tinggi
4	21	24	24	69	Tinggi
5	21	23	24	68	Tinggi
6	21	20	24	65	Tinggi
7	21	22	21	64	Tinggi
8	21	24	24	69	Tinggi
9	20	22	23	65	Tinggi
10	21	24	24	69	Tinggi
11	21	24	24	69	Tinggi
12	20	22	24	66	Tinggi
13	20	22	24	66	Tinggi
14	21	20	24	65	Tinggi
15	20	24	24	68	Tinggi
16	20	24	24	68	Tinggi
17	21	20	21	62	Tinggi
18	20	24	24	69	Tinggi
19	18	23	22	63	Tinggi
20	21	24	24	69	Tinggi
21	21	19	23	63	Tinggi
22	20	22	21	63	Tinggi
23	17	24	23	64	Tinggi
24	19	24	24	67	Tinggi
25	20	17	24	61	Tinggi
26	21	19	23	63	Tinggi
27	21	24	24	69	Tinggi
28	17	24	22	63	Tinggi
29	21	24	22	67	Tinggi
30	21	24	24	69	Tinggi
31	21	23	23	67	Tinggi
32	21	22	24	67	Tinggi
33	21	24	24	69	Tinggi
34	20	24	22	66	Tinggi
35	19	18	20	57	Tinggi
36	19	24	24	67	Tinggi
37	21	24	24	69	Tinggi
38	21	18	20	59	Tinggi
39	20	22	23	65	Tinggi
40	19	23	24	66	Tinggi
41	21	24	21	66	Tinggi
Jumlah	829	926	951	2706	
Rata-rata	20,23	22,58	23,19	66	Tinggi
Skor Maks	21	24	24	69	
Persentase (%)	96,33	94,08	96,62	95,65	Tinggi

$K = 3$   
 $R = X_t - X_r$   
 $R = 69 - 23 = 46$

$I = R/K$   
 $= 46/3 = 15,33$

**Skor :**  
 Tinggi 53,68 - 69 (77,80% - 100%)  
 Sedang 38,34 - 53,67 (55,56% - 77,78%)  
 Rendah 23 - 38,33 (33,33% - 55,55%)

### Lampiran 8. Skor Kepercayaan.

Responden	Kepercayaan							Total	Kategori
	1	2	3	4	5	6	7		
1	2	3	2	3	3	3	3	19	Tinggi
2	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
3	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
4	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
5	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
6	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
7	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
8	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
9	2	3	3	3	3	3	3	20	Tinggi
10	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
11	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
12	3	3	2	3	3	3	3	20	Tinggi
13	3	2	3	3	3	3	3	20	Tinggi
14	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
15	3	2	3	3	3	3	3	20	Tinggi
16	3	2	3	3	3	3	3	20	Tinggi
17	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
18	3	3	3	3	3	3	2	20	Tinggi
19	2	2	3	2	3	3	3	18	Tinggi
20	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
21	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
22	3	2	3	3	3	3	3	20	Tinggi
23	2	2	3	2	3	2	3	17	Tinggi
24	2	3	3	3	3	3	2	19	Tinggi
25	3	3	3	3	3	3	2	20	Tinggi
26	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
27	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
28	3	2	2	2	3	3	2	17	Tinggi
29	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
30	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
31	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
32	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
33	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
34	2	3	3	3	3	3	3	20	Tinggi
35	3	2	3	2	3	3	3	19	Tinggi
36	3	3	3	2	3	3	2	19	Tinggi
37	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
38	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
39	2	3	3	3	3	3	3	20	Tinggi
40	3	3	3	2	3	2	3	19	Tinggi
41	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
Jumlah	116	115	120	117	123	120	118	829	
Rata-rata	2,83	2,80	2,93	2,85	3	2,93	2,88	20,23	Tinggi
Skor Maks	3	3	3	3	3	3	3	21	
Persentase (%)	94,33	93,33	97,66	95	100	97,66	96	96,33	Tinggi

$$K = 3$$

$$R = X_t - X_r$$

$$R = 21 - 7 = 14$$

$$I = R/K$$

$$= 14/3 = 4,67$$

Skor :

Tinggi 16,36 - 21 (77,90% - 100%)

Sedang 11,68 - 16,35 (55,62% - 77,86%)

Rendah 7 - 11,67 (33,33% - 55,55%)



**Lampiran 9. Skor Norma Sosial.**

Responden	Norma Sosial								Total	Kategori
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
2	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
3	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
4	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
5	3	3	3	3	2	3	3	3	23	Tinggi
6	3	3	2	2	2	3	3	3	20	Tinggi
7	3	3	3	3	3	2	3	2	22	Tinggi
8	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
9	3	3	2	2	3	3	3	3	22	Tinggi
10	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
11	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
12	3	3	3	3	3	3	2	3	22	Tinggi
13	3	3	2	2	3	3	3	3	22	Tinggi
14	3	3	1	1	3	3	3	3	20	Tinggi
15	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
16	3	3	3	3	3	2	3	3	24	Tinggi
17	3	3	1	1	3	3	3	3	20	Tinggi
18	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
19	3	3	3	3	2	3	3	3	23	Tinggi
20	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
21	3	3	1	1	2	3	3	3	19	Tinggi
22	3	3	2	2	3	3	3	3	22	Tinggi
23	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
24	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
25	3	3	1	1	2	2	2	3	17	Tinggi
26	3	3	1	1	3	2	3	3	19	Tinggi
27	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
28	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
29	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
30	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
31	3	3	3	3	2	3	3	3	23	Tinggi
32	3	3	2	2	3	3	3	3	22	Tinggi
33	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
34	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
35	3	3	1	1	3	2	2	3	18	Tinggi
36	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
37	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
38	3	3	1	1	2	2	3	3	18	Tinggi
39	3	3	2	2	3	3	3	3	22	Tinggi
40	3	3	3	3	2	3	3	3	23	Tinggi
41	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
Jumlah	123	123	103	103	115	117	120	122	926	
Rata-rata	3	3	2,51	2,51	2,80	2,85	2,93	2,97	22,58	Tinggi
Skor Maks	3	3	3	3	3	3	3	3	24	
Persentase (%)	100	100	83,67	83,67	93,33	95	97,66	99	94,08	Tinggi

$K = 3$   
 $R = X_t - X_r$   
 $R = 24 - 8 = 16$   
 $I = R/K$   
 $= 16/3 = 5,33$

**Skor :**  
 Tinggi 17,68 - 24 (77,83% - 100%)  
 Sedang 13,34 - 18,67 (55,58% - 77,79%)  
 Rendah 8 - 13,33 (33,33% - 55,54%)

### Lampiran 10. Skor Jaringan Kerjasama.

Responden	Jaringan Kerjasama								Total	Kategori
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
2	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
3	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
4	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
5	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
6	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
7	2	3	3	3	2	2	3	3	21	Tinggi
8	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
9	3	3	3	2	3	3	3	3	23	Tinggi
10	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
11	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
12	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
13	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
14	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
15	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
16	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
17	3	3	3	2	3	3	2	2	21	Tinggi
18	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
19	3	3	3	3	3	3	2	2	22	Tinggi
20	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
21	3	3	3	2	3	3	3	3	23	Tinggi
22	3	3	2	3	3	2	2	3	21	Tinggi
23	3	3	3	3	2	3	3	3	23	Tinggi
24	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
25	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
26	3	3	3	2	3	3	3	3	23	Tinggi
27	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
28	3	3	3	3	2	2	3	3	22	Tinggi
29	3	3	2	3	3	2	3	3	22	Tinggi
30	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
31	3	3	3	3	3	3	3	2	23	Tinggi
32	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
33	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
34	3	3	3	3	3	3	2	2	22	Tinggi
35	3	3	2	3	3	2	2	2	20	Tinggi
36	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
37	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
38	3	3	3	2	3	2	2	2	20	Tinggi
39	3	3	3	2	3	3	3	3	23	Tinggi
40	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Tinggi
41	3	3	3	3	3	2	2	2	21	Tinggi
Jumlah	123	123	120	117	120	116	116	116	951	
Rata-rata	3	3	2,93	2,85	2,93	2,83	2,83	2,83	23,19	Tinggi
Skor Maks	3	3	3	3	3	3	3	3	24	
Persentase (%)	100	100	97,66	95	97,66	94,33	94,33	94,33	96,62	Tinggi

$$K = 3$$

$$R = X_t - X_r$$

$$R = 24 - 8 = 16$$

$$I = R/K$$

$$= 16/3 = 5,33$$

Skor :		
Tinggi	17,68 - 24	(77,83% - 100%)
Sedang	13,34 - 18,67	(55,58% - 77,79%)
Rendah	8 - 13,33	(33,33% - 55,54%)

### Lampiran 11. Skor Partisipasi Petani.

Responden	Partisipasi			Total	Kategori
	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring & Evaluasi		
1	21	21	21	63	Tinggi
2	19	19	19	57	Tinggi
3	21	21	20	62	Tinggi
4	20	21	21	62	Tinggi
5	21	21	21	63	Tinggi
6	19	19	21	59	Tinggi
7	21	19	21	61	Tinggi
8	21	21	20	62	Tinggi
9	21	21	21	63	Tinggi
10	21	21	21	63	Tinggi
11	21	21	19	62	Tinggi
12	20	21	21	62	Tinggi
13	21	21	21	63	Tinggi
14	20	21	21	62	Tinggi
15	21	21	21	63	Tinggi
16	21	19	21	61	Tinggi
17	14	19	19	52	Tinggi
18	17	17	18	52	Tinggi
19	18	21	20	59	Tinggi
20	21	21	21	63	Tinggi
21	19	21	21	61	Tinggi
22	21	19	19	59	Tinggi
23	21	19	21	61	Tinggi
24	18	21	21	60	Tinggi
25	21	21	21	63	Tinggi
26	21	15	21	57	Tinggi
27	21	19	21	61	Tinggi
28	16	21	19	56	Tinggi
29	21	21	19	61	Tinggi
30	21	17	19	57	Tinggi
31	17	19	21	57	Tinggi
32	20	21	21	62	Tinggi
33	21	21	21	63	Tinggi
34	21	21	21	63	Tinggi
35	21	17	18	56	Tinggi
36	17	15	21	53	Tinggi
37	17	21	20	58	Tinggi
38	17	21	20	58	Tinggi
39	18	21	21	60	Tinggi
40	21	19	21	61	Tinggi
41	20	21	21	62	Tinggi
Jumlah	808	817	836	2461	
Rata-rata	19,71	19,93	20,39	60,02	Tinggi
Skor Maks	21	21	21	63	
Persentase (%)	93,86	94,90	97,09	95,28	Tinggi

$$K = 3$$

$$R = X_t - X_r$$

$$R = 63 - 21 = 42$$

$$I = R/K$$

$$= 42/3 = 14$$

Skor :

Tinggi	51 - 63	(80,95% - 100%)
Sedang	36 - 50	(57,14% - 77,36%)
Rendah	21 - 35	(33,33% - 55,55%)

### Lampiran 12. Skor Tahap Perencanaan.

Responden	Perencanaan							Total	Kategori
	1	2	3	4	5	6	7		
1	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
2	3	3	2	3	2	3	3	19	Tinggi
3	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
4	3	3	3	3	3	2	3	20	Tinggi
5	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
6	3	3	3	2	3	2	3	19	Tinggi
7	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
8	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
9	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
10	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
11	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
12	3	3	2	3	3	3	3	20	Tinggi
13	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
14	3	3	2	3	3	3	3	20	Tinggi
15	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
16	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
17	3	3	3	2	1	1	1	14	Tinggi
18	3	3	3	3	3	1	1	17	Tinggi
19	3	3	2	1	3	3	3	18	Tinggi
20	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
21	3	3	3	3	3	2	2	19	Tinggi
22	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
23	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
24	3	3	2	1	3	3	3	18	Tinggi
25	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
26	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
27	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
28	3	3	2	3	3	1	1	16	Tinggi
29	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
30	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
31	3	3	3	3	1	2	2	17	Tinggi
32	3	3	3	3	2	3	3	20	Tinggi
33	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
34	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
35	3	3	2	2	1	3	3	21	Tinggi
36	3	3	3	3	3	3	3	17	Tinggi
37	3	3	3	3	3	1	1	17	Tinggi
38	3	3	3	3	3	1	1	17	Tinggi
39	3	3	3	3	2	2	2	18	Tinggi
40	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
41	3	3	3	1	3	3	3	20	Tinggi
Jumlah	123	123	116	114	114	108	110	808	
Rata-rata	3	3	2,83	2,78	2,78	2,63	2,68	19,71	Tinggi
Skor Maks	3	3	3	3	3	3	3	21	
Persentase (%)	100	100	94,33	92,67	92,67	87,67	89,33	93,86	Tinggi

$$K = 3$$

$$R = X_t - X_r$$

$$R = 21 - 7 = 14$$

$$I = R/K$$

$$= 14/3 = 4,67$$

Skor :

Tinggi	16,36 - 21	(77,90% - 100%)
Sedang	11,68 - 16,35	(55,62% - 77,86%)
Rendah	7 - 11,67	(33,33% - 55,55%)

### Lampiran 13. Skor Tahap Pelaksanaan.

Responden	Pelaksanaan							Total	Kategori
	1	2	3	4	5	6	7		
1	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
2	3	3	2	3	2	3	3	19	Tinggi
3	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
4	3	3	3	3	3	2	3	21	Tinggi
5	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
6	3	2	2	3	3	3	3	19	Tinggi
7	3	2	2	3	3	3	3	19	Tinggi
8	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
9	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
10	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
11	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
12	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
13	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
14	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
15	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
16	3	2	2	3	3	3	3	19	Tinggi
17	3	3	3	2	2	3	3	19	Tinggi
18	3	2	2	2	2	3	3	17	Tinggi
19	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
20	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
21	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
22	3	3	3	2	2	3	3	19	Tinggi
23	3	2	2	3	3	3	3	19	Tinggi
24	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
25	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
26	3	1	1	2	2	3	3	15	Tinggi
27	3	2	2	3	3	3	3	19	Tinggi
28	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
29	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
30	3	2	2	2	2	3	3	17	Tinggi
31	3	2	2	3	3	3	3	19	Tinggi
32	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
33	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
34	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
35	3	1	1	3	3	3	3	17	Tinggi
36	3	1	1	2	2	3	3	15	Tinggi
37	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
38	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
39	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
40	3	2	2	3	3	3	3	19	Tinggi
41	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
Jumlah	123	108	108	116	116	123	123	817	
Rata-rata	3	2,63	2,68	2,83	2,83	3	3	19,93	Tinggi
Skor Maks	3	3	3	3	3	3	3	21	
Persentase (%)	100	87,67	87,67	94,33	94,33	100	100	94,90	Tinggi

$$K = 3$$

$$R = X_t - X_r$$

$$R = 21 - 7 = 14$$

$$I = R/K$$

$$= 14/3 = 4,67$$

Skor :		
Tinggi	16,36 - 21	(77,90% - 100%)
Sedang	11,68 - 16,35	(55,62% - 77,86%)
Rendah	7 - 11,67	(33,33% - 55,55%)

### Lampiran 14. Skor Tahap Monitoring dan Evaluasi.

Responden	Monitoring & Evaluasi							Total	Kategori
	1	2	3	4	5	6	7		
1	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
2	3	3	3	2	2	3	3	19	Tinggi
3	3	2	3	3	3	3	3	20	Tinggi
4	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
5	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
6	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
7	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
8	3	2	3	3	3	3	3	20	Tinggi
9	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
10	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
11	3	3	3	2	2	3	3	19	Tinggi
12	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
13	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
14	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
15	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
16	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
17	3	3	3	2	2	3	3	19	Tinggi
18	3	3	2	2	2	3	3	18	Tinggi
19	3	2	3	3	3	3	3	20	Tinggi
20	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
21	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
22	3	3	3	2	2	3	3	19	Tinggi
23	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
24	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
25	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
26	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
27	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
28	3	2	3	3	3	3	2	19	Tinggi
29	3	3	3	2	2	3	3	19	Tinggi
30	3	3	3	2	2	3	3	19	Tinggi
31	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
32	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
33	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
34	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
35	3	3	2	2	2	3	3	18	Tinggi
36	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
37	3	2	3	3	3	3	3	20	Tinggi
38	3	3	3	3	3	3	2	20	Tinggi
39	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
40	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
41	3	3	3	3	3	3	3	21	Tinggi
Jumlah	123	118	121	115	115	123	121	836	
rata-rata	3	2,88	2,95	2,80	2,80	3	2,95	20,39	Tinggi
Skor Maks	3	3	3	3	3	3	3	21	
Persentase (%)	100	96	98,33	93,33	93,33	100	98,33	97,09	Tinggi

$$K = 3$$

$$R = X_t - X_r$$

$$R = 21 - 7 = 14$$

$$I = R/K$$

$$= 14/3 = 4,67$$

Skor :

Tinggi 16,36 - 21 (77,90% - 100%)

Sedang 11,68 - 16,35 (55,62% - 77,86%)

Rendah 7 - 11,67 (33,33% - 55,55%)

**Lampiran 15. Hubungan Antara Kepercayaan (X1) dengan Partisipasi Petani (Y).**

No	X1	Y	RX1	RY	di	di <sup>2</sup>
1	19	63	6	36.5	-30.5	930.25
2	21	57	30	7.5	22.5	506.25
3	21	62	30	27.5	2.5	6.25
4	21	62	30	27.5	2.5	6.25
5	21	63	30	36.5	-6.5	42.25
6	21	59	30	13	17	289
7	21	61	30	20	10	100
8	21	62	30	27.5	2.5	6.25
9	20	63	13.5	36.5	-23	529
10	21	63	30	36.5	-6.5	42.25
11	21	62	30	27.5	2.5	6.25
12	20	62	13.5	27.5	-14	196
13	20	63	13.5	36.5	-23	529
14	21	62	30	27.5	2.5	6.25
15	20	63	13.5	36.5	-23	529
16	20	61	13.5	20	-6.5	42.25
17	21	52	30	1.5	28.5	812.25
18	20	52	13.5	1.5	12	144
19	18	59	3	13	-10	100
20	21	63	30	36.5	-6.5	42.25
21	21	61	30	20	10	100
22	20	59	13.5	13	0.5	0.25
23	17	61	1.5	20	-18.5	342.25
24	19	60	6	15.5	-9.5	90.25
25	20	63	13.5	36.5	-23	529
26	21	57	30	7.5	22.5	506.25
27	21	61	30	20	10	100
28	17	56	1.5	4.5	-3	9
29	21	61	30	20	10	100
30	21	57	30	7.5	22.5	506.25
31	21	57	30	7.5	22.5	506.25
32	21	62	30	27.5	2.5	6.25
33	21	63	30	36.5	-6.5	42.25
34	20	63	13.5	36.5	-23	529
35	19	56	6	4.5	1.5	2.25
36	19	53	6	3	3	9
37	21	58	30	10.5	19.5	380.25
38	21	58	30	10.5	19.5	380.25
39	20	60	13.5	15.5	-2	4
40	19	61	6	20	-14	196
41	21	62	30	27.5	2.5	6.25
Jumlah						9210

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

$$\begin{aligned} T_{x1} &= \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{5^3 - 5}{12} + \frac{9^3 - 9}{12} + \frac{22^3 - 22}{12} \\ &= 0.5 + 10 + 60 + 885.5 \\ &= 956 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_y &= \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{4^3 - 4}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{2^2 - 2}{12} + \frac{7^3 - 7}{12} + \frac{8^3 - 8}{12} + \frac{10^3 - 10}{12} \\ &= 0.5 + 0.5 + 5 + 0.5 + 2 + 0.5 + 28 + 42 + 82.5 \\ &= 161.5 \end{aligned}$$

$$\sum x^2 = \frac{N^3 - N}{12} - T_x$$

$$\sum y^2 = \frac{N^3 - N}{12} - T_y$$

$$\begin{aligned} \sum x_1^2 &= \frac{41^3 - 41}{12} - 956 \\ &= 4784 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum y^2 &= \frac{41^3 - 41}{12} - 161.5 \\ &= 5578.5 \end{aligned}$$

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d^2}{2\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

$$t_{hit} = r_s \sqrt{\frac{N-2}{1-(r_s)^2}}$$

$$= \frac{4784 + 5578.5 - 9210}{2\sqrt{(4784)(5578.5)}}$$

$$= 0.11 \sqrt{\frac{41-2}{1-(0.11)^2}}$$

$$= \frac{1152.5}{10332}$$

$$t_{hit} = 0.69$$

$$r_s = 0.11$$

Dari perhitungan diatas diperoleh bahwa  $T_{hitung} (0,69) < t_{tabel} (2,042)$ , maka menerima  $H_0$  dan menolak  $H_1$ . Dimana menyatakan bahwa tidak terdapat korelasi positif antara Modal Sosial Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) terhadap tingkat Partisipasi Petani dalam pengelolaan air irigasi.



**Lampiran 16. Hubungan Antara Norma Sosial (X2) dengan Partisipasi Petani (Y).**

No	X2	Y	RX2	RY	di	di <sup>2</sup>
1	24	63	30.5	36.5	-6	36
2	24	57	30.5	7.5	23	529
3	24	62	30.5	27.5	3	9
4	24	62	30.5	27.5	3	9
5	23	63	17.5	36.5	-19	361
6	20	59	7	13	-6	36
7	22	61	12	20	-8	64
8	24	62	30.5	27.5	3	9
9	22	63	12	36.5	-24.5	600.25
10	24	63	30.5	36.5	-6	36
11	24	62	30.5	27.5	3	9
12	22	62	12	27.5	-15.5	240.25
13	22	63	12	36.5	-24.5	600.25
14	20	62	7	27.5	-20.5	420.25
15	24	63	30.5	36.5	-6	36
16	24	61	30.5	20	10.5	110.25
17	20	52	7	1.5	5.5	30.25
18	24	52	30.5	1.5	29	841
19	23	59	17.5	13	4.5	20.25
20	24	63	30.5	36.5	-6	36
21	19	61	4.5	20	-15.5	240.25
22	22	59	12	13	-1	1
23	24	61	30.5	20	10.5	110.25
24	24	60	30.5	15.5	15	225
25	17	63	1	36.5	-35.5	1260.25
26	19	57	4.5	7.5	-3	9
27	24	61	30.5	20	10.5	110.25
28	24	56	30.5	4.5	26	676
29	24	61	30.5	20	10.5	110.25
30	24	57	30.5	7.5	23	529
31	23	57	17.5	7.5	10	100
32	22	62	12	27.5	-15.5	240.25
33	24	63	30.5	36.5	-6	36
34	24	63	30.5	36.5	-6	36
35	18	56	2.5	4.5	-2	4
36	24	53	30.5	3	27.5	756.25
37	24	58	30.5	10.5	20	400
38	18	58	2.5	10.5	-8	64
39	22	60	12	15.5	-3.5	12.25
40	23	61	17.5	20	-2.5	6.25
41	24	62	30.5	27.5	3	9
Jumlah						8968

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

$$\begin{aligned} T_{x^2} &= \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{7^3 - 7}{12} + \frac{4^3 - 4}{12} + \frac{22^3 - 22}{12} \\ &= 0.5 + 0.5 + 2 + 28 + 5 + 885.5 \\ &= 956 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_y &= \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{4^3 - 4}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{2^2 - 2}{12} + \frac{7^3 - 7}{12} + \frac{8^3 - 8}{12} + \frac{10^3 - 10}{12} \\ &= 0.5 + 0.5 + 5 + 0.5 + 2 + 0.5 + 28 + 42 + 82.5 \\ &= 161.5 \end{aligned}$$

$$\sum x^2 = \frac{N^3 - N}{12} - T_x$$

$$\sum y^2 = \frac{N^3 - N}{12} - T_y$$

$$\begin{aligned} \sum x^2 &= \frac{41^3 - 41}{12} - 956 \\ &= 4784 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum y^2 &= \frac{41^3 - 41}{12} - 161.5 \\ &= 5578.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r_s &= \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d^2}{2\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}} \\ &= \frac{4784 + 5578.5 - 8968}{2\sqrt{(4784)(5578.5)}} \\ &= \frac{1394.5}{10332} \\ r_s &= 0.13 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t_{hit} &= r_s \sqrt{\frac{N-2}{1-(r_s)^2}} \\ &= 0.13 \sqrt{\frac{41-2}{1-(0.13)^2}} \\ t_{hit} &= 0.82 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas diperoleh bahwa  $T_{hitung} (0,82) < t_{tabel} (2,042)$ , maka menerima  $H_0$  dan menolak  $H_1$ . Dimana menyatakan bahwa tidak terdapat korelasi positif antara Modal Sosial Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) terhadap tingkat Partisipasi Petani dalam pengelolaan air irigasi.

**Lampiran 17. Hubungan Antara Jaringan Kerjasama (X3) dengan Partisipasi Petani (Y).**

No	X3	Y	RX3	RY	di	di <sup>2</sup>
1	24	63	29	36.5	-7.5	56.25
2	24	57	29	7.5	21.5	462.25
3	24	62	29	27.5	1.5	2.25
4	24	62	29	27.5	1.5	2.25
5	24	63	29	36.5	-7.5	56.25
6	24	59	29	13	16	256
7	21	61	4.5	20	-15.5	240.25
8	24	62	29	27.5	1.5	2.25
9	23	63	13.5	36.5	-23	529
10	24	63	29	36.5	-7.5	56.25
11	24	62	29	27.5	1.5	2.25
12	24	62	29	27.5	1.5	2.25
13	24	63	29	36.5	-7.5	56.25
14	24	62	29	27.5	1.5	2.25
15	24	63	29	36.5	-7.5	56.25
16	24	61	29	20	9	81
17	21	52	4.5	1.5	3	9
18	24	52	29	1.5	27.5	756.25
19	22	59	8.5	13	-4.5	20.25
20	24	63	29	36.5	-7.5	56.25
21	23	61	13.5	20	-6.5	42.25
22	21	59	4.5	13	-8.5	72.25
23	23	61	13.5	20	-6.5	42.25
24	24	60	29	15.5	13.5	182.25
25	24	63	29	36.5	-7.5	56.25
26	23	57	13.5	7.5	6	36
27	24	61	29	20	9	81
28	22	56	8.5	4.5	4	16
29	22	61	8.5	20	-11.5	132.25
30	24	57	29	7.5	21.5	462.25
31	23	57	13.5	7.5	6	36
32	24	62	29	27.5	1.5	2.25
33	24	63	29	36.5	-7.5	56.25
34	22	63	8.5	36.5	-28	784
35	20	56	1.5	4.5	-3	9
36	24	53	29	3	26	676
37	24	58	29	10.5	18.5	342.25
38	20	58	1.5	10.5	-9	81
39	23	60	13.5	15.5	-2	4
40	24	61	29	20	9	81
41	21	62	4.5	27.5	-23	529
Jumlah						6428.5

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

$$T_{x^3} = \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{4^3 - 4}{12} + \frac{4^3 - 4}{12} + \frac{6^3 - 6}{12} + \frac{25^3 - 25}{12}$$

$$= 0.5 + 5 + 5 + 17.5 + 1300$$

$$= 1328$$

$$T_y = \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{4^3 - 4}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{2^2 - 2}{12} + \frac{7^3 - 7}{12} + \frac{8^3 - 8}{12} + \frac{10^3 - 10}{12}$$

$$= 0.5 + 0.5 + 5 + 0.5 + 2 + 0.5 + 28 + 42 + 82.5$$

$$= 161.5$$

$$\sum x^2 = \frac{N^3 - N}{12} - T_x$$

$$\sum y^2 = \frac{N^3 - N}{12} - T_y$$

$$\sum x^2 = \frac{41^3 - 41}{12} - 1328$$

$$= 4412$$

$$\sum y^2 = \frac{41^3 - 41}{12} - 161.5$$

$$= 5578.5$$

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d^2}{2\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

$$t_{hit} = r_s \sqrt{\frac{N-2}{1-(r_s)^2}}$$

$$= \frac{4412 + 5578.5 - 6428.5}{2\sqrt{(4412)(5578.5)}}$$

$$= 0.36 \sqrt{\frac{41-2}{1-(0.36)^2}}$$

$$= \frac{3562}{9922.16}$$

$$t_{hit} = 2.41$$

$$r_s = 0.36$$

Dari perhitungan diatas diperoleh bahwa  $T_{hitung} (2,41) > t_{tabel} (2,042)$ , maka menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Dimana menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara Modal Sosial Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) terhadap tingkat Partisipasi Petani dalam pengelolaan air irigasi.

**Lampiran 18. Hubungan Antara Modal Sosial HIPPA (X) dengan Partisipasi Petani (Y).**

No	X	Y	RX	RY	di	di <sup>2</sup>
1	67	63	23.5	36.5	-13	169
2	69	57	35.5	7.5	28	784
3	69	62	35.5	27.5	8	64
4	69	62	35.5	27.5	8	64
5	68	63	28	36.5	-8.5	72.25
6	65	59	13.5	13	0.5	0.25
7	64	61	10.5	20	-9.5	90.25
8	69	62	35.5	27.5	8	64
9	65	63	13.5	36.5	-23	529
10	69	63	35.5	36.5	-1	1
11	69	62	35.5	27.5	8	64
12	66	62	18	27.5	-9.5	90.25
13	66	63	18	36.5	-18.5	342.25
14	65	62	13.5	27.5	-14	196
15	68	63	28	36.5	-8.5	72.25
16	68	61	28	20	8	64
17	62	52	4	1.5	2.5	6.25
18	69	52	35.5	1.5	34	1156
19	63	59	7	13	-6	36
20	69	63	35.5	36.5	-1	1
21	63	61	7	20	-13	169
22	63	59	7	13	-6	36
23	64	61	10.5	20	-9.5	90.25
24	67	60	23.5	15.5	8	64
25	61	63	3	36.5	-33.5	1122.25
26	63	57	7	7.5	-0.5	0.25
27	69	61	35.5	20	15.5	240.25
28	63	56	7	4.5	2.5	6.25
29	67	61	23.5	20	3.5	12.25
30	69	57	35.5	7.5	28	784
31	67	57	23.5	7.5	16	256
32	67	62	23.5	27.5	-4	16
33	69	63	35.5	36.5	-1	1
34	66	63	18	36.5	-18.5	342.25
35	57	56	1	4.5	-3.5	12.25
36	67	53	23.5	3	20.5	420.25
37	69	58	35.5	10.5	25	625
38	59	58	2	10.5	-8.5	72.25
39	65	60	13.5	15.5	-2	4
40	66	61	18	20	-2	4
41	66	62	18	27.5	-9.5	90.25
Jumlah						8233.5

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

$$\begin{aligned} T_x &= \frac{5^3 - 5}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{4^3 - 4}{12} + \frac{5^3 - 5}{12} + \frac{6^3 - 6}{12} + \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{12^3 - 12}{12} \\ &= 10 + 0.5 + 5 + 10 + 17.5 + 2 + 143 \\ &= 188 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_y &= \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{4^3 - 4}{12} + \frac{2^3 - 2}{12} + \frac{3^3 - 3}{12} + \frac{2^2 - 2}{12} + \frac{7^3 - 7}{12} + \frac{8^3 - 8}{12} + \frac{10^3 - 10}{12} \\ &= 0.5 + 0.5 + 5 + 0.5 + 2 + 0.5 + 28 + 42 + 82.5 \\ &= 161.5 \end{aligned}$$

$$\sum x^2 = \frac{N^3 - N}{12} - T_x$$

$$\begin{aligned} \sum x^2 &= \frac{41^3 - 41}{12} - 188 \\ &= 5552 \end{aligned}$$

$$\sum y^2 = \frac{N^3 - N}{12} - T_y$$

$$\begin{aligned} \sum y^2 &= \frac{41^3 - 41}{12} - 161.5 \\ &= 5578.5 \end{aligned}$$

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d^2}{2\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

$$= \frac{5552 + 5578.5 - 8233.5}{2\sqrt{(5552)(5578.5)}}$$

$$= \frac{2897}{11130.5}$$

$$r_s = 0.26$$

$$t_{hit} = r_s \sqrt{\frac{N-2}{1-(r_s)^2}}$$

$$= 0.26 \sqrt{\frac{41-2}{1-(0.26)^2}}$$

$$t_{hit} = 1.68$$

Dari perhitungan diatas diperoleh bahwa  $T_{hitung} (1,68) < t_{tabel} (2,042)$ , maka menerima  $H_0$  dan menolak  $H_1$ . Dimana menyatakan bahwa tidak terdapat korelasi positif antara Modal Sosial Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) terhadap tingkat Partisipasi Petani dalam pengelolaan air irigasi.

**Lampiran 19. Kuisisioner**

NO :.....

**KUISISIONER**

**HUBUNGAN ANTARA MODAL SOSIAL HIPPA DALAM GABUNGAN  
HIPPA TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI PETANI DALAM  
PENGELOLAAN AIR IRIGASI**

**(Studi Kasus pada Gabungan HIPPA “Tirto Aji” di Desa Banarankulon,  
Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk)**

**A. IDENTITAS RESPONDEN**

Nama : .....

Umur : .....

Jenis Kelamin : .....

Pendidikan Formal Terakhir : .....

Pekerjaan Utama : .....

Alamat : .....

Luas lahan : .....

Wilayah Daerah Irigasi : .....

**B. MODAL SOSIAL HIPPA**

**I. Kepercayaan**

1. Bagaimana kepercayaan yang diberikan anggota (pengurus HIPPA) kepada ketua HIPPA dalam menerima perintah?
  - a. Mau melaksanakan perintah dan berkerjasama
  - b. Mau melaksanakan perintah bila diminta
  - c. Tidak mau melaksanakan perintah

Alasan.....

2. Bagaimana kepercayaan yang diberikan petani kepada ketua HIPPA dalam menerima perintah?
  - a. Mau melaksanakan perintah dan berkerjasama
  - b. Mau melaksanakan perintah bila diminta
  - c. Tidak mau melaksanakan perintah

Alasan.....



3. Bagaimana hubungan antara ketua HIPPA dengan pengurus HIPPA?
  - a. Selalu berkerjasama dan mementingkan kepentingan sosial
  - b. Selalu berkerjasama namun hanya untuk kepentingan individu
  - c. Tidak pernah mau berkerjasama

Alasan.....

4. Bagaimana hubungan antara ketua HIPPA dengan petani?
  - a. Saling mendukung dan terbuka untuk kemajuan bersama
  - b. Saling mendukung namun hubungannya bersifat tertutup
  - c. Tidak saling mendukung dan terbuka

Alasan.....

5. Bagaimana hubungan antara pengurus HIPPA dengan petani?
  - a. Selalu ada koordinasi yang baik dan transfer informasi dari ketua HIPPA
  - b. Jarang ada koordinasi dan transfer informasi dari ketua HIPPA
  - c. Tidak pernah ada koordinasi maupun transfer informasi

Alasan.....

6. Bagaimana hubungan antar pengurus HIPPA?
  - a. Baik (saling berkerjasama)
  - b. Kurang baik (berkerjasama bila di perintah oleh ketua HIPPA)
  - c. Buruk (berjalan sendiri-sendiri)

Alasan.....

7. Bagaimana transfer informasi dari ketua HIPPA kepada petani?
  - a. Informasi yang diterima petani baik
  - b. Informasi yang diterima petani kurang baik
  - c. Informasi yang diterima petani buruk

Alasan.....

## II. Norma Sosial

1. Apakah ada peraturan yang dibuat oleh HIPPA (tentang sanksi-sanksi penyalahgunaan dana IPAIR dan penyelewengan air irigasi)?
  - a. Ada dan berjalan
  - b. Ada namun tidak dijalankan
  - c. Tidak ada peraturan

Alasan.....

2. Bagaimanakah pandangan terhadap peraturan yang telah dibuat?
  - a. Menguntungkan semua pihak
  - b. Hanya menguntungkan sebagian pihak saja
  - c. Merugikan semua pihak

Alasan.....



3. Bagaimana ketaatan ketua HIPPA terhadap peraturan yang ada?
  - a. Tahu dan menaati peraturan yang ada
  - b. Tahu namun tidak menaati
  - c. Tidak tahu

Alasan.....

4. Bagaimana ketaatan pengurus HIPPA terhadap peraturan yang ada?
  - a. Tahu dan menaati peraturan yang ada
  - b. Tahu namun tidak menaati
  - c. Tidak tahu

Alasan.....

5. Bagaimana ketaatan petani terhadap peraturan yang ada?
  - a. Tahu dan menaati peraturan yang ada
  - b. Tahu namun tidak menaati
  - c. Tidak tahu

Alasan.....

6. Apakah ada sanksi terhadap pelanggaran peraturan?
  - a. Ada dan berlaku bagi semua pihak
  - b. Ada namun hanya berlaku bagi sebagian pihak saja
  - c. Tidak ada sanksi

Alasan.....

7. Bagaimana keadilan peraturan dalam mengatur hak dan kewajiban semua pihak?
  - a. Adil (tidak ada pilih kasih bagi semua pihak)
  - b. Kurang adil (hanya menguntungkan sebagian pihak saja)
  - c. Tidak adil bagi semua pihak

Alasan.....

8. Bagaimana pemberian sanksi bila ada yang melanggar peraturan?
  - a. Sesuai dengan tingkat kesalahannya
  - b. Semua kesalahan di anggap sama
  - c. Sesuai kemauan ketua HIPPA

Alasan.....

### III. Jaringan Kerjasama

1. Bagaimana kerjasama antar anggota HIPPA?
  - a. Adanya kerjasama dan dukungan antar anggota HIPPA
  - b. Adanya kerjasama antar anggota HIPPA namun tidak saling mendukung
  - c. Tidak ada kerjasama dan dukungan

Alasan.....



2. Bagaimana kerjasama antar HIPPA dalam Gabungan HIPPA?
  - a. Adanya kerjasama dan dukungan antar anggota HIPPA
  - b. Adanya kerjasama antar anggota HIPPA namun tidak saling mendukung
  - c. Tidak ada kerjasama dan dukungan

Alasan.....

3. Bagaimana kerjasama dengan kelompok tani?
  - a. Adanya kerjasama dan dukungan dengan kelompok tani
  - b. Adanya kerjasama dengan kelompok tani namun tidak saling mendukung
  - c. Tidak ada kerjasama dan dukungan

Alasan.....

4. Bagaimana kerjasama dengan Petugas Penyuluh Lapang (PPL)?
  - a. Adanya kerjasama dan dukungan dengan PPL
  - b. Adanya kerjasama dengan PPL namun tidak saling mendukung
  - c. Tidak ada kerjasama dan dukungan

Alasan.....

5. Bagaimana kerjasama dengan Juru Pengairan?
  - a. Adanya kerjasama dan dukungan dengan Juru Pengairan
  - b. Adanya kerjasama dengan Juru Pengairan namun tidak saling mendukung
  - c. Tidak ada kerjasama dan dukungan

Alasan.....

6. Bagaimana kerjasama dengan Pemerintah Desa?
  - a. Adanya kerjasama dan dukungan dengan Pemerintah Desa
  - b. Adanya kerjasama dengan Pemerintah Desa namun tidak saling mendukung
  - c. Tidak ada kerjasama dan dukungan

Alasan.....

7. Bagaimana kerjasama dengan Dinas Pertanian?
  - a. Adanya kerjasama dan dukungan dengan Dinas Pertanian
  - b. Adanya kerjasama dengan Dinas Pertanian namun tidak saling mendukung
  - c. Tidak ada kerjasama dan dukungan

Alasan.....

8. Bagaimana kerjasama dengan Dinas Pengairan?
  - a. Adanya kerjasama dan dukungan dengan Dinas Pengairan
  - b. Adanya kerjasama dengan Dinas Pengairan namun tidak saling mendukung
  - c. Tidak ada kerjasama dan dukungan

Alasan.....

## C. PARTISIPASI PETANI

### I. Perencanaan

#### a. Teknis

1. Bagaimana keterlibatan anggota dalam rapat perencanaan tata tanam dan pola tanam?
  - a. Anggota hadir dalam rapat dan mengikuti kesepakatan bersama
  - b. Anggota hadir dalam rapat namun tidak mengikuti kesepakatan bersama
  - c. Anggota tidak hadir dalam rapat

Alasan.....

2. Bagaimana keterlibatan anggota dalam rapat perencanaan pembagian kebutuhan air irigasi?
  - a. Anggota hadir dalam rapat dan mengikuti kesepakatan bersama
  - b. Anggota hadir dalam rapat namun tidak mengikuti kesepakatan bersama
  - c. Anggota tidak hadir dalam rapat

Alasan.....

3. Bagaimana keterlibatan anggota dalam rapat perencanaan pemeliharaan saluran irigasi?
  - a. Anggota hadir dalam rapat dan memberi saran
  - b. Anggota hadir dalam rapat namun tidak memberikan saran
  - c. Anggota tidak hadir dalam rapat

Alasan.....

4. Bagaimana keterlibatan anggota dalam rapat perencanaan penentuan sarana yang dibutuhkan dalam pemeliharaan saluran irigasi?
  - a. Anggota hadir dalam rapat dan telah memahami dengan baik
  - b. Anggota hadir dalam rapat namun tidak memahami dengan baik
  - c. Anggota tidak hadir

Alasan.....

#### b. Kelembagaan

5. Bagaimana keikutsertaan anggota dalam menyampaikan pendapat atau saran dalam rapat?
  - a. Anggota hadir dalam rapat dan memberikan pendapat atau saran
  - b. Anggota hadir dalam rapat namun jarang menyampaikan pendapat atau saran
  - c. Anggota tidak pernah memberikan pendapat atau saran

Alasan.....

**c. Finansial**

6. Bagaimana keterlibatan anggota dalam penentuan besarnya IPAIR?
  - a. Anggota terlibat langsung dan mengikuti kesepakatan bersama
  - b. Anggota terlibat langsung namun tidak mengikuti kesepakatan bersama
  - c. Anggota tidak terlibatAlasan.....
7. Bagaimana keterlibatan anggota dalam menyusun penggunaan dana IPAIR?
  - a. Anggota terlibat langsung dan mengikuti kesepakatan bersama
  - b. Anggota terlibat langsung namun tidak mengikuti kesepakatan bersama
  - c. Anggota tidak terlibatAlasan.....

**II. Pelaksanaan****a. Teknis**

1. Bagaimana keikutsertaan anggota dalam pelaksanaan tata tanam dan pola tanam?
  - a. Anggota melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat
  - b. Anggota melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dengan terpaksa
  - c. Anggota tidak mau melaksanakan kesepakatan yang telah dibuatAlasan.....
2. Bagaimana keikutsertaan anggota dalam setiap kegiatan gotong royong untuk memperbaiki adanya kerusakan saluran air?
  - a. Anggota selalu ikut serta dalam setiap kegiatan gotong royong
  - b. Anggota jarang ikut serta dalam kegiatan gotong royong dengan terpaksa
  - c. Anggota tidak pernah ikut sertaAlasan.....
3. Bagaimana keikutsertaan anggota dalam setiap kegiatan gotong royong untuk membersihkan saluran air dari lumpur atau tetumbuhan?
  - a. Anggota selalu ikut serta dalam setiap kegiatan gotong royong
  - b. Anggota jarang ikut serta dalam kegiatan gotong royong
  - c. Anggota tidak pernah ikut sertaAlasan.....

**b. Kelembagaan**

4. Bagaimana kehadiran anggota dalam setiap pertemuan rutin kelompok?
  - a. Ya, selalu (> dari 60%)
  - b. Kadang-kadang (30% sampai 60%)
  - c. Tidak pernah (< dari 30%)Alasan.....

Bagaimana kehadiran anggota dalam pelatihan yang diberikan Petugas Penyuluh Lapang (PPL)?

- a. Ya, selalu (> dari 60%)
- b. Kadang-kadang (30% sampai 60%)
- c. Tidak pernah (< dari 30%)

Alasan.....

**c. Finansial**

5. Bagaimana kedisiplinan anggota dalam membayar IPAIR?

- a. Anggota selalu membayar tepat waktu
- b. Anggota jarang membayar tepat waktu
- c. Anggota tidak pernah membayar IPAIR

Alasan.....

6. Bagaimana pembayaran IPAIR yang dilakukan oleh anggota?

- a. Selalu sesuai dengan besar IPAIR yang sudah ditentukan
- b. Kadang-kadang kurang dari besar IPAIR yang sudah ditentukan
- c. Tidak pernah membayar IPAIR

Alasan.....

**III. Monitoring dan evaluasi**

**a. Teknis**

1. Bagaimana pengukuran hasil kegiatan pembagian air irigasi?

- a. Sukses dilihat dari semua anggota menerima jatah air irigasi dengan adil dan merata
- b. Kurang sukses dilihat dari adanya sebagian anggota yang dirugikan dalam pembagian air irigasi
- c. Tidak sukses dilihat semua anggota dirugikan dalam pembagian air irigasi

Alasan.....

2. Bagaimana pelaporan anggota dengan adanya kendala kurangnya pasokan air irigasi?

- a. Anggota melakukan pelaporan secara kontinyu
- b. Anggota melakukan pelaporan namun tidak kontinyu
- c. Anggota tidak melakukan pelaporan adanya kendala

Alasan.....

3. Bagaimana kegiatan monitoring yang dilakukan HIPPA (bagian teknis HIPPA) terhadap pembagian air irigasi?

- a. Setiap kali pembagian air
- b. Setiap bulan sekali
- c. Tidak pernah

Alasan.....

**b. Kelembagaan**

4. Bagaimana kehadiran anggota dalam rapat evaluasi kerja HIPPA yang sudah dilakukan?
- Sering (> dari 60%)
  - Jarang (30% sampai 60%)
  - Tidak pernah (< dari 30%)

Alasan.....

5. Bagaimana kehadiran anggota dalam rapat evaluasi kerja HIPPA yang akan dilakukan selanjutnya?
- Sering (> dari 60%)
  - Jarang (30% sampai 60%)
  - Tidak pernah (< dari 30%)

Alasan.....

**c. Finansial**

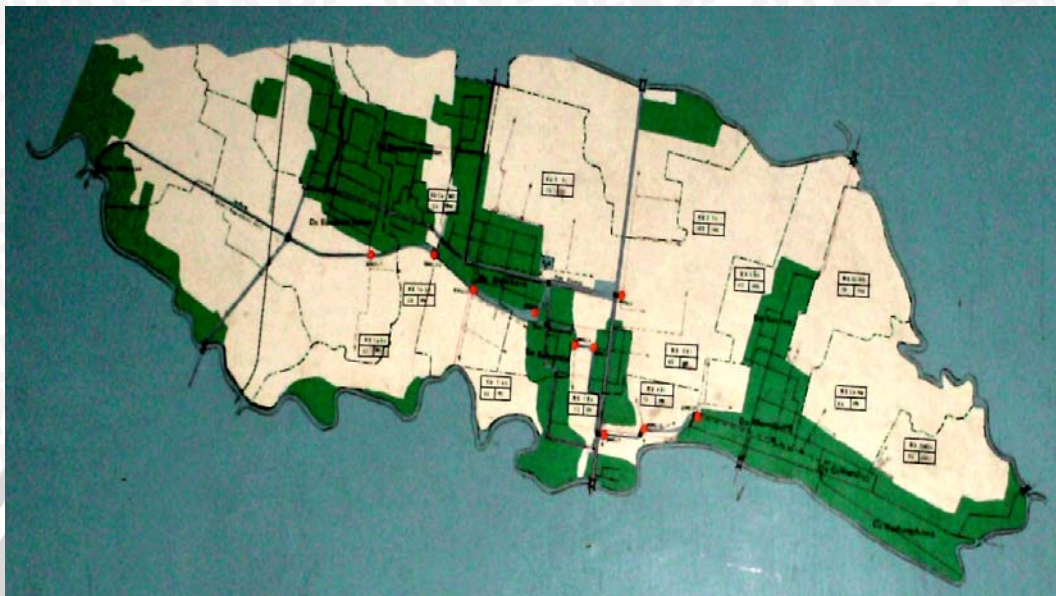
6. Evaluasi pembayaran IPAIR dari anggota?
- 75% - 100%
  - 50% - 75%
  - Kurang dari 50%

Alasan.....

7. Bagaimana penggunaan alokasi dana IPAIR?
- Sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat
  - Sebagian ada yang menyimpang dari kesepakatan yang telah dibuat
  - Tidak ada yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat

Alasan.....

Lampiran 20. Peta Daerah Irigasi Ngudikan Kiri



## Lampiran 21. Dokumentasi



**Dam Ngudikan**



**Kantor Sekretariat Gabungan HIPPA "Tirto Aji"**



**Arisan Rutin Gabungan HIPPA "Tirto Aji"**





**Wawancara Dengan Petani Pada Arisan Rutin**



**Wawancara Dengan Petani di Sawah**



**Wawancara Dengan Petani di Saluran Tersier**



**Wawancara Dengan Petani Waktu Mendapat Jatah Gilir Air**



**Kerja Bakti Membersihkan Saluran Irigasi**



**Gotong-royong Membangun Saluran Tersier**